



PEMERINTAH PROVINSI NTB

LAPORAN APBN TAHUN 2020 (TRIWULAN III)



BAPPEDA PROVINSI NTB
2020

KATA PENGANTAR

*Bismilahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Alhamdulillah, puji Syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya pada kita semua, sehingga atas perkenan-Nya penyusunan Laporan APBN Tahun 2020 Triwulan III dapat diselesaikan. Laporan ini dihayatkan untuk memberikan gambaran terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) oleh Satuan Kerja pada Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBN di wilayah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2020 diselenggarakan oleh 64 Satuan Kerja (Satker) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.391.342.881.000 yang tersebar pada 45 Program, 130 kegiatan, dan 214 sub kegiatan. Terdiri dari 48 Satker Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 346.838.237.000 dan 10 Saker Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 44.504.644.000.

Pada triwulan III Tahun 2020, sebagian besar Satker mengalami rasionalisasi anggaran bahkan terdapat 9 satker yang di-nol-kan anggarannya dengan total rasionalisasi mencapai Rp. 117.030.996.000, sehingga sisa anggaran menjadi Rp.274.311.885.000 dengan rincian Rp.20.976.934.000 dilaksanakan oleh Satker lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB dan Rp.253.334.951.000 dilaksanakan oleh Satker lingkup Pemerintah Provinsi NTB yang terdiri dari Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.97.060.291.000 dan Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp.156.274.660.000. Meskipun ada rasionalisasi, ada beberapa Satker yang baru turun DIPAny di triwulan III terutama di Kabupaten/Kota sebanyak 6 Satker dengan alokasi tambahan sebesar Rp.7.650.000.000, sehingga total alokasi dana Dekon/TP di Provinsi NTB menjadi Rp.281.961.885.000.

Adapun realisasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatannya sampai triwulan III secara rata-rata baru mencapai 44,57% dengan realisasi keuangan sebesar Rp.181.896.879.810 atau 66,31%, dengan rincian kinerja dana dekon sebesar 41,50% dengan realisasi keuangan 66,10%, sedangkan dana tugas pembantuan terdiri tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh satker provinsi sebesar 72,71% dengan realisasi keuangan 72,70%, dan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh satker sebesar 44,57% dengan realisasi keuangan 66,43%. Capaian ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tirwulan II, ada peningkatan realisasi keuangan sebesar 34,74% dan realisasi fisik sebesar 27,63%.

Rendahnya capaian kinerja secara umum disebabkan beberapa hal antara lain (1) terdapat banyak kegiatan/sub kegiatan dana dekon yang pelaporan pencapaian fisiknya pada triwulan IV; (2) adanya penundaan pelaksanaan kegiatan pada triwulan IV akibat pandemi Covid-19; (3) lambatnya petunjuk teknis terkait pelaksanaan kegiatan dari Kementerian / Lembaga yang memberikan dana APBN; (4) Terdapat adanya pemotongan anggaran program/kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja untuk penanganan Covid-19; dan (5) Ada beberapa DIPA yang baru turun dari Kementerian / Lembaga yang memberikan dana APBN pada triwulan III.

Dalam penyusunan Laporan APBN Tahun 2020 Triwulan III ini tidak luput dari berbagai kekurangan dan kesalahan, maka dari itu kami haturkan permohonan maaf serta mengharapkan adanya saran dan kritik, sehingga laporan ini dapat menjadi acuan dalam upaya perbaikan kinerja pada Satuan Kerja pada triwulan berikutnya. Akhirnya, semoga Allah subhanahu wata'ala memberkahi dan senantiasa memberikan pertolongan, petunjuk dan hidayah-nya bagi kita semua

Wabillahi taufiq walhidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mataram, Oktober 2020

Kepala BAPPEDA Provinsi NTB,



Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si.
Pembina Utama Muda

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	3
C. INFORMASI RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	4
1. Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Makro Tahun 2020	4
2. Arah Pengembangan Wilayah	6
3. Arah Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara	8
4. Tema dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020	9
5. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	12
a) Prioritas Nasional Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	12
b) Prioritas Nasional Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah	33
c) Prioritas Nasional Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja	48
d) Prioritas Nasional Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup	69
e) Prioritas Nasional Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	86
BAB II : PENDAHULUAN	103
A. PELAKSANAAN APBN PADA PEMERINTAH PROVINSI NTB	105
B. PELAKSANAAN APBN PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	109
BAB III : PENUTUP	110
A. KESIMPULAN	112
B. SARAN	113

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 2.	Arah Kebijakan Makro Tahun 2020.....	6
Gambar 3.	Misi Pembangunan Nasional 2020 - 2024	10
Gambar 4.	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2020	11
Gambar 5.	Kerangka PN Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	13
Gambar 6.	Kerangka PN Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah	34
Gambar 7.	Kerangka PN Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja.....	50
Gambar 8.	Kerangka PN Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup	70
Gambar 9.	Kerangka PN Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	87
Tabel 1.	Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2020.....	5
Tabel 2.	Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2020.....	7
Tabel 3.	Target Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara.....	9
Tabel 4.	Indikator Pembangunan Tahun 2020.....	11
Tabel 5.	Sasaran dan Indikator PN Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	12
Tabel 6.	Sasaran dan Indikator PP Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan	14
Tabel 7.	Sasaran dan Indikator KP dari PP Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan	14
Tabel 8.	Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	17
Tabel 9.	Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	18
Tabel 10.	Sasaran dan Indikator PP Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovasi.....	20
Tabel 11.	Sasaran dan Indikator KP dari PP Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovasi.....	21
Tabel 12.	Sasaran dan Indikator PP Pengentasan Kemiskinan	24
Tabel 13.	Sasaran dan Indikator KP dari PP Pengentasan Kemiskinan	24
Tabel 14.	Sasaran dan Indikator PP Revolusi Mental, Pembangunan Kebudayaan, dan Prestasi Bangsa	27
Tabel 15.	Sasaran dan Indikator KP dari PP Revolusi Mental, Pembangunan Kebudayaan, dan Prestasi Bangsa.....	28
Tabel 16.	Sasaran dan Indikator PN Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah	33
Tabel 17.	Sasaran dan Indikator PP Perluasan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar	34
Tabel 18.	Sasaran dan Indikator KP dari PP Perluasan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar	36

Tabel 19.	Sasaran dan Indikator KP dari PP Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana.....	38
Tabel 20.	Sasaran dan Indikator KP dari PP Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana.....	39
Tabel 21.	Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	43
Tabel 22.	Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	43
Tabel 23.	Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Infrastruktur Perkotaan	44
Tabel 24.	Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Infrastruktur Perkotaan	45
Tabel 25.	Sasaran dan Indikator PP Transformasi Digital	47
Tabel 26.	Sasaran dan Indikator KP dari PP Transformasi Digital	47
Tabel 27.	Sasaran dan Indikator PN Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja	49
Tabel 28.	Sasaran dan Indikator PP Penguatan Kewirausahaan dan UMKM.....	50
Tabel 29.	Sasaran dan Indikator KP dari PP Penguatan Kewirausahaan dan UMKM.....	51
Tabel 30.	Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrilisasi	52
Tabel 31.	Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrilisasi	53
Tabel 32.	Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja.....	60
Tabel 33.	Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja	60
Tabel 34.	Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	63
Tabel 35.	Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	64
Tabel 36.	Sasaran dan Indikator PP Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	66
Tabel 37.	Sasaran dan Indikator PP Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	67
Tabel 38.	Sasaran dan Indikator PN Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup.....	69
Tabel 39.	Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan	71
Tabel 40.	Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan	72
Tabel 41.	Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air	75

Tabel 42.	Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air	76
Tabel 43.	Sasaran dan Indikator PP Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan EBT.....	80
Tabel 44.	Sasaran dan Indikator KP dari PP Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan EBT	81
Tabel 45.	Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup ...	82
Tabel 46.	Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	83
Tabel 47.	Sasaran dan Indikator PP Penguatan Ketahanan Bencana.....	85
Tabel 48.	Sasaran dan Indikator KP dari PP Penguatan Ketahanan Bencana...	85
Tabel 49.	Sasaran dan Indikator PN Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	86
Tabel 50.	Sasaran dan Indikator PP Stabilitas Keamanan Nasional	87
Tabel 51.	Sasaran dan Indikator KP dari PP Penguatan Kemampuan Pertahanan	88
Tabel 52.	Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional	89
Tabel 53.	Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional	90
Tabel 54.	Sasaran dan Indikator PP Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi.....	91
Tabel 55.	Sasaran dan Indikator KP dari PP Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi.....	92
Tabel 56.	Sasaran dan Indikator PP Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut	98
Tabel 57.	Sasaran dan Indikator KP dari PP Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut	98
Tabel 58.	Sasaran dan Indikator PP Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas.....	101
Tabel 59.	Sasaran dan Indikator KP dari PP Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas	102
Tabel 60.	Capaian Realisasi APBN Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB.....	105
Tabel 61.	Capaian Realisasi APBN Tahun 2020 Triwulan II pada Pemerintah Provinsi NTB.....	106
Tabel 62.	Capaian Realisasi APBN Tahun 2020 Triwulan II pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB	110

BAB I : PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9 menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum, dimana urusan pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota (sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah). Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Usuran pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat diselenggarakan (Pasal 19) sebagai berikut:

- a. sendiri oleh Pemerintah Pusat;
- b. dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi; atau;
- c. dengan cara menugasi Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

Dalam menjalankan pemerintahan di daerah ini, pemerintah daerah memiliki hak **Otonomi daerah Indonesia**. Otonomi daerah adalah segala hak, kuasa, kewenangan dan kewajiban dari daerah otonom dalam rangka mengatur dan menyelenggarakan sendiri perihal pemerintahan ataupun kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya otonomi daerah ini, diharapkan pelayanan masyarakat dapat meningkat, begitupun dengan pengembangan demokrasi. Ketika daerah otonom menjalankan otonomi daerahnya, daerah tersebut dapat meningkatkan daya saing beserta pemberdayaan masyarakatnya. Selain itu, otonomi daerah juga dapat menjadikan komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi lebih intens. Selanjutnya prinsip penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangannya di daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.

Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan, karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Disamping itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah.

Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil Pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/ atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi penugasan.

Penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Semua urusan pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagian anggaran kementerian/lembaga.

Dana dekonsentrasi pada hakekatnya merupakan bagian anggaran kementerian/ lembaga yang dialokasikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah propinsi, sesuai dengan beban dan jenis kewenangan yang dilimpahkan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan pelimpahan. Pelimpahan wewenang hanya sebagai kewenangan administrasi saja, untuk kewenangan politik tetap di tangan pemerintahan pusat. Jadi Dekonsentrasi bisa dikatakan sebagai kombinasi antara sentralisasi dan desentralisasi. Ada beberapa kelebihan dari asas dekonsentrasi diantaranya secara politis eksistensi dekonsentrasi akan dapat mengurangi keluhan di daerah terhadap kebijakan

pemerintah pusat, memungkinkan terjadinya kontak secara langsung antara pemerintah dengan rakyat, kehadiran perangkat dekonsentrasi di daerah dapat mengamankan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat atau nasional di bidang politik, ekonomi dan administrasi serta dapat menjadi alat yang efektif untuk menjamin persatuan dan kesatuan nasional. Sementara dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan untuk daerah provinsi atau kabupaten/kota, dan/atau desa sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan penugasan. Sedangkan pemerintah pusat dalam hal ini berwenang dan berkewajiban memberikan perencanaan umum, petunjuk-petunjuk serta biaya. Sedangkan perencanaan lebih rinci, khusus mengenai pengawasan dari kegiatan tersebut dipercayakan kepada pejabat atau aparatur pemerintah pusat yang ada di daerah. Sehingga berdasarkan pola pertanggungjawaban dan pelaporan penyelenggaraan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, maka yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten / Kota hanyalah pelaporan tugas pembantuan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan oleh Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020.

C. INFORMASI RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 ini disusun pada tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019, bersamaan dengan penyusunan RPJMN 2020-2024. Dengan demikian, penyusunan RKP 2020 masih mengacu pada RPJMN 2015-2019 dan diharapkan dapat menjembatani RPJMN 2015-2019 dengan RPJMN 2020-2024.

Penjabaran rencana pembangunan dokumen RKP tahun 2020 dapat dikelompokkan ke dalam prioritas:

1. Pembangunan Nasional; dan
2. Pembangunan Bidang.

Prioritas Pembangunan Nasional secara lebih rinci dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), dan Kegiatan Prioritas (KP) dengan menjaga ketepatan hierarki sasaran dan ketepatan indikator sasaran di setiap tingkatan kinerja. Hal ini penting untuk penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dalam rangka memastikan tercapainya sasaran dan target pembangunan serta dapat terlaksananya evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran PN secara efektif.

Penjabaran RKP tahun 2020 ke dalam 5 (lima) PN meliputi:

- 1) Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;
- 2) Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah;
- 3) Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja;
- 4) Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup; serta
- 5) Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Sasaran prioritas pembangunan yang menjadi fokus pada tahun 2020 diharapkan dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

1. Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Makro Tahun 2020

Kondisi makro ekonomi Indonesia diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi. Sasaran ekonomi makro untuk tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2020

	2018	2019*	2020**
Perkiraan Besaran-besaran Pokok			
Pertumbuhan PDB (%)	5,2	5,3	5,2 – 5,5
Laju inflasi, IHK (%): Akhir Periode	3,13	2,5 – 4,5	2,0 – 4,0
Nilai Tukar Nominal (Rp/USD): Rata-Rata	14.247	15.000	14.000 – 14.500
Neraca Pembayaran			
Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (%)	6,4	5,5	6,9 – 9,2
Pertumbuhan Impor Nonmigas (%)	19,5	8,0	7,6 – 9,4
Cadangan Devisa (USD miliar)	120,7	120,9	121,3 – 122,6
- dalam bulan impor (termasuk utang LN Pemerintah)	6,5	6,4	5,9 – 6,0
Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	3,0	2,9	2,7 – 2,9
Keuangan Negara			
Penerimaan Perpajakan (% PDB)	10,24	11,10	10,57-11,18
Belanja Modal (% PDB)	1,24	1,18	1,43 – 1,58
Subsidi Energi (% PDB)	1,03	0,99	0,82 – 0,83
Keseimbangan Primer (% PDB)	(0,08)	(0,13)	0,00 – 0,23
Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(1,82)	(1,84)	(1,75) – (1,52)
Stok Utang Pemerintah (% PDB)	29,78	30,00	30,10 – 29,40
Investasi			
Peringkat Indonesia pada EODB	72	73	Menuju 40
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	6,7	7,0	6,9 – 7,3
Realisasi investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	721,3	833,0 – 870,0	875,1 – 890,3
Target Pembangunan			
Tingkat Kemiskinan (%)	9,8	8,5 – 9,5	8,5 – 9,0
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3	4,8 – 5,2	4,8 – 5,1
Rasio Gini (nilai)	0,389	0,380 – 0,385	0,375 – 0,380
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai)	71,39	71,98	72,51

Sumber: RKPD Tahun 2020

Kerangka besar arah kebijakan ekonomi makro Indonesia untuk tahun 2020 dapat digambarkan dalam skema pada gambar berikut.

Gambar 1. Arah Kebijakan Makro Tahun 2020



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2019

2. Arah Pengembangan Wilayah

Pengembangan Wilayah pada tahun 2020 bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi wilayah dan sekaligus meningkatkan pemerataan pembangunan kawasan dan daerah-daerah yang relatif tertinggal, terdepan dan terluar. Percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah akan diarahkan pada pengembangan sektor-sektor unggulan, pengembangan jaringan transportasi massal, penguatan konektivitas yang dapat menciptakan nilai tambah dan pendapatan, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan nilai perdagangan wilayah dan memperkuat daya saing wilayah.

Percepatan pertumbuhan wilayah dilakukan dengan mengembangkan kawasan strategis secara terpadu seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), kawasan perkotaan (megapolitan dan metropolitan), serta Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP). Pengembangan kawasan perkotaan khususnya kawasan metropolitan dan kota-kota besar sebagai pusat pertumbuhan wilayah dilakukan dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik perkotaan dan memperluas kerjasama antar daerah yang mencakup kota-kota satelit di sekitarnya dalam pengelolaan transportasi, air bersih dan sanitasi, pengolahan limbah dan persampahan.

Pemerataan wilayah diarahkan pada peningkatan akses dan mutu pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan konektivitas yang dapat meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar rakyat, serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di kawasan dan daerah yang relatif tertinggal, terdepan dan terluar. Percepatan pemerataan dilakukan dengan membangun dan mengembangkan kawasan yang relatif tertinggal, terdepan dan terluar, serta daerah penyangga (hinterland) seperti kawasan perdesaan, kawasan perbatasan, kawasan transmigrasi, daerah tertinggal dan kawasan kepulauan dengan memperhatikan karakter geografis, potensi dan isu strategis wilayah, serta skala pengembangan wilayah.

Pengembangan wilayah dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) wilayah pulau/kepulauan, yaitu:

- a) Wilayah Sumatera;
- b) Wilayah Jawa-Bali,
- c) Wilayah Nusa Tenggara,
- d) Wilayah Kalimantan,
- e) Wilayah Sulawesi,
- f) Wilayah Maluku, dan
- g) Wilayah Papua

Sasaran pengembangan wilayah tahun 2020 ditetapkan dengan mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran wilayah di luar Jawa, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Jawa-Bali.

Tabel 2. Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2020

Wilayah	2017	2018	2019	2020
Sumatera	4,3	4,5	4,6	4,9
Jawa-Bali	5,6	5,7	5,7	5,8
Nusa Tenggara	2,1	-0,7	3,4	3,7
Kalimantan	4,3	3,9	5,3	4,1
Sulawesi	7,0	6,7	6,5	7,0
Maluku	6,7	6,8	6,9	6,7
Papua	4,5	7,0	-14,7	6,0

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2019

3. Arah Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara

Pengembangan wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan kawasan strategis pariwisata, peternakan, perikanan, dan perkebunan; percepatan pembangunan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; serta pemulihan ekonomi pasca bencana Nusa Tenggara Barat.

Pada tahun 2020, pengembangan potensi pariwisata wilayah diarahkan pada pengembangan klaster dan pariwisata terpadu dengan mengoptimalkan potensi alam dan budaya lokal. Pengembangan klaster wisata diharapkan dapat meningkatkan skala ekonomi dan sinergi antar daerah. Pengembangan pariwisata diarahkan untuk mendukung pengembangan potensi lain yang dimiliki wilayah ini, antara lain peternakan (sapi, kuda), pertanian (padi, jagung), perkebunan (kopi), serta perikanan. Penguatan konektivitas, khususnya pelayaran antar pulau dan peningkatan kapasitas pelabuhan dan bandara akan terus dilakukan untuk mendukung upaya peningkatan arus wisatawan dan distribusi komoditas unggulan. Pengembangan kawasan perbatasan dengan Timor Leste di Provinsi Nusa Tenggara Timur selain diarahkan untuk memperkuat kedaulatan dan kebanggaan nasional juga untuk memfasilitasi perdagangan antar kedua negara.

Percepatan pembangunan manusia difokuskan pada peningkatan akses rumah tangga pada pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas. Fokus pengembangan pendidikan juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan atas pendidikan *lifeskills* dan vokasional untuk menunjang sektor-sektor strategis wilayah.

Wilayah Nusa Tenggara termasuk wilayah dengan risiko bencana dan perubahan iklim yang sangat tinggi khususnya gempa bumi, tsunami, tanah longsor, kekeringan, dan banjir. Oleh sebab itu, pada tahun 2020 upaya pengurangan risiko bencana dilakukan dengan mitigasi bencana dan perubahan iklim melalui peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, peningkatan fungsi sistem peringatan dini, peningkatan kerjasama pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi dan masyarakat. Prioritas mitigasi bencana diarahkan pada kawasan-kawasan strategis pariwisata nasional dan kota-kota utama dengan tingkat kepadatan relatif tinggi. Selain itu, upaya pemulihan kembali pascabencana di Nusa Tenggara Barat dan daerah terdampak lainnya akan terus dilanjutkan dan diperkuat.

Sasaran utama pengembangan wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2020 adalah:

- (i) Memacu pertumbuhan ekonomi wilayah;
- (ii) Mempercepat penurunan kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan;
- (iii) Memperluas kesempatan kerja; serta
- (iv) Meningkatkan pembangunan manusia,

Target dari sasaran yang diuraikan di atas dapat ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3. Target Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara

Wilayah	2017*	2018*	2019	2020
LPE (%)	2,1	-0,7	3,4**	3,7
Kemiskinan (%)	18,3	17,9	17,7	15,8
TPT (%)	3,3	3,3	3,2	3,0

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2020

Pengembangan wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2020 diprioritaskan antara lain pada:

- a. Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Lombok – Mandalika (termasuk KEK Mandalika), dan Labuhan Bajo;
- b. Peningkatan pendidikan vokasional pariwisata, pertanian, perikanan, dan peternakan;
- c. Penguatan konektivitas antarpulau untuk mendukung industri peternakan, perikanan, dan pariwisata; serta
- d. Percepatan pembangunan kawasan perdesaan, tertinggal dan perbatasan.

4. Tema dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

Visi pembangunan nasional 2020-2024 berdasarkan visi dan misi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode Tahun 2019-2024 Joko Widodo - Ma'ruf Amin adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi ini diwujudkan melalui sembilan Misi Pembangunan, sebagai berikut: (1) peningkatan kualitas manusia Indonesia; (2) struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; (3) pembangunan yang merata dan berkeadilan; (4) mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; (5)

kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; (6) penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (7) perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; (8) pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; serta (9) sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Gambar 2. Misi Pembangunan Nasional 2020 - 2024



Sumber: RKP Tahun 2020

RKP 2020 merupakan RKP tahun pertama dari pelaksanaan RPJMN 2020-2024, dan menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia. Tema RKP 2020 adalah **“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”**.

Sesuai dengan visi pembangunan, “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, RKP 2020 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi, pembangunan manusia dan masyarakat, dan dimensi pemerataan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4. Indikator Pembangunan Tahun 2020

Indikator Pembangunan	Skenario 2020
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,2 – 5,5
Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,8 – 5,1
Angka kemiskinan (%)	8,5 – 9,0
Rasio gini (indeks)	0,375 – 0,380
Indeks pembangunan manusia (IPM)	72,51

Sumber: RKP Tahun 2020

Dengan mengacu pada sasaran pembangunan yang hendak dicapai, maka arah kebijakan pembangunan yang ditempuh dalam RKP 2020 utamanya akan berfokus pada upaya pembangunan sumber daya manusia dan pemerataan wilayah, yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pelaksanaan pembangunan dituangkan ke dalam lima Prioritas Nasional, yaitu:

- (1) Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;
- (2) Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah;
- (3) Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja;
- (4) Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup; dan
- (5) Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Kelima Prioritas Nasional tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam beberapa Program Prioritas yang masing-masing dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa Kegiatan Prioritas.

Gambar 3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2020
TEMA:
"Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas"



5. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020

Untuk mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam RKP Tahun 2020, Pemerintah mengambil langkah kebijakan yang dituangkan dalam 5 Prioritas Nasional, yang akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut.

a) Prioritas Nasional Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan

PN Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan kondisi global termasuk perkembangan teknologi. Kebijakan pembangunan manusia secara umum akan diarahkan pada tiga strategi: penguatan dan perluasan akses penduduk terhadap layanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat, serta penguatan karakter dan kebudayaan.

Sasaran pembangunan manusia adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya nilai Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Pemuda. Sementara itu, pengentasan kemiskinan ditujukan untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5. Sasaran dan Indikator PN Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan

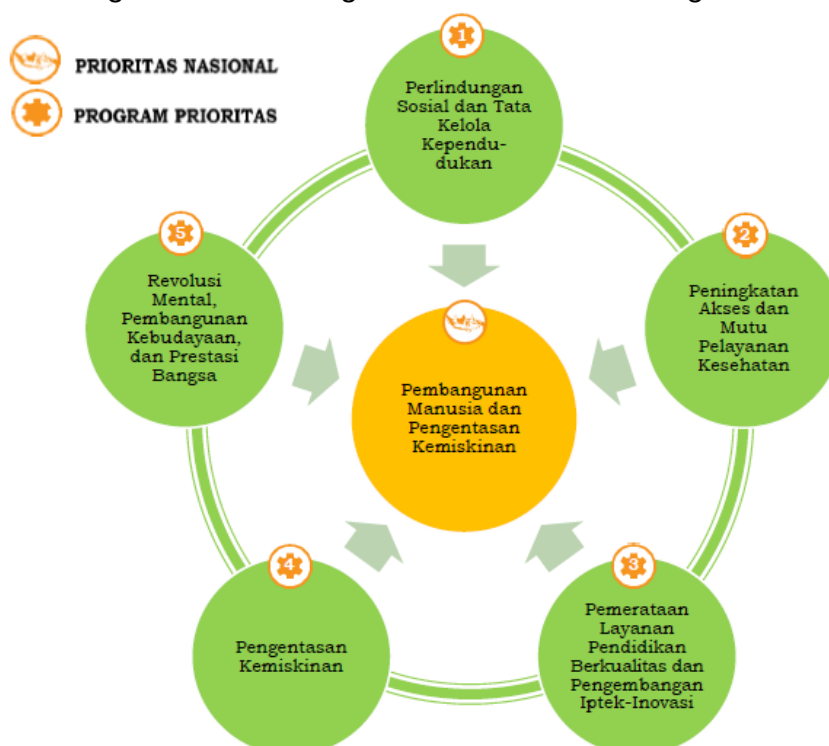
No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017 ⁽¹⁾	2018 ⁽¹⁾	2019 ⁽²⁾	2020 ⁽²⁾
1.	Meningkatnya kualitas SDM Indonesia sebagai individu maupun sebagai komponen dari masyarakat ⁽¹⁾					
	a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	70,81	71,39	71,98	72,51
	b. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Nilai	49,33	51,50	54,67	55,33
2.	Meningkatnya dan meratanya kesejahteraan masyarakat ⁽²⁾					
	a. Tingkat kemiskinan	Persen	10,12	9,66	8,5-9,5	8,5-9,0
	b. Gini Rasio	Nilai	0,393	0,384	0,380-0,385	0,375-0,380

Sumber: RKP Tahun 2020

Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian sasaran PN Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan akan dilakukan melalui lima Program Prioritas, yaitu: (1) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola

Kependudukan; (2) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan; (3) Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovasi; (4) Pengentasan Kemiskinan; dan (5) Revolusi Mental, Pembangunan Kebudayaan, dan Prestasi Bangsa.

Gambar 4. Kerangka PN Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan



Sumber: RKP Tahun 2020

1) Program Prioritas Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan

Pelaksanaan perlindungan sosial masih dihadapkan pada beberapa permasalahan. Perluasan kepesertaan jaminan sosial terutama dari kelompok pekerja informal cenderung melambat. Bantuan sosial juga belum sepenuhnya menjangkau penduduk yang terkendala dokumen kependudukan seperti sebagian penyandang disabilitas dan kelompok yang termarjinalkan. Basis Data Terpadu (BDT) belum menjadi acuan pemerintah daerah dalam melakukan intervensi terhadap penduduk miskin dan rentan. Selain itu, perlindungan sosial yang adaptif terhadap perubahan kondisi katastrofik di lapangan juga belum sepenuhnya berkembang.

Sasaran dan indikator PP Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan tercantum pada tabel berikut.

Tabel 6. Sasaran dan Indikator PP Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan

NO	SASARAN/INDIKATOR	SATUAN	2017	2018	2019	2020
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap program-program perlindungan sosial					
	a. Persentase penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial	%	71,8	78,7	79,5	85
	b. Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah	%	64,4	65,2	68	70
2	Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan					
	Persentase penduduk yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)	%	96,9	93,8	98	100
3	Meningkatnya kesejahteraan penduduk rentan					
	a. Tingkat kemiskinan penduduk penyandang disabilitas	%	N/A	14,98	14,0	13,0
	b. Tingkat kemiskinan penduduk lanjut usia	%	13,10	12,29	12,0	11,0

Sumber: RKP Tahun 2020

Program Prioritas Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan diwujudkan melalui 6 (enam) Kegiatan Prioritas (KP), seperti digambarkan pada Gambar 4.2, yaitu: (1) Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan Peningkatan Kepesertaan Mandiri; (2) Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran; (3) Kesejahteraan Sosial; (4) Penguatan Sistem Layanan Terpadu dan Pendampingan; (5) Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan; dan (6) Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan.

Sasaran masing-masing KP dari PP Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 7. Sasaran dan Indikator KP dari PP Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan

NO	KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN / INDIKATOR	TARGET	SATUAN	LOKASI	K/L PELAKSANA
1	Sistem Jaminan Sosial Nasional Dengan Peningkatan Kepesertaan Mandiri	Meningkatnya cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan				
		a. Persentase penduduk yang tercakup dalam program JKN	85	%	Pusat	• Kemenkes • Kemenko PMK
		b. Jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40 persen penduduk berpendapatan terbawah	107,2 Juta	Jiwa	34 Provinsi	• Kemenkes • Kemensos • Kemenko PMK
		c. Persentase pekerja yang tercakup dalam program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	35	%	Pusat	• Kemenko PMK • KKP • Kemenaker

NO	KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN / INDIKATOR	TARGET	SATUAN	LOKASI	K/L PELAKSANA
2	Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran	Meningkatnya komplementaritas program bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran yang diterima oleh penduduk miskin dan rentan				
		a. Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang memperoleh bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	10 juta	KPM	34 Provinsi	Kemensos
		b. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memperoleh Bantuan Pangan melalui Kartu Sembako Murah	15,6 juta	KPM	34 Provinsi	
		c. Jumlah siswa miskin SD, SMP, SMA/SMK yang memperoleh bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP)	17,9 juta	Orang	34 Provinsi	Kemendikbud
		d. Jumlah siswa miskin MI/MTs/MA /Ula/ Wustha/Ulya/ SDK /SMPTK/ SMAK/ SMTK yang memperoleh bantuan pendidikan melalui KIP	2,2 juta	Orang	34 Provinsi	Kemenag
		e. Jumlah kepala keluarga Miskin dan tidak mampu sesuai dengan data terpadu yang memperoleh subsidi listrik daya 450 VA dan 900 VA	31,4 juta	KPM	34 Provinsi	• Kemen ESDM • Kemensos
		f. Jumlah kepala keluarga yang memperoleh subsidi elpiji 3 kg	31,4 juta	KPM	34 Provinsi	
		g. Jumlah mahasiswa penerima bantuan Bidikmisi	536.763	Orang	34 Provinsi	• Kemenristekdikti • Kemenag
3	Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial				
		a. Jumlah penyandang disabilitas yang memiliki akses terhadap layanan pendidikan dasar	325.000	Jiwa	34 Provinsi	• Kemendikbud • Kemenag
		b. Jumlah K/L dan Pemda yang memperkerjakan penyandang disabilitas	10	K/L dan Pemda	34 Provinsi	• Kemendagri • Kemen PANRB • BKN
		c. Jumlah perusahaan swasta yang mempekerjakan penyandang disabilitas	500	Perusahaan	34 Provinsi	Kemenaker
		d. Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan kesejahteraan sosial	45.000	Jiwa	34 Provinsi	Kemensos
		e. Jumlah literasi khusus bagi penyandang disabilitas Netra	47.000	Eksemplar	Pusat	Kemensos
		f. Jumlah lanjut usia yang mendapatkan bantuan kesejahteraan sosial	30.200	Jiwa	34 Provinsi	Kemensos
		g. Jumlah keluarga Komunitas Adat yang memperoleh pemberdayaan	2.500	Kepala Keluarga	22 Provinsi	Kemensos

NO	KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN / INDIKATOR	TARGET	SATUAN	LOKASI	K/L PELAKSANA
		h. Jumlah orang dengan HIV/AIDS yang memperoleh rehabilitasi sosial	1.300	Jiwa	34 Provinsi	Kemensos
4	Penguatan Sistem Layanan Terpadu Dan Pendampingan	Meningkatnya Pendampingan dan Layanan Dasar Terpadu bagi Seluruh Penduduk				
		a. Jumlah Kabupaten /Kota yang melakukan verifikasi validasi data terhadap penduduk miskin dan rentan	420	Kab/Kota	34 Provinsi	Kemensos
		b. Jumlah Daerah yang menyelenggarakan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	180	Kab/Kota	34 Provinsi	Kemensos
		c. Jumlah daerah yang mengesahkan peraturan terkait dengan penerapan SPM	508	Kab/Kota	34 Provinsi	• Kemendagri • Kemendikbud • Kemenkes • Kemensos • Kemen PUPR • Pemda
		d. Jumlah pendamping yang memperoleh Pelatihan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga	15.000	Pendamping	34 Provinsi	Kemensos
		e. Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang memperoleh pemberdayaan tingkat kecamatan dan desa	13.201	Pendamping	34 Provinsi	Kemensos
		f. Jumlah desa yang memperoleh pendampingan pada proses perencanaan dan pelaporan pembangunan desa	74.957	Desa	33 Provinsi	Kemendes PDTT
		g. Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial yang telah dikembangkan profesinya	30.000	Pendamping	34 Provinsi	• Kemensos • Kementan
		h. Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang terakreditasi	3.000	Lembaga	34 Provinsi	Kemensos
		i. Jumlah konselor Adiksi yang memperoleh pelatihan	3.000	Jiwa	34 Provinsi	Kemensos
5	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan				
		a. Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0-17 tahun	92	%	Pusat	• Kemendagri • Kemen PPPA • MA
		b. Persentase cakupan kepemilikan akta kematian atas peristiwa kematian di fasilitas kesehatan	20	%	Pusat	• Kemendagri • Kemenkes
		c. Persentase cakupan kepemilikan buku nikah dan akta perkawinan bagi pasangan yang menikah	20	%	Pusat	• Kemendagri • Kemenag • MA
		d. Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian bagi pasangan yang sudah bercerai	20	%	Pusat	• Kemendagri • Kemenag • MA

NO	KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN / INDIKATOR	TARGET	SATUAN	LOKASI	K/L PELAKSANA
6	Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan	Menguatnya integrasi sistem administrasi kependudukan				
		Jumlah K/L yang mengintegrasikan data dengan data administrasi kependudukan berbasis NIK	41	K/L	Pusat	• Kemendagri • BPS

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

2) Program Prioritas Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Status kesehatan masyarakat membaik, namun masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Angka kematian ibu dan bayi serta prevalensi stunting masih tinggi. Prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS, TB, dan malaria) masih tinggi serta faktor resiko penyakit tidak menular, seperti obesitas, merokok, dan tekanan darah tinggi menunjukkan kecenderungan meningkat. Selain itu, kinerja sistem kesehatan dan pemerataan akses pelayanan kesehatan masih memerlukan peningkatan.

Program Prioritas Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan akan diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*) dan peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Tabel 8. Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

NO	SASARAN/INDIKATOR	SATUAN	2017	2018	2019	2020
1	Meningkatnya status kesehatan ibu dan anak, KB, kesehatan reproduksi, serta gizi masyarakat					
	a. Prevalensi stunting/ pendek dan sangat pendek pada balita	%	N/A	30,8	24,8	27,10
	b. Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	%	N/A	57,9	N/A	64
	c. Prevalensi wasting/kurus dan sangat kurus pada balita	%	10,6	10,2	9,5	8,08
	d. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR)	Per wanita usia subur (15-49 tahun)	2,28	2,13	2,11	2,10
	e. Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi modern (Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	57,20	N/A	61,36	61,78
	f. Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	10,60	N/A	9,00	8,60
2	Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan faktor resiko penyakit tidak menular					
	a. Insidensi HIV	Per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV	0,24	0,24	0,23	0,21

NO	SASARAN/INDIKATOR	SATUAN	2017	2018	2019	2020
	b. Insidensi TB	Per 100.000 penduduk	319	316	313	272
	c. Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	%	N/A	9,1	N/A	9,1
	d. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Kabupaten/Kota	272	285	300	315
3	Meningkatnya kinerja sistem kesehatan dan pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas					
	a. Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	%	26	44	53	60
	b. Persentase rumah sakit terakreditasi	%	53	60	70	75
	c. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	19,02	23	29,34	35
	d. Persentase puskesmas tanpa dokter	%	16,31	15	13	12
	e. Persentase obat yang memenuhi syarat	%	N/A	80,9	94	82,8
	f. Persentase makanan yang memenuhi syarat	%	N/A	71	90,1	74

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

Program Prioritas Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dilakukan melalui 5 (lima) KP, yaitu: (1) Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi; (2) Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat; (3) Peningkatan Pengendalian Penyakit; (4) Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas); dan (5) Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan.

Sasaran masing-masing KP dari PP Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan seperti pada tabel berikut.

Tabel 9. Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

NO	KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN / INDIKATOR	TARGET	SATUAN	LOKASI	K/L PELAKSANA
1	Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB), dan Kesehatan Reproduksi	Meningkatnya kesehatan ibu dan anak, KB, serta kesehatan reproduksi				
		a. Persentase persalinan di fasilitas kesehatan	87	%	34 Provinsi	Kemendes
		b. Persentase kunjungan neonatal	86	%	34 Provinsi	Kemendes
		c. Jumlah fasilitas kesehatan yang mendapat jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi	18.786	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	34 Provinsi	BKKBN
2	Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat	Meningkatnya percepatan perbaikan gizi masyarakat				
		a. Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK)	16	%	34 Provinsi	• Kemendes • Kementan • Kemendagri
		b. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	40	%	34 Provinsi	
3	Peningkatan Pengendalian Penyakit	Meningkatnya pengendalian penyakit				

NO	KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN / INDIKATOR	TARGET	SATUAN	LOKASI	K/L PELAKSANA
		a. Cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC treatment coverage)	80	%	34 Provinsi	Kemenkes
		b. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai API kurang dari 1 per 1.000 penduduk	466	Kabupaten /Kota	466 Kabupaten /Kota	
		c. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki cakupan deteksi dini faktor resiko PTM minimal 80%	52	Kabupaten /Kota	N/A	
		d. Pekerja yang mendapatkan peningkatan pelayanan kualitas kesehatan di tempat kerja	3.000	Pekerja	Pusat	Kemenaker
		e. Persentase orang dengan HIV/AIDS yang menjalani terapi ARV (ODHA on ART)	23	%		Kemenkes
4	Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Menguatnya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dalam rangka mencegah penyakit tidak menular				
		a. Persentase desa/kelurahan stop buang air besar sembarangan (SBS)	40	%	34 Provinsi	• Kemenkes • Kemendikbud • Kemenag • Kemendagri • K/L terkait lainnya
		b. Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Germas	30	%	34 Provinsi	
		c. Persentase kabupaten/kota sehat	20	%	34 Provinsi	
		d. Jumlah pekerja yang mendapatkan peningkatan pelayanan kualitas kesehatan di tempat kerja	2.500	Pekerja	Pusat	Kemenaker
5	Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatnya pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan				
		a. Jumlah tenaga kesehatan pada penugasan khusus secara individu	4.386	Orang	27 Provinsi	Kemenkes
		b. Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	86,6	%	34 Provinsi	
		c. Jumlah kabupaten/kota yang telah melakukan perbaikan tata kelola pembangunan kesehatan	85	Kabupaten /Kota	10 Kabupaten /Kota	
		d. Persentase sampel makanan yang diperiksa sesuai standar dan memenuhi syarat	75	%	34 Provinsi	BPOM
		e. Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar dan memenuhi syarat	78	%	34 Provinsi	

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

3) Program Prioritas Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan IPTEK-Inovasi

Pembangunan pendidikan yang berkualitas dan merata perlu diupayakan untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas di seluruh wilayah Indonesia. Pendidikan yang berkualitas dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas pendidik, penguatan kelembagaan satuan

pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran dan penguatan literasi. Layanan pendidikan yang berkualitas juga wajib menjangkau seluruh wilayah di Indonesia melalui penyediaan pendidik di seluruh satuan pendidikan, selain itu perlu juga dilakukan penyediaan afirmasi pendidikan dalam rangka mempercepat akses pendidikan di daerah 3T maupun mendorong penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah agar kembali bersekolah. Sementara itu, peningkatan kapabilitas adopsi Iptek dan penciptaan inovasi juga menjadi agenda penting dalam rangka membangun sumber daya manusia Indonesia yang berdaya saing di era *knowledge economy* saat ini.

Sasaran yang ingin dicapai melalui PP Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovasi adalah meningkatnya partisipasi dan kualitas pendidikan, dengan indikator dan target seperti terdapat pada tabel berikut.

Tabel 10. Sasaran dan Indikator PP Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovasi

No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017 ^{a)}	2018 ^{a)}	2019 ^{a)}	2020 ^{a)}
1.	Meningkatnya Partisipasi Pendidikan					
	a. Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,45	8,57	8,70	8,82
	b. Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,85	13,03	13,20	13,04
	c. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD ^{***})	Persen	34,36	40,70	42,77	44,84
	d. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	Persen	108,50	107,37	107,34	107,12
	e. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	Persen	90,23	91,37	92,05	92,73
	f. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	Persen	79,12	79,99	80,78	81,52
	g. Angka Partisipasi Kasar (APK) PT	Persen	29,93	31,61	33,39	35,26
	h. Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15 tahun keatas	persen	95,50	95,95	96,40	96,85
2.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan					
	a. Persentase TK/RA/BA yang berakreditasi minimal E	Persen	10,1	13,6	17,2	21,6
	b. Persentase SD/MI/ Sederajat yang berakreditasi minimal B	Persen	76,8	78,7	80,6	84,4
	c. Persentase SMP/MTs/ Sederajat yang berakreditasi minimal B	Persen	70,1	72,9	75,7	81,3
	d. Persentase SMA/SMK/MA/ Sederajat yang berakreditasi minimal B	Persen	71,0	73,4	75,9	80,86
	e. Persentase prodi PT yang berakreditasi minimal B ^{***})	Persen	51,1	53,9	58,9	63,9
3.	Meningkatnya Kapabilitas Adopsi Iptek dan Penciptaan Inovasi SDM Indonesia					
	Peringkat <i>Global Innovation Index</i>	Peringkat	87	85	84	80-84

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

Sasaran masing-masing KP dari PP Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovasi disusun dengan mempertimbangkan aspek kewilayahan sehingga kebijakan yang dilaksanakan menjadi lebih efektif seperti pada tabel berikut.

Tabel 11. Sasaran dan Indikator KP dari PP Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovasi

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
1.	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Cara Pembelajaran	Meningkatnya Sekolah/Madrasah/Sederajat yang menerapkan Kurikulum 2013 dan meningkatnya rata-rata nilai sikap siswa				
		a. Proporsi sekolah/ madrasah menerapkan Kurikulum 2013	100	Persen	34 Provinsi	• Kemendikbud • Kemenag • Kemendagri • Pemda
		b. Rata-rata nilai sikap siswa minimal baik	Baik	Sikap		
		c. Proporsi anak yang mencapai nilai AKSI:				
		• Kompetensi membaca	57,2	Persen		
		• Kompetensi matematika	26,5	Persen		
		• Kompetensi sains	30,4	Persen		
2.	Afirmasi Akses dan Percepatan Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun	Meningkatnya partisipasi pendidikan di daerah 3T dan daerah dengan jumlah anak tidak sekolah yang tinggi				
		a. Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS)	3,8 juta	Anak	Daerah afirmasi (3T) dan Daerah dengan Anak Tidak Sekolah yang Tinggi	• Kemendikbud • Kemenag • Kemen ESDM • Kemenkominfo • Kemen PUPR • PLN • Kemendagri • Pemda • Kemendikbud
		b. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD daerah 3T	22,27	Persen		
		c. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ Sederajat di Daerah 3T	112,83	Persen		
		d. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ Sederajat di Daerah 3T	91,09	Persen		
		e. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/ MA/Sederajat di Daerah 3T	89,91	Persen		
		f. Angka Partisipasi Kasar (APK) PT di luar Jawa	21,92	Persen		
3.	Peningkatan Kualitas, Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tersedianya pendidik yang berkualitas dan terdistribusikannya guru ke seluruh satuan pendidikan secara merata				
		a. Nilai rata-rata kompetensi pendidik	8,0	Poin	34 Provinsi	• Kemendikbud • Kemenag • Kemendikbud • Kemendagri • Kemendagri
		b. Nilai rata-rata kinerja pendidik	82,40	Poin		• Kemendagri

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
		c. Rasio Guru/Siswa pada jenjang SD/MI/ Sederajat	1:32	Rasio		• Kemendagri • Pemda
		d. Rasio Guru/Siswa pada jenjang SMP/MTs/ SMA/SMK/ MA/Sederajat	1:36	Rasio		
		e. Jumlah dosen yang lulus sertifikasi	10.000	Orang		
		f. Persentase guru yang bersertifikat pendidik	67,47	Persen		
4.	Penjaminan Mutu Pendidikan	Meningkatnya PAUD, Sekolah/Madrasah/ Sederajat, dan Prodi Pendidikan Tinggi yang terakreditasi minimal B				
		a. Proporsi lembaga PAUD yang terakreditasi minimal B	89,90	Persen	34 Provinsi	• Kemendikbud • Kemenag • Kemen PANRB • Kemendagri • Kemenristekdikti • Pemda
		b. Proporsi SD/MI/ Sederajat yang terakreditasi minimal B	83,90	Persen		
		c. Proporsi SMP/MTs/ Sederajat yang terakreditasi minimal B	82,10	Persen		
		d. Proporsi SMA/SMK/ MA/Sederajat yang terakreditasi minimal B	87,40	Persen		
		e. Proporsi Prodi PT yang terakreditasi minimal B	63,87	Persen		
5.	Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas	Meningkatnya keterserapan lulusan pendidikan tinggi di pasar kerja				
		a. Persentase lulusan perguruan tinggi yang langsung bekerja	80	Persen	Pusat	• Kemenristekdikti • Kemenag • Kemenkominfo • Kementan • Kemenperin • BATAN • Kemendag • Kemenkes • Kemenhub
		b. Persentase lulusan perguruan tinggi bersertifikasi kompetensi dan profesi	74	Persen		

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
		Meningkatnya produktivitas riset dan inovasi perguruan tinggi				
		a. Jumlah publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi	27.000	Dokumen	Pusat	• Kemristekdikti • Kemenag
		b. Jumlah prototipe dari perguruan tinggi	133	Prototipe	Pusat	Kemristekdikti
6.	Peningkatan Tata Kelola Pendidikan	Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di pemerintah dan daerah serta satuan pendidikan				
		a. Persentase kab/kota memenuhi SPM pendidikan	100	Persen	514 Kab/ Kota	• Kemendagri • Kemendikbud
		b. Jumlah provinsi memenuhi SPM	100	Persen	34 Provinsi	
		c. Proporsi satuan pendidikan yang menerapkan manajemen berbasis sekolah	60	Persen	34 Provinsi	• Kemendikbud • Kemenag
7.	Kapabilitas Adopsi Iptek dan Penciptaan Inovasi	Terbangunnya kapabilitas Iptek Indonesia untuk menjadi <i>Research and Innovation Power-House</i>				
		a. Jumlah hasil inovasi Prioritas Riset Nasional	7	Produk Inovasi	34 Provinsi	• Kemristekdikti • LIPI • BPPT • LAPAN • BATAN • BAPETEN
		b. Jumlah aplikasi pendaftaran paten (resident)	3.000	Aplikasi	34 Provinsi	• Kemristekdikti • LIPI • BPPT • LAPAN • BATAN • Kemendikbud
		c. Persentase SDM Iptek berkualifikasi S3	15	Persen	34 Provinsi	• Kemristekdikti • LIPI • BPPT
		d. Jumlah tenant yang dibina menjadi Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi	400	Tenant	34 Provinsi	• Kemristekdikti • LIPI • BPPT
		e. Jumlah Pusat Unggulan Iptek yang dibina	85	Lembaga	34 Provinsi	Kemristekdikti

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

4) Program Prioritas Pengentasan Kemiskinan

Tingkat kemiskinan pada Maret 2018 sudah mencapai satu digit, yaitu 9,82 persen dan kembali turun pada September 2018 menjadi 9,66 persen atau sebanyak 25,67 juta jiwa penduduk di bawah garis kemiskinan. Meskipun terus menurun, permasalahan lainnya adalah masih tingginya penduduk rentan yang mudah untuk jatuh miskin kembali. Upaya membuat mereka berdaya secara ekonomi perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan mereka sehingga tidak bergantung hanya kepada bantuan pemerintah.

Sasaran dan indikator PP Pengentasan Kemiskinan tercantum pada tabel berikut.

Tabel 12. Sasaran dan Indikator PP Pengentasan Kemiskinan

No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017*)	2018*)	2019**)	2020**)
1.	Meningkatnya penduduk miskin dan rentan yang berdaya secara ekonomi					
	a. Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif	Persen	28,1	27,9	30	32
	b. Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha	Persen	20,9	25,6	30	35

Sumber: Susenas Maret 2018 (diolah Bappenas)

Program Prioritas Pengentasan Kemiskinan diwujudkan melalui empat KP, yaitu: (1) Akselerasi Penguatan Ekonomi Keluarga; (2) Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial; (3) Peningkatan Akses Pembiayaan Ultra Mikro; dan (4) Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial.

Sasaran masing-masing KP dari PP Pengentasan Kemiskinan disusun dengan mempertimbangkan aspek kewilayahan sehingga kebijakan yang dilaksanakan menjadi lebih efektif, sebagaimana dapat dilihat pada tabel ini.

Tabel 13. Sasaran dan Indikator KP dari PP Pengentasan Kemiskinan

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
1.	Akselerasi Penguatan Ekonomi Keluarga	Meningkatnya ketahanan ekonomi keluarga miskin dan rentan				
		a. Jumlah keluarga yang mendapatkan bimbingan perkawinan	500.000	Pasangan	34 Provinsi	Kemenag

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
		b. Jumlah keluarga miskin yang memperoleh modal dan pelatihan usaha	101.800	Kepala Keluarga	34 Provinsi	Kemensos
2.	Keperawatan Usaha dan Dampak Sosial	Meningkatnya produktifitas usaha kelompok miskin dan rentan				
		a. Jumlah kerjasama Usaha Rintisan dan Pemda untuk keperawatan usaha	250.000	Keluarga	34 Provinsi	•KPPU •Kementan •Kemenaker •Kemenkop UMKM •Kemen PPN/ Bappenas
		b. Jumlah petani, nelayan, dan UMKM yang ditingkatkan kapasitas usahanya	114.500	Orang	34 Provinsi	•KPPU •Kemenperin •Kemenkop UMKM
		c. Jumlah Desa yang memiliki BUMDes yang dikembangkan untuk mendukung Produk Unggulan Desa termasuk di Desa Wisata destinasi prioritas	600	Desa (Unit)	33 Provinsi	Kemendes PDIT
		d. Jumlah durian usaha yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	170	Durian Usaha	34 Provinsi	Kementerian Sosial
3.	Peningkatan Akses Pembiayaan Ultra Mikro	Meningkatnya cakupan penduduk miskin dan rentan yang dapat mengakses dana ultra mikro				
		a. Jumlah pelaku usaha ultra mikro yang difasilitasi	2,1 juta	Orang	34 Provinsi	Kemenkeu
		b. Jumlah lokasi yang mendapatkan zakat dan waqaf produktif	10	Lokasi	10 Provinsi	Kemenag
4.	Reforma Agraria dan Pertanahan Sosial	Mengurangi ketimpangan Penggunaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T), serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan				

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksanaan
		a. Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	130.000	Hektare	26 Provinsi	KLHK
		b. Jumlah bidang tanah yang didistribusi	600.000	Bidang	33 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		c. Jumlah bidang tanah yang dilagudisasi	7.000.000	Bidang	33 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		d. Jumlah masyarakat penerima TORA yang memperoleh pemberdayaan	176	Kelompok masyarakat	33 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		e. Luas hutan yang dikelola oleh masyarakat desa melalui hutan kemasyarakatan, Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA) dan kemitraan kehutanan	500.000	Hektare	33 Provinsi	KLHK
		f. Jumlah kelompok usaha masyarakat desa perhutanan sosial dan kemitraan	1.000	Kelompok	33 Provinsi	KLHK
		g. Jumlah pendamping kompeten dalam pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Tani Hutan/ Kelompok Masyarakat	200	Orang	34 Provinsi	KLHK
		h. Luas kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	5.000.000	Hektare	34 Provinsi	KLHK
		i. Luasan Tanah Satuan Permukiman (SP) Transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL	15.000	Hektare	10 Provinsi	Kemendes PDTT
		j. Bidang Tanah yang difasilitasi penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	26.000	Bidang	30 Kabupaten	Kemendes PDTT

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

5) Program Prioritas Revolusi Mental, Pembangunan Kebudayaan dan Prestasi Bangsa

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Kebudayaan dan sikap mental merupakan penanda yang menegaskan identitas dan jati diri suatu bangsa, yang tercermin pada karakter dan mental individu dan masyarakat. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih merupakan karakter dan sikap mental yang diperlukan untuk meningkatkan prestasi bangsa. PP Revolusi Mental, Pembangunan Kebudayaan, dan Prestasi Bangsa pada tahun 2020 akan diarahkan untuk mencapai sasaran sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 14. Sasaran dan Indikator PP Revolusi Mental, Pembangunan Kebudayaan, dan Prestasi Bangsa

No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017 ¹	2018 ¹	2019 ¹	2020 ¹
1.	Meningkatnya pemajuan kebudayaan dalam memperkuat ketahanan budaya dan kerukunan					
	a. Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	N/A	53,74	Meningkat	Meningkat
	b. Indeks Kerukunan Umat Beragama	Nilai	72,27	N/A	N/A	Meningkat
2.	Meningkatnya kualitas keluarga, anak, perempuan dan pemuda					
	a. Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA)	Nilai	67,9	Meningkat	Meningkat	Meningkat
	b. Proporsi Perempuan 20-24 Tahun yang Menikah Sebelum 18 Tahun	Persen	11,54	11,21	10,59	10,19
	c. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	Persen	9,40 (2016)	Menurun	Menurun	Menurun
	d. Persentase pemuda berumur 16-30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi dalam tiga bulan terakhir	Persen	5,86 (2015)	6,36	Meningkat	Meningkat
	e. Median Usia Kawin Pertama Perempuan	Tahun	21,8	N/A	21,9	21,9
3.	Meningkatnya prestasi olahraga di internasional					
	a. Jumlah perolehan medali emas pada <i>Olympic Games</i> 2020	Medali emas	1 (2016)	N/A	N/A	2
	b. Jumlah perolehan medali emas pada <i>Paralympic Games</i> 2020	Medali emas	0 (2016)	N/A	N/A	1

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

PP Revolusi Mental, Pembangunan Kebudayaan, dan Prestasi Bangsa dijabarkan dalam 7 (tujuh) KP, yaitu: (1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila; (2) Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan; (3) Penguatan Moderasi Beragama; (4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas; (5) Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Perempuan, dan Pemuda; (6) Peningkatan Kualitas Keluarga; dan (7) Peningkatan Prestasi Olahraga. Sasaran masing-masing KP dari PP Revolusi Mental, Pembangunan Kebudayaan, dan Prestasi Bangsa adalah seperti ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 15. Sasaran dan Indikator KP dari PP Revolusi Mental, Pembangunan Kebudayaan, dan Prestasi Bangsa

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
1.	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila	Semakin mantapnya internalisasi nilai esensial revolusi mental (integritas, etos kerja, gotong royong) untuk memperkukuh karakter dan jati diri bangsa				
		a. Penguatan dan pengembangan gugus tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)	3	Gugus tugas GNRM	Pusat	Kemenko PMK
		b. Penguatan pusat-perubahan GNRM di daerah	15	Provinsi	Provinsi	Kemenko PMK
		c. Layanan diseminasi GNRM pada masyarakat	4	Layanan	Pusat	Kemenko PMK
		d. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan karakter bangsa	45.484	Siswa	Provinsi/ Kab/Kota	Kemendikbud
		e. Jumlah laboratorium kebhinekaan bahasa dan sastra	1.000	Unit laboratorium	Provinsi/ Kab/Kota	Kemendikbud
		f. Jumlah peserta dialog wawasan kebangsaan	190	Orang	Pusat	Lemhanas
		g. Jumlah Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Aksi Bela Negara	1	aksi	Pusat	Wantanas
		h. Jumlah pembentukan kader bela negara	4.000.000	orang	Pusat	Kemhan
		i. Jumlah nilai budaya dan tradisi yang direvitalisasi	347	Nilai budaya/ tradisi	Pusat/ Daerah	Kemendikbud
		j. Jumlah film dan produk siaran lainnya yang mengkampanyekan nilai-nilai persatuan dalam kebhinekaan, nasionalisme, patriotisme, dan mentalitas bangsa unggul	15	Film	Pusat	• Kemendikbud • Kemenag • Kemenkominfo • LPP TVRI
2.	Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan	Semakin mantapnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan				

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
		a. Jumlah revitalisasi program museum dan taman budaya	144	Museum/ taman budaya	Provinsi/ Kab/Kota	Kemendikbud
		b. Jumlah festival kebudayaan INDONESIA di daerah	19	Festival	Provinsi/ Kab/Kota	Kemendikbud
		c. Jumlah Lingkungan Budaya Desa Adat yang direvitalisasi	33	Desa adat	Provinsi/ Kab/Kota	Kemendikbud
		d. Jumlah partisipasi Indonesia dalam forum internasional bidang kebudayaan	320	Orang	Pusat	• Kemendikbud • Kemenlu
3.	Penguatan Moderasi Beragama	Menguatnya harmoni dan kerukunan umat beragama				
		a. Jumlah kabupaten/kota mendapatkan bantuan operasional SEKHER FKUB	512	Kabupaten/ Kota	34 Provinsi	Kemenag
		b. Jumlah dialog lintas agama di kecamatan	220	Dialog	34 Provinsi	
		Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama				
		a. Jumlah penyuluh agama yang dibina	10.064	Orang	34 Provinsi	Kemenag
		b. Jumlah rumah ibadah yang bersih dan sehat	4.860	Unit	34 Provinsi	
		Menguatnya penyelenggaraan jaminan produk halal				
		a. Jumlah produk halal yang teregistrasi	228	Register	34 Provinsi	Kemenag
		b. Jumlah produk halal yang tersertifikasi	246	Sertifikat	34 Provinsi	
		c. Jumlah stakeholder JPH yang terbina	1.834	Lembaga	34 Provinsi	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan haji dan umrah				
		a. Jumlah petugas haji yang profesional	2.288	Orang	34 Provinsi	Kemenag
		b. Jumlah penyelenggara umrah dan haji khusus yang dipantau dan diawasi	150	Lembaga	34 Provinsi	
		c. Jumlah jemaah haji peserta bimbingan haji	204.000	Orang	34 Provinsi	
		d. Asrama haji direvitalisasi dan dikembangkan	11	Lokasi	11 Provinsi	

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
		a. Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu yang dibangun	41	Lokasi	25 Provinsi	
		Berkembangnya ekonomi umat dan sumberdaya keagamaan				
		a. Jumlah tanah wakaf yang di legalisasi	2.500	Lokasi	84 Provinsi	Kemenag
		b. Jumlah lembaga zakat terawadi	211	Lembaga	84 Provinsi	
		c. Jumlah lembaga zakat yang terbina	882	Lembaga	84 Provinsi	
4.	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter				
		a. Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber pengetahuan dan pusat kegiatan masyarakat	7,5 juta	Orang	Pusat/ Daerah	• Perpustnas • Kemendikbud • Kemendagri • Kemenkominfo
		b. Jumlah perpustakaan umum yang memberikan pelayanan berbasis inklusi sosial	681	Unit perpustakaan	Pusat/ Daerah	• Perpustnas • Kemendikbud • Kemendagri • Kemenkominfo
		c. Persentase perpustakaan umum yang sesuai standar	20	Persen	Pusat/ Daerah	• Perpustnas • Kemendikbud • Kemenag • Kemristekdikti
		d. Jumlah Gerakan Literasi Nasional (GLN) di daerah	11.957	Lokasi	Daerah	• Kemendikbud • Perpustnas • Kemendagri
5.	Pemenuhan Hak dan Perlindungan bagi Anak, Perempuan dan Pemuda	Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan serta pemuda				
		a. Jumlah materi KIE pencegahan dan penanganan TPPO melalui media cetak dan elektronik	1	Dokumen	Pusat	• Kamen PIPA • Kemensos • Polri • Kemenkes • BNP2TKI
		b. Jumlah K/L yang mendapat Penguatan Kapasitas Kelembagaan Gugus Tugas TPPO	2	K/L	Pusat	• Komnas Perempuan • KPAI • BPS
		c. Persentase perempuan korban TPPO yang mendapat fasilitasi layanan dan pemberdayaan	50	Persen	Pusat	• LPSK • Kemenkumham • Kemendagri • Kemenlu

No.	Registan Prioritas	Sasaran/Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
		d. Jumlah rekomendasi monitoring dan evaluasi SPPT-PIKKT	1	Rekomendasi	Kepri, DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara, Kalteng, Jateng	• Komnas Perempuan • Kemenkumham • Polri • Kejaksaan Agung • MA • Kemenkes • Kemensos
		e. Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam penguatan dan pembinaan kelompok BK-TKI dalam upaya Pemberdayaan Ekonomi, Ketahanan Keluarga, dan Pemenuhan Hak Anak TKI	15	Lokasi	Sumut, Jateng, Jabar, Banten, Kaltim, Batam, Cilacap, Karawang, Cakung, Pasuruan, Bintan, Cibitung, Cibinong, Bitung, dan Medan	• Keman PIPA • BNP2TKI • Kemenaker
		f. Jumlah SDM yang man-dapat sosialisasi Program Teman Anak (Internet Aman untuk Anak)	660	Orang	Pusat	• Keman PIPA • KPI • Kemenkominfo
		g. Jumlah pekerja anak yang dicegah dan ditarik dari tempat kerja	9.000	Pekerja Anak	Pusat	• Kemenaker • Kemendikbud • Keman PIPA • Kemensos
		h. Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terlindungi	18.000	CTKI/TKI	Pusat	• Kemenaker • BNP2TKI • Kemlu
		i. CTKI/TKI yang memenuhi syarat kerja dan procedural	179.860	CTKI/TKI	Pusat	• BNP2TKI
		j. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	6.150	Orang	Pusat	• Kemenpora • Kemendikbud • Kemenristekdikti
6.	Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya peran keluarga untuk penyemaian nilai-nilai luhur dalam rangka membangun karakter bangsa				
		a. Jumlah PIK Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang mendapatkan pembinaan genre	29.327	Kelompok Kegiatan	34 Provinsi	BKKBN

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
		b. Jumlah keluarga yang mempunyai belita dan anak yang memahami pengaruh dan pembinaan tumbuh kembang anak	10.070.685	Keluarga	34 Provinsi	BKCHN
		c. Jumlah keluarga salimah yang mendapatkan pembinaan	7.000	Pesanan	34 Provinsi	Kemanag
		d. Jumlah satuan pendidikan yang memperoleh penyelenggaraan pendidikan keluarga	36.157	Lembaga	34 Provinsi	Kemandikbud
		e. Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam Penguatan dan Pengembangan Pusat Pengembangan Keluarga (PUSPAGA)	4	Provinsi	4 Provinsi	Kemen PPPA
7.	Peningkatan Prestasi Olahraga	Terselenggaranya event olahraga nasional dan meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional				
		a. Jumlah event olahraga nasional [Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralimpiك Nasional (Peparnas) XVI Tahun 2020]	2	Event	Papua	• Kemenko FMK • Kemendagri • Kemenkeu • Kemenpora • Kemen PPN/ Bappenas • Kementerian PUPR • Kemen ATR/HPN • Kemenhub • Kemandikbud • Kemenkes • Kemenristekdikti • Kemenperin • Kemendag • Kemenper • Kemenkominfo • Kemen HUMN • TNI • Polri • BPKG • Basarnas • LKPP
		b. Jumlah cabang olahraga yang lolos kualifikasi pada Olympic Games 2020	3	Cabang Olahraga	Jepang	Kemenpora

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
		b. Jumlah keikutsertaan dalam multievent olahraga regional dan internasional	3	Event	Jepang dan Filipina	• Kemenpora • Kemenlu • Kemensetneg
		c. Jumlah olahragawan andalan yang dibina	1.000	Orang	Pusat	• Kemenpora • Kemendikbud • Kemenristekdikti • Kemensos
		d. Jumlah penghargaan yang diperoleh olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi	118/107/24 (Asean Para Games) 2/1/1 (Olympic Games) 1/3/4 (Paralympic Games)	Medali emas/ perak/ perunggu	Pusat	• Kemenpora • Keman PANRB • BKN • Keman FUPR

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

b) Prioritas Nasional Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah

Kerangka pembangunan infrastruktur tahun 2020 diarahkan untuk perluasan penyediaan pelayanan dasar, pengembangan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi terutama pada kawasan-kawasan prioritas, dan pembangunan infrastruktur perkotaan. Dalam pembangunan infrastruktur tersebut, aspek ketahanan bencana, keberlanjutan, dan pemerataan antar wilayah menjadi perhatian khusus untuk ditangani. Pengembangan infrastruktur dimaksud dilaksanakan dengan strategi pengarusutamaan transformasi digital.

Sasaran dan indikator PN Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah dapat dilihat pada tabel berikut.

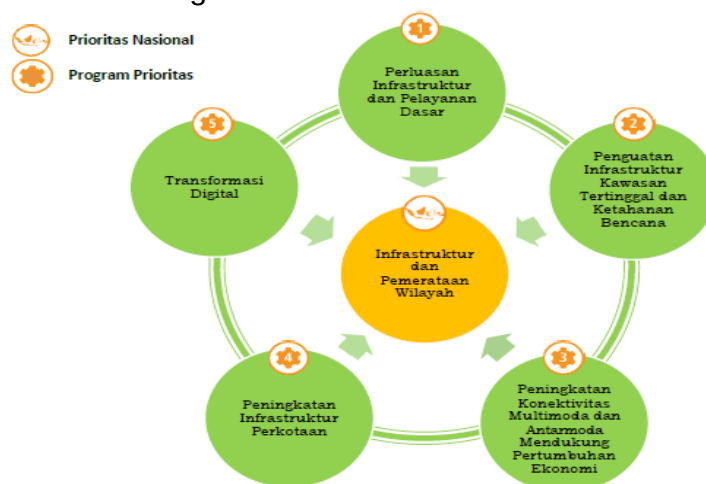
Tabel 16. Sasaran dan Indikator PN Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah

No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017 ^{*)}	2018 ^{*)}	2019 ^{**)}	2020 ^{**)}
1.	Meningkatnya konektivitas antar wilayah					
	Menurunnya waktu tempuh moda jalan pada koridor utama pulau	Jam/100 km	2,5	2,4	2,4	2,3
	Porsi rute pelayaran yang membentuk loop	Persen	N/A	N/A	23	24
2.	Meningkatnya indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)					
	Information and Communication Technologies (ICT) Development Index	Nilai	4,33	4,99	4,9 – 5,2	5,0 – 5,3
3.	Meningkatnya ketahanan bencana terhadap daya rusak air					
	Indeks bencana banjir	Nilai	N/A	N/A	N/A	Turun 2%
4.	Terpenuhinya perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau untuk rumah tangga					
	Persentase rumah tangga yang menempati perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau	Persen	36,58	38,30	40,05	42,60

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019
Keterangan: *) Realisasi; **) Target

Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan utama yang dihadapi pada tahun 2020 serta untuk mencapai sasaran PN Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah, 5 (lima) Program Prioritas yang akan dilaksanakan: (1) Perluasan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar; (2) Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana; (3) Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi; (4) Peningkatan Infrastruktur Perkotaan; dan (5) Transformasi Digital.

Gambar 5. Kerangka PN Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

1) Program Prioritas Perluasan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar

Sasaran dan indikator PP Perluasan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 17. Sasaran dan Indikator PP Perluasan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar

No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017 ⁽¹⁾	2018 ⁽¹⁾	2019 ⁽¹⁾	2020 ⁽¹⁾
1.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau					
	a. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita	Persen	91,55	91,09	91,88	92,72
	b. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding)	Persen	79,60	80,04	81,11	82,88

No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017 ^{a)}	2018 ^{a)}	2019 ^{a)}	2020 ^{a)}
	c. Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan	Persen	51,87	52,41	54,08	55,46
	d. Proporsi rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman (air limbah)	Persen	73,07	74,58	76,78	78,1 akses air limbah layak (termasuk 9,65 akses air limbah aman)
	e. Proporsi rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik	Persen	61,35 (perkotaan)	60,05 (perkotaan)	74,02 (perkotaan)	61,79 penanganan dan 13,74 pengurangan (perkotaan)
	f. Proporsi rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	Persen	59,07	61,29	63,44	65,66 (termasuk 23,23% akses perpipaan)
	g. Proporsi rumah tangga yang menempati hunian akses air minum aman* (perhitungan akses air minum aman melalui susenas dan PKAM dalam proses persiapan)	Persen	N/A	N/A	11	12
	h. Proporsi rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan di tempat terbuka	Persen	10,41	9,36	7,8	6,24
2.	Meningkatnya tingkat keselamatan dan keamanan transportasi					
	Rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan (terhadap <i>baseline</i> 2010)	Persen	32	42	50	53

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

PP Perluasan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar dilaksanakan melalui 4 (empat) KP (1) Penyediaan Akses Perumahan serta Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau; (2) Penyediaan Akses Air Minum serta Sanitasi yang Layak dan Aman; (3) Keselamatan dan Keamanan Transportasi; dan (4) Penyediaan serta Pengamanan Air Baku dan Air Tanah. Sasaran masing-masing KP dari PP Perluasan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar adalah sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 18. Sasaran dan Indikator KP dari PP Perluasan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
1	Penyediaan Akses Perumahan serta Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan serta permukiman yang layak, aman, dan terjangkau				
		a. Jumlah hunian baru layak yang terbangun melalui peran pemerintah	46.300	Unit	34 Provinsi	• Kemen PUPR • Kemendagri • Pemda
		b. Jumlah peningkatan kualitas hunian melalui peran pemerintah	220.000	Unit	34 Provinsi	• Kemen PUPR • Kemensos • Kemendagri • Pemda
		c. Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan	118.460	Rumah Tangga	34 Provinsi	• Kemen PUPR • Kemenkeu • Pemda
		d. Jumlah kabupaten/kota yang mengembangkan iklim kondusif perumahan melalui reformasi perizinan dan administrasi pertanahan	48	Kabupaten/ Kota	34 Provinsi	• Kemen PUPR • Kemen ATR/BPN • Kemendagri • Pemda
		e. Jumlah kabupaten/kota yang mengimplementasikan pemenuhan standar keandalan bangunan	48	Kabupaten/ Kota	34 Provinsi	• Kemen PUPR • Kemendagri • Pemda
		f. Jumlah persil rumah tangga yang mendapatkan fasilitasi pra sertifikasi	1.000	Persil	34 Provinsi	• Kemen PUPR • Pemda
		g. Jumlah Satuan Permukiman yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas	28	Satuan Permukiman	22 Kabupaten /Kota	Kemendes-PD/TT
2.	Penyediaan Akses Air Minum serta Sanitasi yang Layak dan Aman	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum serta sanitasi yang layak dan aman				
		a. Jumlah sambungan rumah SPALD-T skala kota dan skala kawasan berbasis institusi	221.462	Sambungan Rumah	81 Kabupaten /Kota	• Kemen PUPR • Kemenkes • Kemendagri • Pemda
		b. Jumlah rumah tangga yang terlayani SPALD-S	800.000	Kepala Keluarga	24 Kabupaten /Kota	• Kemen PUPR • Kemenkes • Kemendagri • Pemda
		c. Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar sanitary landfill	487.500	Kepala Keluarga	89 Kabupaten /Kota	• Kemen PUPR • Kemenkes • Kemendagri • Pemda

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
		d. Jumlah rumah tangga yang terlayani TPSBR/TPST	260.595	Kepala Keluarga	33 Provinsi	• Keman PUPR • Kemenkes • Kemendagri • Pemda
		e. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem layanan lumpur tinja (PSM)	66	Kabupaten/ Kota	34 Provinsi	• Keman PUPR • Kemenkes • Kemendagri • Pemda
		f. Jumlah sambungan rumah tangga dengan akses air minum layak perpipaan	16.948.228	Sambungan Rumah	34 Provinsi	• Keman PUPR • Kemenkes • Kemendagri • Pemda
		g. Jumlah rumah tangga dengan akses air minum layak non perpipaan (BJP, BPS)	29.510.794	Rumah Tangga	34 Provinsi	• Keman PUPR • Kemenkes • Kemendagri • Pemda
		h. Jumlah rumah tangga dengan akses air minum aman	N/A ^{a/b}	Rumah Tangga	34 Provinsi	• Keman PUPR • Kemenkes • Kemendagri • Pemda
		i. Persentase PDAM dengan kinerja sehat	67,2	Persen	Seluruh PDAM di 34 Provinsi	• Keman PUPR • Pemda
		j. Jumlah desa yang telah stop buang air besar sembarangan di tempat terbuka	32.733 ^a	Desa	32 Provinsi	• Keman PUPR • Kemenkes • Pemda
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Meningkatnya penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi				
		a. Jumlah penanganan blackspot melalui penanganan infrastruktur jalan dan penyediaan perlengkapan fasilitas keselamatan transportasi jalan	33	Paket	33 Provinsi	• Kemenhub • Keman PUPR
		b. Penyediaan serta pemasangan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran/ pesisiran	10	Unit/Lokasi	Tersebar	Kemenhub

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
		c. Panjang jaringan kereta api yang dirawat dan dioperasikan	5.480	Km	Tersebar	Kemahub
4.	Penyediaan serta Pengamanan Air Baku dan Air Tanah	Meningkatnya ketersediaan air baku/air minum dari sumber air terlindungi				
		a. Jumlah embung air baku yang dibangun	22	Embung	5 Provinsi	Kemen PUPR
		b. Jumlah unit air baku yang dibangun	4,63	m ³ /det	29 Provinsi	Kemen PUPR
		c. Jumlah kabupaten/kota rawan air dan pulau kecil tertular yang memperoleh penyediaan air baku	23	Kabupaten/ Kota	5 Provinsi	Kemen PUPR
		d. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem teknologi pemantauan kualitas dan efisiensi suplai air baku	7	Kabupaten/ Kota	Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat	Kemen PUPR
		e. Jumlah unit air baku yang direhabilitasi	32,5	Km	9 Provinsi	Kemen PUPR
		f. Jumlah peraturan perundangan sumber daya air yang diselesaikan	1	UU	Pusat	Kemen PUPR

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

2) Program Prioritas Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana

Sasaran dan indikator PP Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 19. Sasaran dan Indikator KP dari PP Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana

No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017 ¹⁾	2018 ²⁾	2019 ³⁾	2020 ⁴⁾
1.	Meningkatnya konektivitas di daerah tertinggal					
	a. Jumlah lintas perintis ASDP (Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan)	Lintas perintis	291	296	249	230
	b. Jumlah rute perintis transportasi Jalan (Bus)	Rute perintis	223	222	281	300
	c. Jumlah rute perintis transportasi Udara	Rute perintis	201	239	239	201
	d. Jumlah rute perintis transportasi Laut	Rute perintis	117	134	113	157
2.	Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam mengurangi daya rusak air					
	a. Panjang pengendali banjir yang dibangun	Km	162	190	30	220
	b. Panjang pengaman pantai yang dibangun	Km	20	22	13	32

No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017 ^{a)}	2018 ^{a)}	2019 ^{a)}	2020 ^{a)}
	c. Jumlah pengendali lahar/sedimen yang dibangun	Unit	31	31	13	28
	d. Jumlah <i>Flood Forecasting and Warning System (FFWS)</i> yang dibangun/ditingkatkan	Unit	N/A	N/A	N/A	7
3.	Meningkatnya percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat					
	Laju pertumbuhan ekonomi Pulau Papua	Persen	4,5	7,0	5,6	5,95

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

PP Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana dilaksanakan melalui 3 (tiga) KP yaitu (1) Aksesibilitas Daerah Tertinggal; (2) Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur; (3) Pembangunan Terpadu Pesisir Utara Pulau Jawa, dan (4) Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat. Sasaran masing-masing KP dan PP Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana adalah sebagaimana pada tabel.

Tabel 20. Sasaran dan Indikator KP dari PP Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
1.	Aksesibilitas Daerah Tertinggal	Terselenggaranya pembangunan dan pengembangan aksesibilitas daerah tertinggal				
		a. Jumlah bandara di daerah tertinggal yang ditingkatkan kapasitasnya	7	Lokasi	Tersebar	Kemenhub
		b. Jumlah kapal penyeberangan perintis yang dibangun untuk daerah tertinggal	4	Unit	Tersebar	Kemenhub
		c. Jumlah pelabuhan di daerah tertinggal pendukung tol laut yang dikembangkan	10	Lokasi	Tersebar	Kemenhub
		d. Jumlah pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan (SDP) di daerah tertinggal yang dibangun/dikembangkan	13	Pelabuhan	Tersebar	Kemenhub
		e. Jumlah terminal barang yang dibangun/dikembangkan di kawasan perbatasan	6	Lokasi	Tersebar	Kemenhub
		f. Panjang jalan desa strategis yang dibangun/ditingkatkan di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan di daerah tertinggal	20	Km.	Tersebar	Kemendes-PDPT
2.	Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur	Meningkatnya keandalan infrastruktur terhadap bencana				
		a. Jumlah wilayah sungai yang memiliki peta risiko bencana (banjir, longsor, gempa bumi, dan gunung berapi)	64	Unit	30 Provinsi	• Kemen PUPR • KLHK • BNPB

No.	Regiun Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
		b. Panjang perbatasan tebing yang dibangun/ditingkatkan	20	Km	18 Provinsi	Keman PUPR
		c. Jumlah check dam yang dibangun/ditingkatkan	7	Unit	5 Provinsi	Keman PUPR
		d. Panjang sungai yang dinormalisasi dan tanggul yang dibangun/ditingkatkan	151	Km	17 Provinsi	Keman PUPR
		e. Jumlah bangunan sabo yang dibangun/ditingkatkan	21	Unit	7 Provinsi	Keman PUPR
		f. Panjang semuall dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang dibangun/ditingkatkan	20	Km	16 Provinsi	Keman PUPR
		g. Panjang tanggul penahan lumpur yang direhabilitasi/ditingkatkan	8,27	Km	Provinsi Jawa Timur	Keman PUPR
3.	Pembangunan Terpadu Pesisir Utara Pulau Jawa	Terlindungnya kawasan perkotaan di pesisir utara Pulau Jawa dari bencana lingkungan.				
		a. Panjang tanggul sungai yang dibangun/ditingkatkan	12	Km	4 Provinsi	Keman PUPR
		b. Panjang semuall dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang dibangun/ditingkatkan	4,3	Km	Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah	Keman PUPR
		c. Jumlah kabupaten/kota yang membangun sumur resapan	18	Kabupaten/ Kota	5 Provinsi	Keman PUPR
		d. Kapasitas air baku dari sumber air permukaan yang dibangun	0,2	m ³ /detik	5 Provinsi	Keman PUPR
4.	Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat	Terselenggaranya Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat				

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
		a. Pembangunan air baku	4	Unit	Kab. Kasonawaja, Kab. Yapen, Kota Sorong, Kab. Kembela	Kemen PUPR
		b. Pembangunan bangunan pengendali banjir	1,2	Km	Kota Jayapura dan Kota Sorong	Kemen PUPR
		c. Pembangunan jaringan irigasi permukaan	4	Daerah Irigasi	DI Manggar Nabire	Kemen PUPR
		d. Pengeboran sumur eksplorasi air tanah	18	Titik	Kab. Manokwari, Kab. Sorong, Kab. Merauke, Kab. Jayapura, Kab. Biak Numfor, Kab. Mimika, Kab. Asmat	Kemen ESDM
		e. Pembangunan Base Transceiver Station (BTS)	100	Unit	Tersebar	Kemen Kominfo
		f. Penyediaan layanan akses internet	150	Unit	Tersebar	Kemen Kominfo
		g. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	88,5	Lpd	Tersebar	Kemen PUPR
		h. Jumlah sambungan SPALD-T skala kota dan skala kawasan berbasis institusi	1.488	Sambungan Rumah (SR)	Tersebar	Kemen PUPR
		i. Tambahan jumlah desa yang berhasil stop buang air besar sembarangan di tempat terbuka	425	Desa/ Kelurahan	Tersebar	• Kemen PUPR • KemenKes
		j. Jumlah rencana pembangunan infrastruktur permukiman	2	Dokumen	Pusat	Kemen PUPR
		k. Luas kawasan permukiman yang dikembangkan	46,42	Hektar	Kab. Manokwari, Kab. Merauke	Kemen PUPR

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
		l. Luas infrastruktur permukiman berbasis masyarakat di perkotaan yang dibangun	8	Hektar	Kab. Jayapura	Kemen PUPR
		m. Luas bangunan gedung hijau yang dibangun dan direhabilitasi	38.200	m ²	Kab. Manokwari, Kab. Merauke, Kab. Boven Digoel, Kota Jayapura	Kemen PUPR
		n. Luas bangunan kawasan pos lintas batas negara yang ditata	1	Kawasan	Kota Jayapura	Kemen PUPR
		o. Bangunan kawasan prioritas tertentu yang ditata	2	Kawasan	Kab. Jayapura, Kota Jayapura	Kemen PUPR
		p. Fasilitas peningkatan kualitas rumah swadaya	8.000	Unit	Terseber	Kemen PUPR
		q. Pembangunan rumah khusus	500	Unit	Terseber	Kemen PUPR
		r. Jumlah bandara yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya	10	Lokasi	10 Kabupaten/ Kota	Kemenhub
		s. Jumlah pelabuhan yang dibangun dan dikembangkan untuk memenuhi standar pelayanan operasional	5	Lokasi	Kab. Sarmi, Kab. Nabira, Kab. Kaimana, Kab. Kep. Yapen	Kemenhub
		t. Panjang jalan nasional, trans papua, dan perbatasan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya	200	Km	Terseber	Kemen PUPR

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

3) Program Prioritas Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

Sasaran dan indikator PP Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dapat dilihat pada tabel.

Tabel 21. Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ^a	2018 ^a	2019 ^a	2020 ^a
1.	Meningkatnya konektivitas di wilayah pusat-pusat pertumbuhan dan meningkatnya konektivitas multimoda dan antarmoda					
	a. Persentase kondisi mantap jalan nasional dan daerah (provinsi, kabupaten/kota)	Persen	91/68/59	92/67/57	94/69/58	95/70/59
	b. Jumlah produksi penumpang dan angkutan barang kereta api	Juta Orang, Juta Ton	360 Juta Orang, 40 Juta Ton	430 Juta Orang, 45 Juta Ton	513 Juta Orang, 50 Juta Ton	590 Juta Orang, 60 Juta Ton

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

PP Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dilaksanakan melalui 5 (lima) KP yaitu: (1) Konektivitas Transportasi Jalan; (2) Konektivitas Transportasi Kereta Api; (3) Konektivitas Transportasi Laut; (4) Konektivitas Transportasi Udara; dan (5) Konektivitas Transportasi Darat. Sasaran masing-masing KP dari PP peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 22. Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

No.	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
1.	Konektivitas Transportasi Jalan	Terselenggaranya pengembangan jaringan jalan mendukung kawasan prioritas nasional				
		a. Panjang jalan tol baru yang terbangun	600	Km	Tersebar (Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi)	Kemen PUPR

No.	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
		b. Panjang jalan baru yang dibangun	500	Km	Tersebar	Kemen PUPR
		c. Jumlah simpul transportasi yang didukung akses jalan	7	Lokasi	Tersebar	Kemen PUPR
		d. Panjang jalan yang dipreservasi	47.017	Km	Tersebar	Kemen PUPR
2.	Konektivitas Transportasi Kereta Api	Terselenggaranya pengembangan kereta api mendukung kawasan prioritas nasional				
		a. Panjang jalur kereta api lintas utama yang dibangun (termasuk jalur ganda dan reaktivasi)	275	Km	Tersebar	Kemenhub
		b. Panjang jalur kereta api lintas utama yang ditingkatkan	225	Km	Tersebar	Kemenhub
3.	Konektivitas Transportasi Laut	Terselenggaranya pengembangan pelabuhan mendukung kawasan prioritas nasional				
		a. Jumlah pelabuhan hub yang mencapai standar sesuai kriteria <i>Integrated Port Network (IPN)</i>	1	Lokasi	Tanjung Priok	Kemenhub
		b. Jumlah pelabuhan mencapai standar pelayanan operasional	9	Lokasi	Tersebar	Kemenhub
4.	Konektivitas Transportasi Udara	Terselenggaranya pengembangan bandara mendukung kawasan prioritas nasional				
		a. Jumlah bandara baru yang dibangun	7	Lokasi	Tersebar	Kemenhub
		b. Jumlah bandara yang ditingkatkan kapasitasnya	46	Lokasi	Tersebar	Kemenhub
5.	Konektivitas Transportasi Darat	Terselenggaranya pengembangan transportasi darat mendukung kawasan prioritas nasional				
		a. Jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun/dikembangkan	6	Lokasi	Tersebar	Kemenhub
		b. Jumlah terminal tipe A yang dibangun	1	Lokasi	Tersebar	Kemenhub

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

4) Program Prioritas Peningkatan Infrastruktur Perkotaan

Sasaran dan indikator PP Peningkatan Infrastruktur Perkotaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 23. Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Infrastruktur Perkotaan

No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ⁽¹⁾	2018 ⁽¹⁾	2019 ⁽¹⁾	2020 ⁽¹⁾
1.	Meningkatnya layanan angkutan umum					
	Jumlah layanan angkutan umum masal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan	Kota (Kawasan Perkotaan)	4	4	4	7

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

PP Peningkatan Infrastruktur Perkotaan dilaksanakan melalui 7 (tujuh) KP yaitu: (1) Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel; (2) Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan; (3) Infrastruktur Jalan Perkotaan; (4) Penyediaan Akses Air Minum serta Sanitasi Layak dan Aman di Perkotaan; (5) Penyediaan Akses Perumahan serta Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan; (6); Energi Berkelanjutan untuk Perkotaan; dan (7) Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan. Sasaran masing-masing KP dari PP Peningkatan Infrastruktur Perkotaan adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 24. Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Infrastruktur Perkotaan

No.	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
1.	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel	Terselenggaranya pembangunan dan pengembangan serta pelayanan angkutan transportasi perkotaan berbasis rel				
		Jumlah layanan angkutan umum masal perkotaan berbasis rel yang dibangun dan dikembangkan	4	Kota (Kawasan Perkotaan)	Jabodetabek (MRT/LRT dan KA komuter), Palembang (LRT), Yogyakarta-Solo (KA Komuter), Medan (KA Komuter)	Kemenhub
2.	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan	Terselenggaranya pembangunan dan pengembangan serta pelayanan angkutan transportasi perkotaan berbasis jalan				
		a. Jumlah kota dengan layanan full bus rapid transit (BRT)	7	Kota (Kawasan Perkotaan)	Jabodetabek, Medan, Surakarta, Denpasar, Palembang, Yogyakarta, Surabaya	• Kemenhub • Pemda
		b. Jumlah penyediaan bus untuk BRT/semi BRT/ sistem transit	100	Unit	Tersebar	Kemenhub
3.	Infrastruktur Jalan Perkotaan	Terselenggaranya pembangunan dan pengembangan infrastruktur jalan perkotaan				
		Jumlah/ly overdan underpass yang dibangun	7	Lokasi	Tersebar	Kemen PVPR

4.	Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman di Perkotaan	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak dan aman di perkotaan				
		a. Jumlah PDAM dengan layanan Zona Air Minum Prima (ZAMP)	11	Kabupaten/ Kota	7 Wilayah Metropolitan, 3 Wilayah Metropolitan Baru, 4 Kota Baru	• Kamen PUPR • Kamendagri • Pemda
		b. Jumlah PDAM yang menerapkan <i>Smart Grid Water Management</i>	2	PDAM	7 Wilayah Metropolitan, 3 Wilayah Metropolitan Baru, 4 Kota Baru	• Kamen PUPR • Kamendagri • Pemda
		c. Jumlah NSPK terususun terkait air minum dan sanitasi yang terintegrasi (unit)	1	Unit	Pusat	• Kamen PUPR • Kamendagri • Pemda
5.	Penyediaan Akses Perumahan serta Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau di perkotaan				
		Jumlah penyediaan hunian layak di perkotaan melalui fasilitasi pemerintah	10.000	Unit	Wilayah Metropolitan, Kota Besar, Kota Sedang, dan Kota Kecil	Kamen PUPR
6.	Energi Berkelanjutan terutama untuk Perkotaan	Meningkatnya penggunaan energi ramah lingkungan terutama untuk perkotaan				
		a. Jumlah penyiapan Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)	12	Lokasi	Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kota Makassar, Kota Denpasar, Kota Palembang, dan Kota Manado	• Kamen PUPR • Kamen ESDM • Pemerintah Daerah • Badan Usaha
		b. Jumlah pemanfaatan <i>photovoltaik (PV) rooftop</i>	10	Mega Watt peak (MWp)	Tersebar	• Kamen ESDM • Badan Usaha
		c. Jumlah penambahan stasiun pengisian listrik umum (SPLU)	200	Unit	Jabodetabek	• Badan Usaha
7.	Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan	Berkembangnya infrastruktur dan ekosistem TIK untuk pembangunan kota yang lebih baik				
		a. Roadmap dan implementasi SG dalam layanan digital	2	Dokumen	Pusat	Kemenkominfo
		b. Persentase penetrasi <i>fixed broadband</i>	14	Persen	Tersebar	• Kemenkominfo • Kemenpar

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

5) Program Prioritas Transformasi Digital

Sasaran dan indikator PP Transformasi Digital dapat pada tabel berikut.

Tabel 25. Sasaran dan Indikator PP Transformasi Digital

No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ^{a)}	2018 ^{a)}	2019 ^{a)}	2020 ^{a)}
1.	Tersedianya layanan akses infrastruktur TIK					
	Persentase kabupaten/kota yang terlayani <i>broadband</i> khususnya wilayah administrasi dan permukiman	Persen	87	88,5	92	95
2.	Terbangunnya ekosistem dan pemanfaatan TIK					
	Proporsi pengguna internet	Persen	54,7	58	62	72

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

PP Transformasi Digital dilaksanakan melalui 3 (tiga) KP yaitu: (1) Penuntasan Infrastruktur TIK; (2) Pemanfaatan Infrastruktur TIK; dan (3) Fasilitas Pendukung Transformasi Digital. Sasaran masing-masing KP dari PP Transformasi Digital sebagaimana tabel berikut.

Tabel 26. Sasaran dan Indikator KP dari PP Transformasi Digital

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
1.	Penuntasan Infrastruktur TIK	Meratanya infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia				
		a. Jumlah BTS untuk desa <i>blank spot</i>	2.100	Lokasi	Tersebar	Kemenkominfo
		b. Jumlah daerah operasional layanan jaringan serat optik Palapa Ring	57	Kabupaten/ Kota	Tersebar	Kemenkominfo
		c. Penyediaan kapasitas satelit untuk layanan telekomunikasi	31	Gbps	Pusat	Kemenkominfo
		d. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE berbasis <i>cloud</i>	1	Layanan	Pusat	Kemenkominfo

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
		e. Jumlah infrastruktur penyiaran publik radio yang dikembangkan	20	Stasiun	Tersebar	LPP RRI
		f. Jumlah infrastruktur penyiaran publik televisi yang dikembangkan	50	Unit	Tersebar	LPP TVRI
2.	Pemanfaatan Infrastruktur TIK	Meningkatnya pemanfaatan akses telekomunikasi dan internet di seluruh wilayah Indonesia, baik daerah komersil maupun nonkomersil				
		a. Jumlah penyediaan akses internet untuk sekolah, puskesmas, kantor pemerintah, dll.	5.950	Lokasi	Tersebar	Kemenkominfo
		b. Jumlah <i>start up</i> digital	50	<i>Start up</i> aktif	Pusat	Kemenkominfo
		c. Jumlah nelayan, petani dan UMKM online yang menjadi pengguna aktif	105.000	Orang	Tersebar	Kemenkominfo
3.	Fasilitas Pendukung Transformasi Digital	Meningkatnya literasi TIK masyarakat				
		a. Jumlah orang yang mendapatkan peningkatan literasi digital	35.000	Orang	Tersebar	Kemenkominfo
		b. Persentase penyelenggaraan sertifikasi elektronik	100	Persen	Pusat	Kemenkominfo
		c. Jumlah situs/konten yang bersifat negatif yang terblokir	150.000	Situs terblokir	Pusat	Kemenkominfo

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

c) Prioritas Nasional Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja

Prioritas Nasional (PN) Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja dilaksanakan untuk meningkatkan nilai tambah, investasi, ekspor, komponen dalam negeri dan lapangan kerja pada sektor unggulan pertanian,

kemaritiman, industri, pariwisata dan ekonomi kreatif/digital. Untuk mencapai sasaran tersebut, beberapa permasalahan dan tantangan yang perlu ditangani pada tahun 2020 yaitu masih terbatasnya kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), lambatnya transformasi struktural, rendahnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing, tingginya defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi, dan belum terbangunnya ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sasaran PN Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja tahun 2020 meliputi 12 (dua belas) indikator sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 27. Sasaran dan Indikator PN Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja

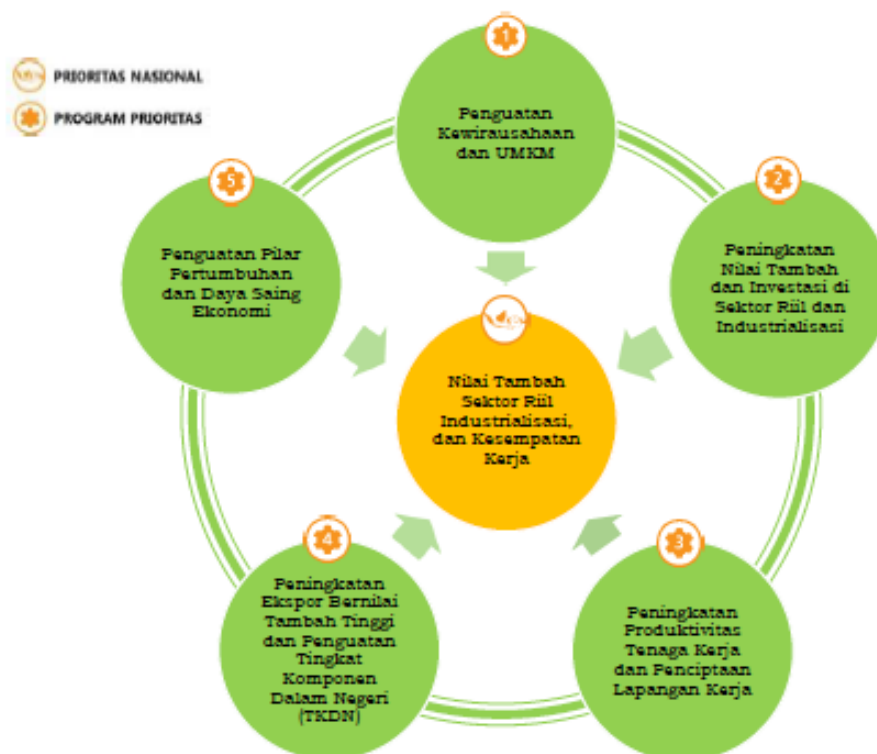
No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ^{a)}	2018 ^{a)}	2019 ^{a)}	2020 ^{a)}
Meningkatnya nilai tambah, investasi, ekspor, komponen dalam negeri dan lapangan kerja pada sektor unggulan pertanian, kemaritiman, industri, pariwisata dan ekonomi kreatif/digital						
1.	Pertumbuhan PDB Pertanian	Persen	3,8	3,9	3,8	3,8
2.	Kontribusi PDB Kemaritiman	Persen	N/A	N/A	6,20 - 6,30	6,50
3.	Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan	Persen	4,3	4,3	5,1	4,90 - 5,40
4.	Nilai Devisa Pariwisata	Miliar USD	15,2	17,0	20,0	19,0 - 21,0
5.	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Triliun Rupiah	1.009	1.105	1.211	1.305 - 1.307
6.	Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa	Persen	8,9	6,5	6,3	4,69 - 6,65
7.	Pertumbuhan Investasi (PMTB)	Persen	6,2	6,7	7,0	6,9 - 7,3
8.	Penyediaan Lapangan Kerja	Juta Orang	2,6	2,98	2,6 - 2,9	2,7 - 3,0
9.	Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja	Persen	2,8	2,6	4,0 - 5,0	3,0 - 4,0 ^{a)}
10.	Rasio Kewirausahaan Nasional	Persen	3,38	3,49	3,57	3,64
11.	Produk dengan TKDN > 25%	Produk	4.300	4.900	5.500	6.000
12.	Kontribusi Ekonomi Digital	Persen	N/A	N/A	N/A	3,17 ^{b)}

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

PN Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja akan dilakukan melalui 5 Program Prioritas (PP) yaitu: (1) Penguatan Kewirausahaan dan UMKM; (2) Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi; (3) Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja; (4) Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen

Dalam Negeri (TKDN); dan (5) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi.

Gambar 6. Kerangka PN Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

1) Program Prioritas Penguatan Kewirausahaan dan UMKM

Sasaran dan indikator PP Penguatan Kewirausahaan dan UMKM dapat pada tabel berikut.

Tabel 28. Sasaran dan Indikator PP Penguatan Kewirausahaan dan UMKM

No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ⁽¹⁾	2018 ⁽¹⁾	2019 ⁽¹⁾	2020 ⁽¹⁾
Meningkatnya kualitas tata kelola pengelolaan kewirausahaan dan UMKM						
1.	Rasio Wirausaha Berbasis Peluang	Persen	9,35	9,49	10,08	10,30
2.	Rasio Kredit UMKM terhadap Total Kredit Perbankan	Persen	19,71	19,27	19,50	19,75
3.	Proporsi Nilai Penyaluran Pinjaman Perbankan kepada IKM	Persen	2,06	1,95	2,06	2,40

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

PP Penguatan Kewirausahaan dan UMKM akan dilakukan melalui 4 KP yaitu: (1) Peningkatan Kemitraan Usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar; (2) Peningkatan Akses Pembiayaan bagi Wirausaha; (3) Peningkatan Kapasitas, Jangkauan, dan Inovasi Koperasi; dan (4) Peningkatan Penciptaan Peluang Usaha. Sasaran masing-masing KP dari PP Penguatan Kewirausahaan dan UMKM seperti pada tabel berikut.

Tabel 29. Sasaran dan Indikator KP dari PP Penguatan Kewirausahaan dan UMKM

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Unit	Lokasi	K/L Pelaksana
1.	Peningkatan Kemitraan Usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar	Meningkatnya jumlah Usaha Mikro Kecil (UMK) yang bermitra dengan usaha menengah dan usaha besar				
		Jumlah UMK/kelompok yang ditingkatkan kapasitas usahanya	2.130	UMK/ Kelompok	Pusat	• Kemenkop UKM • Kemendag • KPPU
		Jumlah UMK/kelompok yang difasilitasi untuk bermitra	225	UMK/ Kelompok	Pusat	
2.	Peningkatan Akses Pembiayaan bagi Wirausaha	Meningkatnya jumlah wirausaha dan UMKM yang mengakses kredit di lembaga keuangan formal				
		Jumlah UMKM yang didampingi untuk mengakses kredit perbankan	3.000	UMKM	Pusat	• Kemenkop UKM • Bekraf
		Jumlah wirausaha dan UMKM yang mendapat bantuan permodalan	1.900	Orang	Pusat	
3.	Peningkatan Kapasitas, Jangkauan, dan Inovasi Koperasi	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapasitas usaha koperasi				
		Jumlah pengurus dan manajer koperasi yang ditingkatkan kapasitasnya	5.050	Orang	Pusat	• Kemenkop UKM
		Jumlah kelompok yang didampingi untuk membentuk koperasi	500	Kelompok	Pusat	

4.	Peningkatan Penciptaan Peluang Usaha	Meningkatnya akses terhadap informasi dan fasilitasi peluang usaha bagi wirausaha dan UMKM				
		Jumlah wirausaha yang mendapatkan pelatihan	57.700	Orang	Pusat	• Kemenkop UKM • Kemenperin • Kementan • Kemenristekdikti • Kemenkominfo • Kemnaker • Kemenpora • Kemendag • Bekraf • Kemendes PDTT
		Jumlah wirausaha yang ide usahanya difasilitasi melalui pendampingan atau inkubasi	17.250	Orang	Pusat	
		Jumlah pelaku usaha yang ditingkatkan kapasitasnya	12.380	UMKM	Pusat	
		Jumlah sentra IKM yang difasilitasi	65	Sentra IKM	Pusat	
		Jumlah BUM Desa Bersama yang ditingkatkan kapasitas dan sarana serta permodalannya	60	BUMDes Bersama	Desa	
		Jumlah UMKM Go Online	100.000	UMKM	Pusat	

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019.

2) Program Prioritas Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrilisasi

Sasaran dan indikator PP Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrilisasi dapat pada tabel berikut.

Tabel 30. Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrilisasi

No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ^{a)}	2018 ^{a)}	2019 ^{a)}	2020 ^{a)}
Meningkatnya nilai tambah dan investasi sektor pertanian, kemaritiman, industri, pariwisata, ekonomi kreatif, dan digital						
1.	Pertumbuhan PDB industri pengolahan non-migas	Persen	4,85	4,77	5,33	5,48 – 6,01
2.	Pertumbuhan PDB pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	Persen	3,57	3,68	3,06	3,10
3.	Pertumbuhan PDB kehutanan	Persen	2,08	2,76	2,70 – 2,90	2,70 – 2,90
4.	Pertumbuhan PDB perikanan	Persen	5,71	5,20	7,20	7,90 – 8,50

5.	Kontribusi PDB industri pengolahan	Persen	20,16	19,86	19,83	19,78 – 19,80 ^{a)}
6.	Kontribusi PDB pariwisata	Persen	4,52	4,70 ^{b)}	4,80 ^{b)}	4,8
7.	Destinasi Pariwisata Prioritas yang dipercepat pembangunannya	Destinasi	N/A	N/A	N/A	4
8.	Destinasi wisata alam berkelanjutan berbasis taman nasional	Klaster	N/A	N/A	N/A	10
9.	Kontribusi PDB ekonomi kreatif	Persen	7,40	7,40 ^{**)}	7,40	7,60
10.	Pertumbuhan PDB sektor informasi dan telekomunikasi	Persen	9,63	7,04	7,10	7,12 – 7,54
11.	Target realisasi investasi PMA dan PMDN	Triliun Rupiah	692,8	721,3	833,0 – 870,0	875,1 – 890,3
12.	Kontribusi realisasi PMA dan PMDN sektor manufaktur	Persen	39,6	30,8	33,2 ^{***)}	36,2
13.	Peringkat kemudahan berusaha di Indonesia	EoDB	91	72	73	Menuju 40

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

PP Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi akan dilaksanakan melalui 8 KP, yaitu: (1) Peningkatan Industri Berbasis Pertanian Terintegrasi Hulu-Hilir; (2) Peningkatan Industri Berbasis Kemaritiman yang Terintegrasi Hulu-Hilir; (3) Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Industri Non-Agro yang Didukung Sistem Bisnis Terintegrasi Hulu-Hilir; (4) Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok; (5) Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kreatif dan Digital; (6) Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi; (7) Peningkatan Hilirisasi Sumber Daya Alam, Termasuk Melalui Pengembangan Smelter dan Kawasan Industri Terutama di Luar Jawa; dan (8) Pengembangan Industri Halal. Sasaran masing-masing KP dari PP Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi seperti pada tabel berikut.

Tabel 31. Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
1.	Peningkatan Industri Berbasis Pertanian Terintegrasi Hulu-Hilir	Meningkatnya produksi komoditas tanaman industri				
		Peningkatan produksi kakao	0,3	Persen	36 Lokasi	• Kementan

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
		Peningkatan produksi kopi	0,9	Persen	67 Lokasi	• Kamen BUMN • Kamenperin
		Peningkatan produksi karet	0,6	Persen	34 Lokasi	• BKPM • Kamendes PDPT
		Peningkatan produksi kelapa dalam	0,4	Persen	76 Lokasi	• Pemda • BUMN Perkebunan
		Peningkatan produksi kelapa sawit	7,1	Persen	5 Provinsi	• Pertamina
		Peningkatan produksi lada	2,0	Persen	114 Lokasi	
		Peningkatan produksi pala	2,7	Persen	114 Lokasi	
		Peningkatan produksi cengkeh	3,0	Persen	114 Lokasi	
		Meningkatnya produksi komoditas hortikultura				
		Peningkatan produksi buah-buahan	2,7	Persen	33 Provinsi	• Kementan • Kamen BUMN • Kamendes PDPT
		Peningkatan produksi sayuran	2,4	Persen	33 Provinsi	• Pemda • BUMN
		Peningkatan produksi florikultura	3,5	Persen	8 Lokasi	
		Meningkatnya industri fitofarmaka dan jamu				
		Peningkatan produksi fitofarmaka	3,5	Persen	3 Provinsi	• Kementan • BPOM • Kemenko
		Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan terapan koordinatif jamu	5	Rekomendasi	Pusat	• Paralekonomian • Kamenperin • Kamendes PDPT • Pemda • Kemenkes • LIPI
2.	Peningkatan Industri Berbasis Kemeritiman yang Terintegrasi Hulu-Hilir	Meningkatnya industri berbasis kemeritiman yang terintegrasi hulu-hilir				
		Jumlah rumusan strategi penguatan dan pembinaan industri galangan kapal	1	Rumusan Strategi	Pusat	• Kamenperin • Kamen BUMN • Kamenhub • KKP
		Jumlah pembangunan/ peningkatan pelabuhan perikanan (UPT Pusat)	22	Unit	22 Lokasi	• Kamenper • Kamen ESDM • BKPM • Kamendes PDPT • Pemda

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
		Jumlah pembangunan/ revitalisasi prasarana logistik perikanan, termasuk cold storage	10	Unit	8 lokasi	• BUMN
		Jumlah sarana rantai dingin dan pengolahan hasil kelautan dan perikanan	300	Unit	15 Provinsi	
		Industrialisasi Komoditas Utama Perikanan Laut, mencakup :				
		• Pertumbuhan produksi tuna	1	Persen	3 Provinsi	
		• Pertumbuhan produksi udang	7	Persen	5 Provinsi	
		• Pertumbuhan produksi rumput laut	2	Persen	5 Provinsi	
		• Pertumbuhan produksi rajungan	1	Persen	2 Provinsi	
3.	Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Industri Non-Agro yang Didukung Sistem Bisnis Terintegrasi Hulu-Hilir	Meningkatnya nilai tambah dan investasi di subsektor industri kimia, logam, dan otomotif				
		Jumlah perusahaan yang direstrukturisasi	25	Perusahaan	Pusat	• Kemenperin • Kemendag • BKPM • Kemenko Perekonomian • Kementan • Pemda • BUMN
		Rekomendasi kebijakan dalam rangka mendorong iklim investasi industri	2	Rekomendasi	Pusat	
		Penyusunan profil investasi	3	Paket	Pusat	
4.	Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	Meningkatnya kesiapan destinasi dan daya saing industri pariwisata				

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
		Jumlah destinasi pariwisata yang difasilitasi penyusunan dokumen pengembangan pariwisata terpadu	5	Destinasi	1. Jatim 2. NTT 3. Sultra 4. Sulsel 5. Papua Barat	• Kemenper • KLHK • KKP • Kemen KUKM • Kamendes PDTT • Kemen PUPR • Kemenhub
		Jumlah destinasi pariwisata, termasuk dalam bentuk KEK, yang difasilitasi pembangunan infrastruktur di luar kawasan	10	Destinasi	1. Sumut 2. Bangka Belitung 3. DKI Jakarta 4. Banten-Jabar 5. DIY - Jateng 6. Jatim 7. NTB 8. NTT 9. Sultra 10. Maluku Utara	• Kemen ESDM • BKPM • Kemen BUMN • Pemda • BUMN
		Jumlah lokasi urban heritage regeneration yang difasilitasi pengembangan atraksi berbasis heritage/ekonomi kreatif	5	Lokasi	1. Sumut 2. DIY 3. Jateng (2) 4. NTB	
		Jumlah diversifikasi produk perjalanan pariwisata alam dan budaya	12	Dokumen	1. NTT 2. NTB 3. Sulut 4. Sulteng 5. Gorontalo	
		Jumlah pengembangan wisata bahari	5	Lokasi	1. NTB 2. NTT 3. Sulsel 4. Sulut 5. Papua Barat	
		Geopark yang difasilitasi	8	Lokasi	1. NTB 2. Jabar 3. DIY 4. Sumut 5. Bali 6. Babel 7. Sulsel 8. Kepri	
		Revitalisasi destinasi pariwisata	1	Lokasi	Bali	

No.	Registan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
5.	Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kreatif dan Digital	Meningkatnya nilai tambah produk kreatif dan digital				
		Jumlah pelaku/usaha kreatif di sektor unggulan (kuliner, fashion dan kriya) dan sektor prioritas (film, aplikasi digital dan musik) yang mengakses akses skema insentif inovasi, pengembangan usaha, komersialisasi HKI, infrastruktur, dan inkubasi	40.375	Orang/ Usaha	Pusat	• Belkraf • KemenKominfo • KemenHukham • Kemenperin • Kamendikbud • Kemenlu • Pemda
		Jumlah pendaftaran hak cipta dan paten produk ekonomi kreatif	2.500	Orang	Pusat	
		Jumlah kabupaten/kota kreatif yang dikembangkan	4	Kab/Kota	1. Jatim 2. Jaber 3. Sumsel 4. Kaltim	
		Jumlah klaster kreatif yang dikembangkan	8	Lokasi	1. Sumut 2. Jaber 3. Banten 4. DKI Jakarta 5. DIY 6. Jateng 7. Jatim 8. Sulsel 9. Bali	
6.	Perbaikan Idim Usaha dan Peningkatan Investasi	Meningkatnya peringkat kemudahan berusaha dan realisasi investasi FMA dan PMDN				
		Jumlah perangkat DPMPUSP yang mengikuti dilidat teknis OSS	1.000	Orang	34 Provinsi	• Kemenko Perekonomian • BKPM • Kemenkeu • Pemda
		Jumlah sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang terstandarisasi	100	Prov/Kab/ Kota	34 Provinsi	

No.	Registan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
		Jumlah implementasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100	Kab/Kota	34 Provinsi	
		Strategi kebijakan EoDB dan Peningkatan Daya Saing Nasional	1	Strategi Kebijakan	Pusat	
		Rekomendasi kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha	1	Paket Kebijakan	Pusat	
		Jumlah peta potensi dan peluang investasi daerah	15	Peta Potensi Daerah	1. Aceh 2. Jatim 3. Kepri 4. Lampung 5. Jateng 6. DIY 7. Bali 8. Kaltim 9. Sulsel 10. Gorontalo 11. Sumbar 12. NTB 13. Sulteng 14. Sulsel 15. Sulut	
		Jumlah pemutakhiran data potensi investasi daerah	34	Provinsi	34 Provinsi	
		Jumlah fasilitasi penyelesaian masalah investasi wilayah I, II, III, dan IV	133	Perusahaan	34 Provinsi	
		Meningkatnya peringkat daya saing pilar pasar kerja dalam global competitiveness index				
		Peringkat daya saing pilar pasar kerja Indonesia	75	Peringkat	Pusat	• Kemnaker • Pemda
		Jumlah pelaku hubungan industrial yang mendapat pelatihan teknik negosiasi	3.000	Orang	Pusat	
		Jumlah perusahaan di kawasan industri yang menerapkan norma ketenagakerjaan bidang waktu kerja, waktu istirahat, dan pengupahan	4.000	Perusahaan	Pusat	

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
7.	Peningkatan Hilirisasi Sumber Daya Alam, Termasuk Melalui Pengembangan Smelter dan Kawasan Industri Terutama di Luar Jawa	Meningkatnya jumlah kawasan industri yang beroperasi				
		Jumlah kawasan industri yang difasilitasi pemerintah	5	Kawasan Industri	1. Maluku Utara 2. Kalbar 3. Kep. Riau 4. Sumut 5. Papua Barat	• Kemenko Perekonomian • Kemenkeu • Kemen ATR/BPN • KLHK • Kemendikbud
		Jumlah KEK industri yang difasilitasi pemerintah	8	KEK	1. Aceh 2. Sumut 3. Kaltim 4. Sulut 5. Sumsel 6. Papua Barat 7. Kepri 8. Sulteng	• Kemenristekdikti • KKP • BKPM • BUMN • Pemda
		Jumlah smelter yang dibangun	3	Smelter	1. Sultra (2) 2. Bengkulu	
8.	Pengembangan Industri Halal	Berkembangnya industri halal				
		Jumlah kawasan industri halal	2	Kawasan	1. DKI Jakarta 2. Banten	• Kemenperin • Kemendag • Kemen PPN/Bappenas • Kemenlu
		Jumlah daerah tertib ukur	10	Daerah Tertib Ukur	Pusat	
		Jumlah pengawasan kemetrolagian	15.000	Unit	Pusat	
		Declaration on Halal Industry	1	Dokumen	DKI Jakarta	

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

3) Program Prioritas Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja

Sasaran dan indikator PP Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja terdapat pada tabel berikut.

Tabel 32. Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja

No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ^{a)}	2018 ^{a)}	2019 ^{a)}	2020 ^{a)}
Meningkatnya produktivitas dan penciptaan lapangan kerja						
1.	Proporsi Pekerja Berkeahlian Menengah dan Tinggi	Persen	38,81	39,57	41,00	43,00
2.	Proporsi Angkatan Kerja Berpendidikan Menengah Ke Atas	Persen	41,17	42,54	43,00	45,00
3.	Jumlah Lulusan Pendidikan Vokasi	Orang	N/A ^{a)}	N/A ^{a)}	N/A ^{a)}	1.890.345
4.	Jumlah Lulusan Pelatihan Vokasi	Orang	864.992 ^{b)}	915.671 ^{b)}	1.400.000	2.000.000
5.	Jumlah Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikat Kompetensi	Orang	472.000	615.388 ^{c)}	1.000.000 ^{d)}	2.000.000
6.	Jumlah Tenaga Kerja Industri	Juta Orang	17,5	18,3	N/A	19,7
7.	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata	Juta Orang	12,6	12,6 ^{e)}	13,0 ^{e)}	13,0
8.	Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif	Juta Orang	17,4	17,9 ^{f)}	18,4 ^{f)}	19,0

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

PP Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja dilaksanakan melalui 4 KP, yaitu: (1) Peningkatan Peran dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan Dunia Usaha; (2) Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; (3) Peningkatan Sertifikasi Kompetensi; dan (4) Peningkatan Tata Kelola Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. Sasaran masing-masing KP dari PP Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja seperti pada tabel berikut.

Tabel 33. Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Unit	Lokasi	K/L Pelaksana
1.	Peningkatan Peran dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan Dunia Usaha	Meningkatnya kualitas dan relevansi standar kompetensi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan vokasi				
		Jumlah peta kompetensi sektor/subsektor yang disusun bersama dengan dunia usaha	20	Sektor/ Sub Sektor	Pusat	• Kemnaker • Kemenperin • Kemendikbud • Kemenpar • Kemenkominfo

No.	Registan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Unit	Lokasi	K/L Pelaksana
		Jumlah SKKNI berbasis okupasi dan KKN yang disusun	250	SKKNI	Pusat	• Kemen PUPR • Kemen ESDM • Kemenhub • Kemenristekdikti
		Jumlah sekolah vokasi yang bermitra dengan dunia usaha	809	Sekolah Vokasi	34 Provinsi	• KADIN • Asosiasi Pengusaha/ Industri/Profesi
		Jumlah perusahaan/ industri yang menjalin kerjasama dengan lembaga pelatihan	90	Perusahaan	34 Provinsi	
		Jumlah perusahaan yang bermitra dalam pengembangan vokasi	500	Perusahaan	34 Provinsi	
		Terbentuknya forum kerja sama pendidikan dan pelatihan vokasi antara pemerintah, lembaga dildat dan dunia usaha				
		Jumlah pusat pengembangan keahlian/Skill Development Center (SDC) yang terbentuk	20	Lokasi	20 Wilayah	• Kemnaker • Kemenperin • Kemendikbud • Pemda
		Jumlah tenaga kerja dan calon tenaga kerja yang bekerja dengan fasilitas SDC	20.000	Orang	20 Wilayah	
		Terwujudnya pelayanan informasi pasar kerja yang berkualitas, komprehensif, mutakhir, dan mudah dijangkau masyarakat				
		Jumlah tenaga kerja dan calon tenaga kerja yang mendapat pekerjaan atau membuka usaha dengan fasilitas pusat pelayanan informasi pasar kerja	2.000.000	Orang	34 Provinsi	• Kemnaker • Kemenperin • Kemendikbud • Kemenper • Kemenkominfo • Kemen PUPR • Kemen ESDM • Kemenhub • Kemenristekdikti
2.	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Meningkatnya tenaga kerja keluaran lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi yang mampu langsung bekerja				

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

4) Program Prioritas Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Sasaran dan indikator PP Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terdapat pada tabel.

Tabel 34. Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ^{a)}	2018 ^{a)}	2019 ^{a)}	2020 ^{a)}
Meningkatnya ekspor terutama yang bernilai tambah tinggi						
1.	Pertumbuhan ekspor nonmigas	Persen	16,54	6,39	7,00 - 9,00	6,88 - 9,24
2.	Pertumbuhan ekspor pertanian	Persen	23,64	4,92	7,96	10
3.	Nilai ekspor produk perikanan	Miliar USD	4,45	4,86	9,54	6,1 ^{b)}
4.	Kontribusi ekspor produk industri	Persen	44,97	46,10	55,00 - 65,00	49,00 - 50,00 ^{a)}
5.	Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi	Persen	10,87	10,68	10,80	10,80 - 11,00
6.	Nilai ekspor ekonomi kreatif	Miliar USD	20,50 ^{**)}	21,00 ^{**)}	21,50	21,50 - 22,60
7.	Jumlah wisatawan nusantara	Juta Perjalanan	277	303,4 ^{b)}	308	312
8.	Jumlah wisatawan mancanegara	Juta Orang	14,04	15,81	17,50 ^{c)}	18,50
9.	Rasio ekspor jasa terhadap PDB	Persen	2,49	2,68	2,60	2,79 - 3,11

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

PP Peningkatan Ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dilaksanakan melalui 7 KP, yaitu: (1) Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa; (2) Peningkatan Akses dan Pendalaman Pasar Ekspor; (3) Peningkatan Efektivitas Free Trade Agreement (FTA) dan Diplomasi Ekonomi; (4) Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global (Investasi Inbound Dan Outbound); (5) Pengelolaan Impor; (6) Peningkatan Pengadaan Pemerintah yang Menggunakan Produk Dalam Negeri; dan (7) Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Pariwisata dan Produk Kreatif.

Sasaran masing-masing KP dari PP Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) seperti pada tabel berikut.

Tabel 35. Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

No.	Registan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Unit	Lokasi	K/L Pelaksana
1.	Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa	Meningkatnya produk ekspor dan jasa				
		Jumlah produk baru yang diekspor	454	Produk	Pusat	• Kemendag • Kementan
		Jumlah Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan negara tujuan ekspor untuk sektor prioritas	2	MOU	Pusat	• Kemenkop UKM • BSN • Kemenperin • KLHK
		Rasio ekspor produk hilir CPO (dari sisi volume)	75,0	Persen	Pusat	• KKP • Kementan
2.	Peningkatan Akses dan Pendalaman Pasar Ekspor	Meningkatnya pasar tujuan ekspor				
		Jumlah negara tujuan ekspor	219	Negara	Pusat	• Kemendag • Kemenkop UKM
		Share ekspor produk Indonesia di kawasan Afrika, Amerika Latin, dan Eropa Timur	0,8	Persen	Pusat	• Kemenlu • Kemenkeu • Kemenperin
		Share ekspor produk Indonesia di pasar tradisional	3,00	Persen	Pusat	• Belkraf
3.	Peningkatan Efektivitas Free Trade Agreement (FTA) dan Diplomasi Ekonomi	Mempercepat penyelesaian perundingan dan peningkatan pemanfaatan implementasi FTA				
		Jumlah perundingan FTA yang diselesaikan	5	FTA	Pusat	• Kemendag • BICPM
		Jumlah promosi terintegrasi	8	Kegiatan Promosi Terintegrasi	Pusat	• Kemenlu • Kemenperin
		Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia	90	Negara	Pusat	• KKP • Kementan • Kemenper • Kementan • Kementan
		Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia	70	Negara	Pusat	• KKP • Kementan • Kementan • Kementan • Kementan

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Unit	Lokasi	K/L Pelaksana
4.	Peningkatan Partisipasi Dalam Jaringan Produksi Global (Investasi Inbound dan Outbound)	Meningkatnya partisipasi dalam jaringan produksi global (investasi inbound dan outbound)				
		Peluang investasi sektoral dan perwilayahan	5	Lot Investasi	Pusat	• Kemenperin • Kemendag • BKPM • Kemenkeu • Kemenlu
5.	Pengelolaan Impor	Meningkatnya efektivitas kebijakan pengelolaan impor				
		Pertumbuhan impor barang konsumsi	9,2	Persen	Pusat	• Kemendag • Kemenkeu • Kemenperin • Kemenper
		Rasio impor bahan baku pendukung terhadap ekspor	77,60 - 78,80	Persen	Pusat	
		Rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan	8,00	Poin	Pusat	
		Penerbitan sertifikat TKDN baru	1.000	Sertifikat	Pusat	
6.	Peningkatan Pengadaan Pemerintah yang Menggunakan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya pengadaan pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri				
		Jumlah produk dalam negeri yang tersedia di e-katalog	125.000	Produk	Pusat	• LKPP • Kemenperin • Pemda
		Pertumbuhan jumlah produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintahan	5	Persen	Pusat	
		Jumlah kontrak katalog lokal/sektoral	20	Katalog	Pusat	
7.	Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Pariwisata dan Produk Kreatif	Meningkatnya citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata dan produk kreatif				
		Jumlah produk kreatif yang difasilitasi promosi dalam roadshow/pameran/ platform e-commerce di dalam dan luar negeri	271	Produk/ Brand	Pusat	• Bakraf • Kemenper • Kemenlu • Kemenkominfo • Kemendag
		Jumlah platform e-commerce produk kreatif yang berorientasi ekspor	1	Platform	Pusat	

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Unit	Lokasi	K/L Pelaksana
		Jumlah pameran wisata 10 DPP dan 10 Destinasi Branding	24	Pameran	Pusat	
		Jumlah misi penjualan 10 DPP dan 10 Destinasi Branding	37	Misi Penjualan	Pusat	
		Perjalanan Wisata Pengenalan di 10 Destinasi Branding dan 10 Destinasi Prioritas	1.415	Orang	Pusat	

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

5) Program Prioritas Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi

Sasaran dan indikator PP Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi terdapat pada tabel berikut.

Tabel 36. Sasaran dan Indikator PP Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi

No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ^{a)}	2018 ^{a)}	2019 ^{a,b)}	2020 ^{a,b)}
Meningkatnya ketahanan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi						
1.	Kontribusi Sektor Jasa Keuangan/PDB	Persen	4,20	4,15	4,19	4,22-4,23
2.	Skor <i>Logistic Performance Index</i> ^{a)}	Nilai	N/A	3,15	3,15	3,2
3.	Biaya Logistik terhadap PDB ^{b)}	Persen	23,1	23,0	22	21
4.	Peringkat <i>Travel and Tourism Competitiveness Index</i> (TTCI)	Peringkat	42	42 ^{c)}	40	40 ^{c)}

Sumber: Kementerian Pariwisata; LPI World Bank; Cetak Biru Sislognas.

PP Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi dilaksanakan melalui 6 KP, yaitu: (1) Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan; (2) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industry 4.0; (3) Penguatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga; (4) Peningkatan Pengembangan Industri dan Pariwisata yang Berkelanjutan; (5) Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital; dan (6) Reformasi Fiskal. Sasaran masing-masing KP dari PP Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi seperti pada tabel berikut.

Tabel 37. Sasaran dan Indikator PP Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
1.	Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan	Meningkatnya pendalaman sektor keuangan				
		Rasio M2/PDB	40,1 - 40,9	Persen	Pusat	• Kemenko Perekonomian • Kemendagri • Kemenkeu
		Jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa	55,84	Unit	Pusat	
		Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa	15,89	Unit	Pusat	
2.	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industry 4.0	Berkembangnya teknologi digital untuk meningkatkan transformasi ekonomi dan efisiensi pelayanan				
		Jumlah pelaku kreatif yang difasilitasi infrastruktur TIK	8.500	Orang	Pusat	• Kemenperin • Bakraf • Kemenkominfo • Kemenpar
		Kampanye Global Making Indonesia 4.0	1	Kegiatan	Pusat	
		Pilot Project Learning Factory 4.0	1	Unit	Pusat	
3.	Penguatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga	Menurunnya biaya logistik dan tercapainya stabilitas harga				
		Koefisien variasi harga antar wilayah	13,0	Persen	Pusat	• Kemendag • Kemenhub • Kemen PUPR • Kemenko Perekonomian • Kemendagri • Pemda
		Jumlah sistem distribusi dan logistik yang memanfaatkan TIK	1	Pusat Distribusi	Pusat	
		Jumlah pelaku jasa logistik yang memiliki sertifikasi profesi	5.000	Pelaku Jasa Logistik Tersertifikasi	Pusat	
		Tingkat inflasi	3±1	Persen	Pusat	
4.	Peningkatan Pengembangan Industri dan Pariwisata yang Berkelanjutan	Meningkatnya pengembangan industri dan pariwisata yang berkelanjutan				
		Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	2.845	Perusahaan	Pusat	• Kemenpar • Kemenperin • BSN

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
		Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development (STDew)	10	Destinasi	1. Sumut 2. Kepri 3. DKI Jakarta 4. Jabar 5. DIY 6. Jateng 7. Jatim 8. Bali 9. NTB 10.Sulsel-Sulut-Sultra-Papua Barat	
5.	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan data serta informasi perkembangan ekonomi, terutama pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital				
		Data statistik ekonomi kreatif yang sesuai standar	2	Database	Pusat	• BPS • Bekraf
		Data statistik pariwisata yang sesuai standar	3	Database	Pusat	
		Data statistik e-commerce yang sesuai standar	1	Database	Pusat	
6.	Reformasi Fiskal	Terlaksananya reformasi fiskal				
		Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system)	13,8	Persen	Pusat	• Kemenkeu

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

d) Prioritas Nasional Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup

PN Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup dilaksanakan untuk menyediakan pangan, air, energi, serta pelestarian lingkungan hidup yang berguna untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mendorong sektor-sektor ekonomi produktif di dalam negeri. Ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup dilaksanakan untuk mencapai kemandirian, keadilan, dan keberlanjutan pembangunan. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi pada tahun 2020 terkait PN Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup adalah: (1) stagnasi produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan, keterjangkauan dan konsumsi pangan yang aman, berkualitas dan bernutrisi; (2) penurunan kuantitas, kualitas, dan aksesibilitas air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan industri; (3) rendahnya pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT); (4) penurunan daya dukung, daya tampung serta peningkatan dampak dan bahaya perubahan iklim; serta (5) meningkatnya kejadian bencana geologi dan hidrometeorologi akibat perubahan iklim yang menimbulkan kerugian fisik, sosial dan ekonomi serta upaya pembangunan berketahanan bencana masih belum optimal.

Sasaran dan indikator PN Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup terdapat pada tabel berikut.

Tabel 38. Sasaran dan Indikator PN Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup

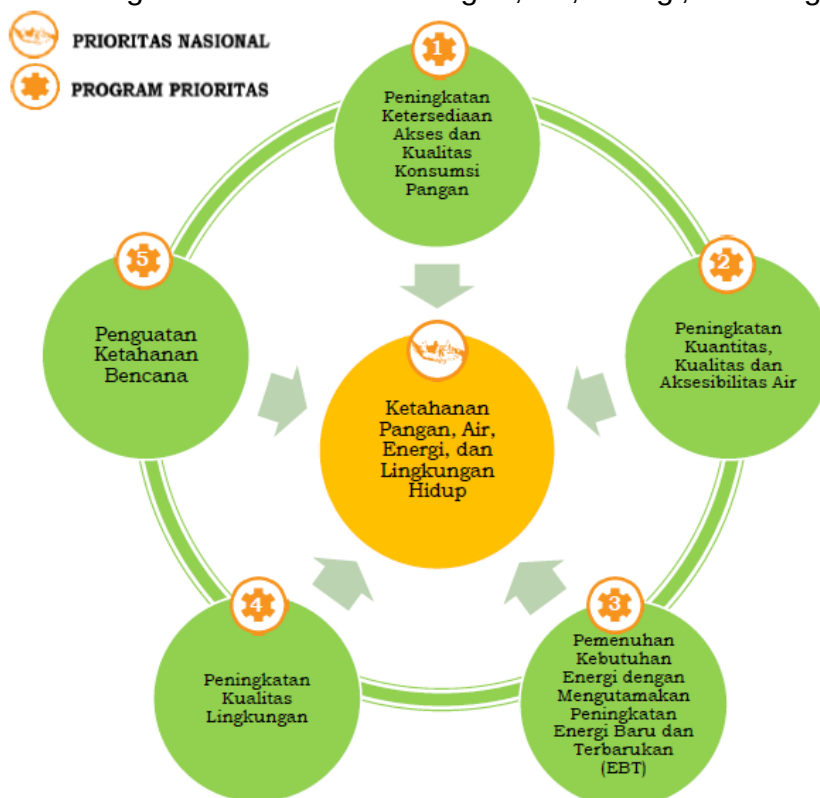
No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017 ⁽¹⁾	2018 ⁽¹⁾	2019 ⁽¹⁾	2020 ⁽¹⁾
1.	Mencukupi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat					
	a. Pola Pangan Harapan	Nilai	88,0	90,5	92,5	93,3
	b. Konsumsi Kalori	Kkal/Kapita/Hari	2.115	2.113	2.150	2.100
	c. Konsumsi Protein	Gram/Kapita/Hari	61,45	62,19	57	57
	d. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment/PoU</i>)	Nilai	N/A	N/A	N/A	6,4
	e. Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (<i>Food Insecurity Experience Scale/FIES</i>)	Nilai	N/A	N/A	N/A	5,21
2.	Meningkatnya kualitas, kuantitas dan aksesibilitas sumber daya air untuk kebutuhan masyarakat dan perekonomian					
	a. Luas tutupan hutan dengan indeks jasa ekosistem tinggi	Juta hektare	N/A	N/A	N/A	65
	b. Kapasitas tampungan air	Miliar m ³	11,62	11,36	12,37	12,71
	c. Koefisien limpasan	Nilai	N/A	N/A	N/A	0,4
3.	Terpenuhinya kebutuhan energi nasional					
	Pemenuhan Kebutuhan Energi Nasional	MTOE	162,5	171,5	181,5	192
4.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup					

No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017 ⁽¹⁾	2018 ⁽¹⁾	2019 ⁽²⁾	2020 ⁽²⁾
	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	66,46*	65,14*	66,5 - 68,5**	73,00 - 74,50**
	b. Luas kawasan konservasi perairan	Juta ha	19,14	20,80	21,50	22,27
5.	Menurunkan Indeks Resiko Bencana Indonesia					
	Indeks Resiko Bencana Indonesia	Nilai	150,6	148,8	146,3	146,3

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, maka perlu dilaksanakan Program Prioritas (PP) untuk mencapai sasaran PN Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup. Program Prioritas dalam PN Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup antara lain: (1) Peningkatan Ketersediaan Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan; (2) Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air; (3) Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT); (4) Peningkatan Kualitas Lingkungan; serta (5) Penguatan Ketahanan Bencana.

Gambar 7. Kerangka PN Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

1) Program Prioritas Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan

Sasaran dan indikator PP Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan terdapat pada tabel berikut.

Tabel 39. Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan

No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017 ⁽¹⁾	2018 ⁽²⁾	2019 ⁽³⁾	2020 ⁽⁴⁾
1.	Meningkatnya produksi pangan					
	a. Persentase Pertumbuhan produksi padi	Persen	5,4	2	4	2,4
	b. Persentase Pertumbuhan produksi jagung	Persen	22,5	4,2	3	3,9
	c. Persentase Pertumbuhan produksi daging	Persen	N/A	16,3	37,8	3,6
	d. Persentase Pertumbuhan produksi ikan	Persen	14,39	6,31	6,20	6,20 – 6,70
	e. Persentase Pertumbuhan produksi garam	Persen	670,8	145,1	4,8	5,0 – 10,0
2.	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan					
	a. Persentase Pertumbuhan Konsumsi Umbi-umbian	Persen	N/A	N/A	N/A	5,7
	b. Persentase Pertumbuhan Konsumsi Daging	Persen	10,3	-2,3	5,5	5,2
	c. Persentase Pertumbuhan konsumsi ikan	Persen	7,74	7,08	7,50	7,0 – 8,0
	d. Penurunan Kasus Pangan Segar Nasional yang Membahayakan Kesehatan Manusia	Kasus	N/A	N/A	N/A	10

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

PP Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan dilaksanakan melalui 6 (enam) Kegiatan Prioritas (KP), seperti digambarkan pada Gambar 4.44, yaitu meliputi: (1) Peningkatan Kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortifikasi, dan Biofortifikasi Pangan; (2) Peningkatan Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian; (3) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perikanan dan Produk Laut; (4) Peningkatan Produktivitas dan Kesejahteraan Sumberdaya Manusia Pertanian; (5) Peningkatan Produktivitas dan Keberlanjutan Sumberdaya Pertanian; serta (6) Tata Kelola Sistem Pangan Nasional. Sasaran masing-masing KP dari PP Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan ditunjukkan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 40. Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
1.	Peningkatan Kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortifikasi, dan Biofortifikasi Pangan	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan				
		a. Jumlah konsumsi daging	7,1	Kg/Kapita/Tahun	34 Provinsi	Kementan
		b. Jumlah konsumsi ikan	56,39	Kg/Kapita/Tahun	34 Provinsi	KKP
		c. Jumlah konsumsi sayur dan buah	260,2	Gram/Kapita/Hari	34 Provinsi	Kementan
		d. Jumlah Produksi Beras Biofortifikasi	50.000	Ton Padi Biofortifikasi	9 Provinsi Sentra Padi	Kementan
		e. Keterjangkauan pangan lokal untuk anak sekolah	35	Persen	34 Provinsi	- Kementan - Kemendikbud - Kemendes - Kemendagri
		Meningkatnya Keamanan Konsumsi Pangan				
		a. Jumlah kasus pangan segar nasional yang membahayakan kesehatan manusia	10	Kasus	34 Provinsi	Kementan
		b. Rasio kasus komoditas pertanian impor diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian impor	5	Persen	34 Provinsi	Kementan
2.	Peningkatan Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian	Terlaksananya upaya peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dari produksi dalam negeri				
		a. Jumlah produksi padi	61	Juta ton	15 Provinsi sentra padi	Kementan
		b. Jumlah produksi jagung	34	Juta ton	15 Provinsi sentra jagung	Kementan
		c. Jumlah produksi daging	3,9	Juta ton	10 Provinsi sentra daging	Kementan
		d. Jumlah produksi cabai	2,5	Juta ton	50 Lokasi	Kementan
		e. Jumlah produksi bawang merah	1,5	Juta ton	47 Lokasi	Kementan
		f. Jumlah produksi umbi-umbian	23,8	Juta ton	26 Provinsi	Kementan
3.	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perikanan dan Produk Laut	Meningkatkan Produksi Perikanan dan Hasil Laut				

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
		a. Jumlah produksi ikan	15,47	Juta ton	34 Provinsi	KKP
		b. Jumlah produksi rumput laut	10,99	Juta ton	34 Provinsi	KKP
		c. Jumlah produksi garam	8,00	Juta ton	11 Provinsi	KKP
		d. Jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang dikelola oleh lembaga	11	WPP	34 Provinsi	KKP
		e. Jumlah kapal perikanan yang terbangun	30	Unit	5 Provinsi	KKP
		f. Jumlah benih ikan berkualitas	215,76	Juta ekor	34 Provinsi	KKP
		g. Jumlah Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang dioptimalkan	13	Lokasi	13 Lokasi	KKP
		h. Luas lahan garam yang difasilitasi	600	Hektar	9 Provinsi	• KKP • BIG
		i. Jumlah Kawasan Strategis Nasional (KSN)/Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) yang memiliki rencana zonasi pesisir dan laut	28	Kawasan	28 Kawasan	• KKP • BBG
4.	Peningkatan Produktivitas dan Kesejahteraan SDM Pertanian	Meningkatnya Produktivitas dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Pertanian				
		a. Nilai Tukar Petani	108,0	Nilai	34 Provinsi	Kementan
		b. Nilai tambah tenaga kerja pertanian	28	Juta Rupiah/ Tenaga Kerja/ Tahun	34 Provinsi	Kementan
		c. Persentase kelembagaan petani yang menjadi Korporasi Petani	2,4	Persen	34 Provinsi	• Kementan • Kementan • BUMN

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
		d. Rasio hasil penelitian yang dimanfaatkan terhadap penelitian yang dihasilkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	80	Persen	34 Provinsi	• Kementan • LPI • BPPT
		e. Persentase peningkatan kepesertaan asuransi pertanian	85	Persen	15 Provinsi	• Kementan • OJK
5.	Peningkatan Produktivitas dan Keberlanjutan Sumber Daya Pertanian	Terlaksananya upaya peningkatan produktivitas dan perlindungan sumber daya pertanian				
		a. Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tierter terhadap total irigasi tierter yang dibutuhkan	88	Persen	15 Provinsi	Kementan
		b. Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan (pra dan pasca panen)	50	Persen	33 Provinsi	Kementan
		c. Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	50	Persen	33 Provinsi	Kementan
		d. Peningkatan indeks pertanaman padi	1,8	Nilai	33 Provinsi	Kementan
6.	Tata Kelola Sistem Pangan Nasional	Sistem pangan terkelola dengan baik				
		a. Food Global Security Index	56,9	Nilai	Pusat	• Kementan • KLHK • BPOM • Kemendag
		b. Persentase peningkatan	10	Persen	26 Provinsi	• BULOG • Kementan • Kemendag

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
		jumlah cadangan beras				• Kemarkeo Perakonomian • BPS
		c. Jumlah publikasi statistik pertanian yang disempurnakan	22	Publikasi/ Laporan Statistik	34 Provinsi	BPS
		d. Tingkat inflasi bahan makanan	1,4	Persen	34 Provinsi	• BPS • BI • Kemendag • Kementan • BULOG
		e. Tingkat pemborosan pangan	250	Kg/Kapita/ Tahun	5 Kota	• Kementan • Kemkes • Kemenper • BPOM
		f. Tingkat susut produksi pangan	20	Persen	15 Provinsi	• Kementan • Kemendag • Kemenperin • BPS

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

2) Program Prioritas Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air

Sasaran dan indikator PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 41. Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air

No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017 ^{a)}	2018 ^{a)}	2019 ^{a)}	2020 ^{a)}
1.	Tertatanya hutan dengan indeks jasa ekosistem tinggi					
	a. Luas kawasan hutan dengan indeks jasa ekosistem tinggi	Juta hektare	N/A	N/A	N/A	65
	b. Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang dibangun	Unit	99	170	200	352
2	Menurunnya luas lahan kritis					
	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Ribu hektare	200,9 ^{a)}	187,8 ^{a)}	206 ^{b)}	56
3.	Terbangunnya rencana indikasi program berbasis DAS					
	Jumlah DAS yang dibangun rencana indikasi program berbasis DAS	DAS	N/A	N/A	N/A	34
4	Terbangunnya waduk multiguna					
	Jumlah waduk multiguna yang dibangun	Unit Waduk	34	38	36	41
5	Terkelolanya sistem irigasi secara modern					
	Jumlah Daerah Irigasi yang dikelola secara modern	Daerah Irigasi	N/A	N/A	N/A	7

Sumber: a) LKj KLHK, 2018, b) RKP 2019.

PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air dilaksanakan melalui 6 (enam) Kegiatan Prioritas (KP), seperti digambarkan pada Gambar 4.47, yaitu: (1) Penataan Kawasan Hutan (2) Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya; (3) Optimalisasi Pemanfaatan Waduk Multiguna; (4) Pengelolaan Air Terpadu Berbasis Pemanfaatan Teknologi (Smart Water Management); (5) Modernisasi Pengelolaan Air Irigasi; serta (6) Citarum Harum.

Sasaran masing-masing KP dari PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air adalah sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 42. Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
1.	Penataan Kawasan Hutan	Tercapainya penataan kawasan hutan sesuai daya dukung daya tampung				
		a. Luas kawasan hutan dengan indeks jasa ekosistem tinggi	65	Juta hektare	34 Provinsi	KLHK
		b. Luas kawasan dan sumber air yang terlindungi melalui perlindungan dan pengamanannya berbasis resort bersama masyarakat	745	Resort	34 Provinsi	KLHK
2.	Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya	Tercapainya pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya				
		a. Jumlah unit konservasi tanah dan air (KTA) secara sipil teknis yang dibangun	3.000	Unit	33 Provinsi	KLHK
		b. Luas tutupan hutan dan lahan melalui konservasi tanah dan air (KTA) secara vegetatif yang meningkat	56.000	Hektare	33 Provinsi	KLHK
		Terwujudnya keberlanjutan fungsi wilayah sungai dan kawasan konservasi air				
		a. Jumlah wilayah sungai prioritas yang direstorasi keasriannya	4	Wilayah sungai	3 Provinsi	Kemen PUPR
		b. Jumlah danau prioritas yang direvitalisasi	3	Danau	3 Provinsi	Kemen PUPR
3.	Optimalisasi Pemanfaatan Waduk Multiguna	Pembangunan bendungan dan bangunan penampung air lainnya				
		a. Jumlah bendungan baru yang dibangun	5	Bendungan	5 Provinsi	Kemen PUPR
		b. Jumlah bendungan dalam tahap pelaksanaan (on going)	36	Bendungan	20 Provinsi	Kemen PUPR
		c. Jumlah embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun	11	Embung	5 Provinsi	Kemen PUPR
		Penambahan fungsi bendungan eksisting				
		a. Jumlah bendungan eksisting yang mengalami penambahan fungsi air baku	5	Unit	5 Provinsi	Kemen PUPR

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
		b. Jumlah bendungan eksisting yang mengalami penambahan fungsi listrik	1	Unit	Jawa Barat	Kemen FUPR
		Pelaksanaan pemeliharaan bendungan				
		Jumlah bendungan yang dikelola dan ditingkatkan keamanannya dan fungsinya	134	Bendungan	11 Provinsi	Kemen FUPR
		Pelaksanaan bendungan yang direhabilitasi				
		Jumlah bendungan yang direhabilitasi	1	Bendungan	Jawa Tengah	Kemen FUPR
4.	Pengelolaan Air Terpadu Berbasis Pemanfaatan Teknologi (Smart Water Management)	Peningkatan efisiensi pengelolaan air menggunakan teknologi				
		a. Jumlah unit sistem informasi terpadu data hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi	34	Unit	30 Provinsi	• Kemen FUPR • Kemen ESDM • BMKG
		b. Jumlah wilayah sungai yang memiliki sistem pemantauan kualitas air	64	Wilayah Sungai	30 Provinsi	Kemen FUPR
5	Modernisasi Pengelolaan Air Irigasi	Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan				
		a. Luas jaringan irigasi permukaan yang dibangun	0,08	Juta Ha	17 Provinsi	Kemen FUPR
		b. Jumlah bendung irigasi kewenangan pusat yang dibangun	10	Unit	5 Provinsi	Kemen FUPR
		c. Luas jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi atau ditingkatkan	0,29	Juta Ha	24 Provinsi	Kemen FUPR
		Peningkatan kehandalan serta Pengembangan modernisasi sistem irigasi				
		a. Jumlah Daerah Irigasi dengan penerapan standar pengukuran dan pencatatan debit	7	Daerah Irigasi	6 Provinsi	Kemen FUPR
		b. Jumlah Daerah Irigasi kelembagaan irigasi modern	7	Daerah Irigasi	6 Provinsi	Kemen FUPR

No.	Regiuran Prioritas	Sasaran/Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
		c. Luas jaringan irigasi premium yang dibangun	1,792	Ha	Provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Tenggara	Kemen PUPR
		d. Luas jaringan irigasi komoditas non padi yang dibangun	3,500	Ha	Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah	Kemen PUPR
6.	Citarum Harum	Sistem Pemantauan Kualitas Air Citarum				
		a. Jumlah Titik Pantau kualitas air	42	Titik	Jawa Barat (Tersebar di DAS Citarum)	• KLHK • DLH Prov. Jawa Barat
		b. Jumlah pusat pemantauan kualitas air	1	DAS	Kota Bandung	• KLHK • DLH Kab. Bandung • DLHK Kab. Sumedang
		Pengelolaan kualitas air klasifikasi minimal kelas IV				
		a. Jumlah IPAL Industri yang terbangun	282	Titik	Tersebar di DAS Citarum	• KLHK • DLH Prov. Jawa Barat
		b. Jumlah KK yang terlayani IPAL Komunal Domestik	20.700	KK	Tersebar di DAS Citarum	• Kemen PUPR • Disperkim Prov. Jawa Barat
		c. Jumlah KK yang terlayani tangki septik	1.455	KK	Tersebar di DAS Citarum	• Kemen PUPR • Disperkim Prov. Jawa Barat
		d. Jumlah biogas limbah ternak yang terbangun	100	Unit	Kartasari	• Kementan • DLH Kab Karawang • Dinas Pertanian Kab Bandung • Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Jawa Barat • Dinas Perikanan dan Peternakan Kab Bandung Barat • Dinas Pertanian Kab Bekasi • DLH Kab Bandung Barat

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
		a. Jumlah rumah kompos limbah ternak yang terbangun	12	Titik	Tersebar di DAS Citarum	- Kementan, Dinas Pertanian Kab Bandung - Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Jawa Barat
		Kapasitas pengelolaan sampah: 80% tersedia cakupan pelayanan				
		a. Jumlah unit TPST (20-30 ton/hari) yang terbangun	274	Unit	Tersebar di DAS Citarum	- Kemen FUPR - Disperkim Prov Jawa Barat
		b. Jumlah unit TPST (10-30 ton/hari) yang terbangun	10	Unit	Tersebar di DAS Citarum	- Kemen FUPR - DLH Kab Bandung
		c. Jumlah TPSSR yang terbangun	295	Unit	Tersebar di DAS Citarum	- Kemen FUPR - DLH Kota Bandung - DLH Kab Cianjur
		d. Jumlah TPST Penanganan Sampah Sungai yang terbangun	1	Unit	Tersebar di DAS Citarum	- Kemen FUPR - DLH Kab Bandung
		e. Jumlah unit TPST POO, TPST PDU yang terbangun	25	Unit	Tersebar di DAS Citarum	- Kemen FUPR - DLH Kota Bandung
		f. Jumlah unit rumah kompos sampah yang terbangun	10	Unit	Tersebar di DAS Citarum	- Kemen FUPR - DLH Prov Jawa Barat
		Penertiban KJA 65% dan pengurangan lahan yang berstatus sangat kritis				
		a. Jumlah petak KJA yang diterbitkan	24.893	Petak	Waduk Cirata, Waduk Jatiluhur, Waduk Saguling	KKP
		b. Luas penghijauan pada lahan kritis seluas (7,5%)	10.825	Hektare	Tersebar di DAS Citarum	- KLHK (BPDASHL) - Dinas Perhutanan Prov. Jawa Barat
		Pengurangan skor genangan: 15%				
		a. Panjang sungai yang dinormalisasi dan tanggul yang dibangun/ditingkatkan	21,6	Km	Sepanjang Sungai Citarum	Kemen FUPR (BBWS Citarum)
		b. Panjang kanal banjir yang dibangun	5,81	Km	Sepanjang Sungai Citarum	Kemen FUPR (BBWS Citarum)

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
		c. Panjang sungai yang direstorasi dan dipelihara	1,3125	Km	Sepanjang Sungai Citarum	Kemen PUPR (BBWS Citarum)
		d. Jumlah <i>Check Dam</i> yang dibangun	2	Unit	Sepanjang Sungai Citarum	Kemen PUPR (BBWS Citarum)

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

3) Program Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan EBT

Sasaran dan indikator PP Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan EBT dilihat pada tabel berikut.

Tabel 43. Sasaran dan Indikator PP Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan EBT

No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017*)	2018*)	2019**)	2020**)
1	Meningkatnya Porsi Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional					
	Persentase Porsi Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional	Persen	6,28	7,68	12,4	13,4
2	Meningkatnya akses dan pasokan tenaga listrik yang merata, handal dan efisien					
	Konsumsi Listrik per Kapita	kWh	1.012	1.064	1.200	1.310
3	Meningkatkan Efisiensi Energi					
	Intensitas Energi Primer/Intensitas Energi Final (SBM/Miliar Rupiah)	SBM/Miliar Rupiah	434	428,6	424	421 /226,7

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

PP Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan EBT dilaksanakan melalui 5 (lima) Kegiatan Prioritas (KP), yaitu: (1) Akselerasi Pembangunan Energi Terbarukan; (2) Peningkatan Pasokan dan Akses Listrik; (3) Peningkatan Produksi dan Akses Minyak dan Gas; serta (4) Peningkatan Implementasi Efisiensi Energi; (5) Pengembangan Industri Pendukung EBT.

Sasaran masing-masing KP dari PP Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan EBT adalah sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 44. Sasaran dan Indikator KP dari PP Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan EBT

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
1.	Akselerasi Pembangunan Energi Terbarukan	Meningkatkan pembangunan pembangkit ET				
		a. Pembangunan PLT EBT (Kumulatif)	10.944	MW	Tersebar di Seluruh Indonesia	• Kamen ESDM • Badan Usaha
		Meningkatnya penyediaan bahan baku dan produksi BBN				
		a. Jumlah produksi bahan bakar nabati	10	Juta KL	Tersebar di Seluruh Indonesia	• Kamen ESDM • Badan Usaha
		b. Pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel terhadap BBM Jenis Minyak Solar	30	Persen	Tersebar di Seluruh Indonesia	• Kamen ESDM • Badan Usaha
2.	Peningkatan Pasokan dan Akses Listrik	Memperluas penyediaan infrastruktur dan pemanfaatan tenaga listrik yang efisien				
		a. Rasio elektrifikasi	99,9	Persen	Tersebar di Seluruh Indonesia	• Kamen ESDM • Badan Usaha
		b. Jumlah penjualan tenaga listrik	265,21	TWh	Tersebar di Seluruh Indonesia	• Kamen ESDM • Badan Usaha
		c. Persentase susut jaringan	9,3	Persen	Tersebar di Seluruh Indonesia	• Kamen ESDM • Badan Usaha
		d. Domestic Market Obligation (DMO) batubara	144	Juta Ton	Tersebar di Seluruh Indonesia	• Kamen ESDM
3.	Peningkatan Produksi dan Akses Minyak dan Gas	Meningkatnya produksi migas				
		a. Jumlah produksi minyak bumi	707	Ribu BM/ Hari	Tersebar di Seluruh Indonesia	• Kamen ESDM • Badan Usaha
		b. Jumlah produksi gas bumi	1.141	Ribu SBM/ Hari	Tersebar di Seluruh Indonesia	• Kamen ESDM • Badan Usaha

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
		c. Jumlah WK migas yang ditawarkan	12	Wilayah Kerja (WK)	Tersebar di Seluruh Indonesia	• Kemen ESDM
		Meningkatnya akses infrastruktur migas				
		a. Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga (tambahan)	298.588	Sambungan Rumah Tangga (SR)	Tersebar di Seluruh Indonesia	• Kemen ESDM • Badan Usaha
		b. Panjang jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi (akumulatif)	15.806,95	Km	Tersebar di Seluruh Indonesia	• Kemen ESDM • Badan Usaha
4.	Peningkatan Implementasi Efisiensi Energi	Meningkatnya implementasi efisiensi energi				
		Peningkatan implementasi SKEM (tambahan)	3	Peralatan	Tersebar di Seluruh Indonesia	• Kemen ESDM
5	Pengembangan Industri Pendukung EBT	Meningkatnya kandungan komponen dalam negeri yang digunakan untuk infrastruktur EBT				
		a. TKDN FLT Panas Bumi	38	Persen	Tersebar di Seluruh Indonesia	• Kemen ESDM • Badan Usaha
		b. TKDN FLTS	40	Persen	Tersebar di Seluruh Indonesia	• Kemen ESDM • Badan Usaha
		c. TKDN FLT Hidro (Sampai dengan 10 MW)	70	Persen	Tersebar di Seluruh Indonesia	• Kemen ESDM • Badan Usaha

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

4) Program Prioritas Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran dan indikator PP Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 45. Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017*)	2018*)	2019**)	2020**)
1.	Meningkatnya kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan					
	a. Indeks kualitas air	Nilai	58,68 ^{a)}	51,01 ^{a)}	55	73
	b. Indeks kualitas udara	Nilai	87,03 ^{a)}	84,76 ^{a)}	84	84
	c. Indeks kualitas tutupan lahan	Nilai	56,88 ^{a)}	61,03 ^{a)}	62	62.5
	d. Indeks kualitas air laut	Nilai	N/A	N/A	N/A	59.5

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

PP Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dapat dilaksanakan melalui 4 (empat) Kegiatan Prioritas, yaitu: (1) Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; (2) Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; (3) Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; serta (4) Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum Bidang SDA dan Lingkungan Hidup. Sasaran masing-masing KP dari PP Prioritas Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup seperti pada tabel berikut.

Tabel 46. Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
1.	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Menurunnya potensi kejadian pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup				
		a. Persentase penurunan luas hutan/lahan yang terbakar	10	Persen	Pusat dan provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan	KLHK
		b. Jumlah pelayanan prediksi dan peringatan dini cuaca dengan	34	Provinsi	34 Provinsi	BMKG
		<i>Scaling Up Weather Capacity II</i>				
		c. Jumlah pemantauan kualitas udara untuk perhitungan indeks kualitas udara	34	Provinsi	34 Provinsi	• KLHK • Pemda
		d. Jumlah tersedianya informasi data kualitas air sungai, danau, dan laut untuk early warning system pencemaran dan kerusakan lingkungan	71	Lokasi	34 Provinsi	• KLHK • Pemda
2.	Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya respons cepat dalam mengurangi intensitas pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup				
		a. Persentase peningkatan kualitas fungsi ekosistem pesisir dan laut	17,5	Persen	Pusat	KLHK
		b. Jumlah kab/kota yang memenuhi target pengurangan sampah berdasarkan Jakstranas sebanyak 400 kab/kota dalam 5 tahun	80	Kabupaten /Kota	34 Provinsi	KLHK

		c. Jumlah sampah yang tertangani di TN/KK/destinasi wisata prioritas pesisir dan laut sebesar 63.000 ton dalam 5 tahun	21.000	Ton	Pusat	• KLHK • KKP
		d. Jumlah fasilitas pengolahan limbah B3 dan medis	5	Unit	5 Provinsi	KLHK
		e. Jumlah fasilitas pengolahan emas non merkuri di PESK yang memiliki izin	5	Unit	5 Provinsi	KLHK
3.	Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya upaya pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup				
		a. Luas ekosistem gambut yang terkoordinasi dan difasilitasi restorasi gambut	300.000	Ha	7 Provinsi	KLHK (Badan Restorasi Gambut)
		b. Luas lahan bekas tambang rakyat yang difasilitasi pemulihannya	77,50	Ha	4 Provinsi	KLHK
		c. Luas kawasan konservasi perairan baru	700.000	Ha	3 Lokasi	KKP
		d. Jumlah kawasan pesisir yang terahabilitasi	16	Lokasi	6 provinsi	KKP
		e. Jumlah kawasan pesisir yang di restorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran	8	Lokasi	7 Provinsi	KKP
		f. Persentase Peningkatan Populasi Spesies Terancam Punah	2	Persen	Pusat	KLHK
4.	Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya efektivitas sistem kelembagaan dan penegakan hukum pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup				
		a. Persentase ketaatan pemegang izin lingkungan terhadap peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup dan Kehutanan	65	Persen	34 Provinsi	KLHK
		b. Jumlah penyelesaian kasus sampai P31 untuk penembakan liar, kebakaran hutan dan lahan, penyelundupan dan peredaran ilegal TSL	120	Kerus	34 Provinsi	KLHK
		c. Jumlah pendaftaran gugatan perdata lingkungan hidup melalui pengadilan	17	Gugatan	34 Provinsi	KLHK

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

5) Program Prioritas Penguatan Ketahanan Bencana

Sasaran dan indikator PP Penguatan Ketahanan Bencana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 47. Sasaran dan Indikator PP Penguatan Ketahanan Bencana

No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017*)	2018*)	2019**)	2020**)
1.	Terwujudnya pembangunan berketahanan bencana					
	Indeks Ketahanan Bencana Daerah	Nilai	0,44	0,47	0,5	0,52 Kenaikan rata-rata 5%

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

PP Penguatan Ketahanan Bencana dilaksanakan melalui 4 (empat) Kegiatan Prioritas (KP), yaitu: (1) Penguatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana; (2) Penguatan Peringatan Dini Bencana; (3) Penguatan Manajemen Kedaruratan; serta (4) Percepatan Pemulihan Pascabencana. Sasaran masing-masing KP dari PP Penguatan Ketahanan Bencana adalah sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 48. Sasaran dan Indikator KP dari PP Penguatan Ketahanan Bencana

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
1.	Penguatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana				
		Indeks Kesiapsiagaan Daerah	10	Persen	34 Provinsi	• BNPB • Kemendagri • Kemen PPPA • Kemenkeu • Kemensos • Kemen ATR/BPN
2.	Penguatan Peringatan Dini Bencana	Terwujudnya sistem peringatan dini bencana terpadu				
		Jumlah Sistem Peringatan Dini Terpadu	1	Sistem	Pusat	• BMKG • Kemen ESDM • LAPAN
3.	Peningkatan Manajemen Kedaruratan	Meningkatnya kecepatan respon penanganan darurat bencana				
		Persentase waktu respon kejadian bencana kurang dari 24 jam	100	Persen	34 Provinsi	• BNPB • Kemenkes
4.	Percepatan Pemulihan Pascabencana	Terwujudnya percepatan pemulihan pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan sesuai dengan pembangunan berkelanjutan				
		Indeks Pemulihan Pascabencana	5	Persen	34 Provinsi	• BNPB • KUKM

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

e) Prioritas Nasional Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

PN Stabilitas Pertahanan dan Keamanan dilaksanakan untuk memastikan terjaganya keutuhan wilayah dan rasa aman di masyarakat, meningkatnya pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri dan terwujudnya penegakan hukum dan sistem anti korupsi yang optimal, menurunnya penyalahgunaan narkoba, serta meningkatkan keamanan siber. Permasalahan utama yang akan dihadapi pada tahun 2020 adalah: (1) dinamika lingkungan yang dapat mengganggu kedaulatan bangsa dan negara, seperti aksi terorisme dan separatisme; (2) adanya potensi ancaman terhadap kedaulatan Indonesia dan WNI di luar negeri; (3) belum optimalnya pemanfaatan kerjasama pembangunan internasional; (4) belum efektifnya sistem peradilan dan maraknya praktik korupsi di berbagai bidang; (5) maraknya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba; serta (6) gangguan keamanan siber.

Sasaran dan indikator Prioritas Nasional ini adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 49. Sasaran dan Indikator PN Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017 ^{a)}	2018 ^{a)}	2019 ^{***)}	2020 ^{***)}
1.	Terjaganya keutuhan wilayah dan rasa aman di masyarakat					
	a. Indeks Kekuatan Militer	Nilai	0,33 ^{a)}	0,33 ^{a)}	0,28	0,25
	b. <i>Crime Rate</i>	Orang/100.000 penduduk	129 ^{b)}	129 ^{b)}	129	128 ^{b)}
2	Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri					
	Indeks pelayanan dan perlindungan WNI/BHI	Nilai	90.50 ^{c)}	92,46 ^{c)}	84.23	84.23 ^{c)***)}
3.	Terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap					
	Indeks Pembangunan Hukum	Nilai	0,60	0,61	0,63	0,65

Sumber: a) *Global Firepower 2018 (diolah)*; b) *Statistik Kriminal 2018*; c) *Kementerian Luar Negeri*

Memperhatikan hal tersebut, PN Stabilitas Keamanan Nasional didukung oleh 5 (lima) PP, yaitu: (1) Penguatan Kemampuan Pertahanan; (2) Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional; (3) Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi; (4) Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan

Siber, dan Penguatan Keamanan Laut; serta (5) Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas.

Gambar 8. Kerangka PN Stabilitas Pertahanan dan Keamanan



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

1) Program Prioritas Penguatan Kemampuan Pertahanan

Sasaran dan indikator PP Penguatan Kemampuan Pertahanan terdapat pada tabel berikut.

Tabel 50. Sasaran dan Indikator PP Stabilitas Keamanan Nasional

No	Sasaran/Indikator	Satuan	2017 ^{a)}	2018 ^{a)}	2019 ^{a)}	2020 ^{a)}
1.	Terpenuhinya kekuatan pokok minimum					
	Persentase Pemenuhan <i>Minimum Essential Force</i> (MEF)	Persen	52,3 ^{a)}	60,4 ^{a)}	68,9	72
2.	Meningkatnya kontribusi industri pertahanan terhadap pemenuhan alutsista pertahanan					
	Persentase Kontribusi Industri Pertahanan	Persen	46,9	35,9%	43,6	≥50

Sumber: a) Kemenhan dan Bappenas (diolah), 2019

PP Penguatan Kemampuan Pertahanan diwujudkan melalui 3 (tiga) KP yaitu: (1) Peningkatan Kekuatan Pertahanan; (2) Penguatan Kemandirian Pertahanan; (3) Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertahanan dan Keamanan di Wilayah Perbatasan dan Pulau Terluar. Sasaran masing-masing KP dari PP Penguatan Kemampuan Pertahanan seperti tabel berikut.

Tabel 51. Sasaran dan Indikator KP dari PP Penguatan Kemampuan Pertahanan

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
1	Peningkatan Kekuatan Pertahanan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas alutsista				
		a. Jenis Alutsista yang diadakan	12	Jenis	Pusat	Kemenhan
		b. Jenis Alutsista yang dipelihara dan dirawat	7	Jenis	Pusat	Kemenhan
		c. Jenis sarana-prasarana pertahanan yang dibangun	10	Jenis	Pusat	Kemenhan
2	Penguatan Kemandirian Pertahanan	Meningkatnya kemandirian industri pertahanan				
		a. Jumlah teknologi pertahanan industri pertahanan yang diteliti dan dikembangkan	1	Paket	Pusat	Kemenhan
		b. Jumlah Alutsista industri pertahanan yang diproduksi	1	Paket	Pusat	Kemenhan
3.	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertahanan dan	Meningkatnya pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan dan pulau terluar				
	Keamanan di Perbatasan dan Pulau Terluar					
		a. Panjang Jalur Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP) yang dibangun	200	Km	Kalimantan	Kemenhan
		b. Jumlah pos pengamanan perbatasan (Pamtas) yang dibangun	9	Bangunan	NTT, Papua	Kemenhan
		c. Jumlah Pos TNI AL (Posal) yang dibangun	16	Bangunan	Papua	Kemenhan
		d. Jumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang dibangun	11	Bangunan	Di 11 lokpri	Kemen PUPR
		e. Panjang pilar batas wilayah negara yang difasilitasi	50	Km	Kalimantan Barat	BNPP
		f. Jumlah Pilar Titik Referensi Batas Negara Wilayah Laut dan Udara yang diidentifikasi/diinventarisasi	20	Pilar	Pusat	BNPP
		g. Jumlah aparat pemerintah di kawasan perbatasan yang dilatih	300	Orang	Pusat	BNPP
		h. Jumlah masyarakat desa terdepan perbatasan negara sebagai bagian sistem hankam yang difasilitasi pemberdayaan	150	Orang	Pusat	BNPP

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

2) Program Prioritas Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional

Sasaran dan indikator PP Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional terdapat pada tabel berikut.

Tabel 52. Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional

No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017 ^{a)}	2018 ^{a)}	2019 ^{a,b)}	2020 ^{a,b)}
1.	Meningkatnya peran serta terjaganya kedaulatan wilayah Indonesia					
	a. Persentase Kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral dan regional	Persen	94,55	120,37	95	95,67 ^{***)}
	b. Persentase Kemajuan perundingan perbatasan	Persen	100	98,11	100	100 ^{***)}
2.	Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri					
	a. Persentase Penyelesaian Kasus WNI dan BHI di luar negeri	Nilai	80.62 ^{a)}	77.38 ^{a)}	78.39	78.39 ^{***)}
	b. Persentase Sistem Kelembagaan Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri	Nilai	118.66 ^{a)}	123.34 ^{a)}	100	100 ^{***)}
	c. Persentase Diplomasi Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri	Nilai	95.76 ^{a)}	116.62 ^{a)}	88.5	88.5 ^{***)}
3.	Menguatnya pelaksanaan kerjasama pembangunan internasional					
	Jumlah Program/Kegiatan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular	Program/Kegiatan	59	69	76 ^{b)}	96 ^{b)}

Sumber: a) Kementerian Luar Negeri; b) Kementerian PPN/Bappenas;

PP Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional diwujudkan melalui 3 (tiga) KP yaitu: (1) Penguatan Diplomasi Politik-Kemampuan dan Perbatasan; (2) Penguatan Perlindungan WNI di Luar Negeri; serta (3) Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional. Adapun rincian sasaran masing-masing KP dari PP Penguatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini.

Tabel 53. Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
1.	Penguatan Diplomasi Politik-Keamanan dan Perbatasan	Meningkatnya peran serta terjaganya kedaulatan wilayah Indonesia				
		a. Jumlah Dokumen Hasil Perundingan Batas Laut INA dengan Prioritas PLW, VNM, dan MLY, Pelaksanaan Konsultasi dalam rangka Persiapan Proses Realignment FIR dengan SIN dan MLY, Verifikasi Updating Batas Maritim RI dgn Negara Tetangga dalam rangka mendukung kebijakan 1 peta	8	Dokumen	Pusat	Kemenlu
		b. Jumlah tanda batas negara	120	Pilar	Kaltara, NTT (2), Seluruh Indonesia	BIG
		c. Jumlah peta batas negara	32	NLP	RI-MLY, RI-RDTL, RI-PNG	BIG
		d. Jumlah Kesepakatan Teknis Perundingan Batas Laut	6	Kesepakatan Teknis	RI-RDTL, RI-MLY (2), RI-PLW, RI-VNM, RI-SIN	BIG
		e. Jumlah Kesepakatan Teknis Perundingan Batas Darat	3	Kesepakatan Teknis	RI-MLY, RI-RDTL, RI-PNG	BIG
		f. Jumlah Kesepakatan Perundingan Batas dan Kerjasama Wilayah Negara	5	Kesepakatan	Pusat	Kemendagri
		g. Peringkat jumlah pasukan perdamaian (PKO) yang dikirim Pemerintah Indonesia	10 besar	Peringkat	Pusat	Kemenlu
		h. Indeks Kepemimpinan dan pengaruh Indonesia dalam Forum Multilateral	95	Nilai	Pusat Perwakilan	Kemenlu
2.	Penguatan Perlindungan WNI di luar negeri	Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri				
		a. Persentase Kasus Khusus yang diselesaikan	75.9	Persen	Pusat Perwakilan	Kemenlu
		b. Persentase Kasus Umum yang diselesaikan	83	Persen	Pusat Perwakilan	Kemenlu
		c. Persentase Integrasi Sistem Pendataan WNI di luar negeri	100	Persen	Pusat Perwakilan	Kemenlu
		d. Persentase Produk Hukum dan Panduan Teknis Bidang luar negeri yang diterapkan	100	Persen	Pusat Perwakilan	Kemenlu
		e. Persentase Pejabat/Staf yang Memiliki Sertifikat Pelatihan terkait Penanganan Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri	100	Persen	Pusat Perwakilan	Kemenlu
		f. Persentase implementasi aplikasi portal Pelayanan dan perlindungan oleh Perwakilan RI di Luar Negeri	100	Persen	Pusat Perwakilan	Kemenlu
		g. Persentase rekomendasi Kemenlu yang diterima dalam isu perlindungan WNI-BHI pada forum perundingan	87	Persen	Pusat Perwakilan	Kemenlu

		h. Persentase rekomendasi Kemenlu yang diterima dalam kebijakan atau regulasi nasional terkait perlindungan WNI-BHI	89	Persen	Pusat Perwakilan	Kemenlu
		i. Persentase responden yang memberikan umpan balik positif atas <i>Public Awareness Campaign</i> perlindungan WNI	89	Persen	Pusat Perwakilan	Kemenlu
		j. Persentase respon positif pemberdayaan kelompok masyarakat dalam kerangka perlindungan WNI di luar negeri	89	Persen	Pusat Perwakilan	Kemenlu
		k. Jumlah atase yang memberi perlindungan pekerja migran	13	Atase Ketenaga-kerjaan	Perwakilan	• Kemnaker • BNP2TKI
3.	Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional	Menguatnya pelaksanaan kerjasama pembangunan internasional				
		a. Jumlah layanan Kerjasama Internasional	1	Layanan	Pusat	KKP
		b. Jumlah Bahan Kebijakan Koordinasi Hukum dan Perjanjian Maritim yang Diselesaikan	10	Dokumen	Pusat	Kemenko Maritim
		c. <i>Knowledge sharing</i> Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular Bidang Infrastruktur	1	Laporan	Pusat	KemenPPN /Bappenas

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

3) Program Prioritas Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi

Sasaran dan indikator PP Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi terdapat pada tabel berikut.

Tabel 54. Sasaran dan Indikator PP Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi

No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017 ⁽¹⁾	2018 ⁽¹⁾	2019 ⁽²⁾	2020 ⁽²⁾
1.	Terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap					
	a. Indeks Pembangunan Hukum	Nilai	0,60	0,61	0,63	0,65
	b. Indeks Perilaku Anti Korupsi	Nilai	3,71	3,66	4	4

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

PP Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi diwujudkan melalui lima KP, yaitu: (1) Penataan Regulasi; (2) Perbaikan Peradilan Perdata untuk Kemudahan Berusaha; (3) Perbaikan Peradilan Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif; (4) Penguatan Upaya Anti Korupsi; serta (5) Penataan Biaya Politik. Adapun rincian sasaran masing-masing KP dari PP Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi sebagaimana terdapat pada tabel berikut.

Tabel 55. Sasaran dan Indikator KP dari PP Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
1.	Penataan Regulasi	Terwujudnya regulasi yang berkualitas				
		a. Jumlah SOP mengenai tindak lanjut hasil rekomendasi analisis dan evaluasi hukum	1	Dokumen	Pusat	Kemenkumham
		b. Jumlah Pedoman Konsultasi Publik	1	Dokumen	Pusat	Kemenkumham
		c. Jumlah Aplikasi Penjaringan Partisipasi Publik Berbasis Teknologi Informasi	1	Paket	Pusat	Kemenkumham
		d. Jumlah Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan MK	15	Undang-Undang	Pusat	MK
		e. Jumlah Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	1	Rekomendasi	Pusat	MK
		f. Jumlah Harmonisasi Kebijakan dan/atau Peraturan Perundang-undangan untuk Perlindungan dan Pemajuan Hak Korban dengan Perspektif Korban	10	Rekomendasi	Pusat	Komnas Perempuan
		g. KUHP yang diundangkan	1	Dokumen	Pusat	Kemenkumham
		h. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata di DPR	1	Dokumen	Pusat	Kemenkumham
		i. Penyusunan Rancangan Undang-Undang Fidusia di tingkat PAK	1	Dokumen	Pusat	Kemenkumham
		j. Kebijakan pendukung penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Badan Usaha	1	Dokumen	Pusat	Kemenkumham
		k. Penyusunan Rancangan Undang-Undang Kepalitan di tingkat PAK	1	Dokumen	Pusat	Kemenkumham
		l. Naskah Akademik RUU Badan Usaha	1	Dokumen	Pusat	Kemenkumham
2	Perbaikan Peradilan	Terwujudnya peradilan perdata yang mendukung kemudahan berusaha				

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
	Perduta untuk Kemudahan Berusaha					
		a. Jumlah Kajian Evaluasi dan Urgensi Penguatan Kelembagaan Jurusita	1	Laporan	Pusat	MA
		b. Jumlah Pengembangan Implementasi e-court e-litigasi	1	Sistem	Pusat	MA
3.	Perbedaan Peradilan Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif	Meningkatnya penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif				
		a. Jumlah Petunjuk Teknis Penanganan Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif	1	Juknis	Pusat	Kejagung
		b. Bimtek Penuntut Umum sebagai Fasilitator dalam Penanganan Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif	1	Laporan	Pusat	Kejagung
		c. Jumlah Peserta Didlat berbasis Kompetensi di Bidang Pembimbing Kemasyarakatan	320	Orang	Pusat	Kemenkumham
		d. Jumlah peraturan mengenai pedoman penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif	1	Pedoman	Pusat	MA
		e. Jumlah Penanganan pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban	450	Surat Keterangan	Pusat	Komnas HAM
		f. Jumlah Standar norma dan setting HAM	2	Standar	Pusat	Komnas HAM
		g. Jumlah Satker Pengembangan dan pemeliharaan CMS SFPT-TI	156	Satker	Pusat	Kejagung
		h. Jumlah Satker Bimbingan Teknis dan Operasional CMS dan SFPT TI	460	Satker	Pusat	Kejagung
		i. Jumlah Sistem Monitoring dan Dashboard Perkara CMS dan SFPT TI	2	Sistem	Pusat	Kejagung

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
		j. Jumlah Wilayah yang melaksanakan Bimtek untuk Tenaga Pendukung SPPT TI	33	Wilayah	Pusat	Kemenkumham
		k. Jumlah Wilayah yang melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPPT-TI	33	Wilayah	Pusat	Kemenkumham
		l. Jumlah Satker Peningkatan Fungsi SPPT TI di Pengadilan Umum	115	Satker	Desrah	MA
		m. Sistem Pengadilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi	4	Desain	Pusat	Kemenkominfo
		n. Rekomendasi Kebijakan di Bidang Penegakan Hukum	6	Rekomendasi	Pusat	Kemenko-polhukam
		o. Jumlah Karakterisasi putusan berbasis teknologi informasi	35	putusan	Pusat	KY
		p. Jumlah Layanan Pos Bantuan Hukum	111.584	Jam Layanan	Pusat	MA
		q. Jumlah Perkara pengadilan umum yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan	3.888	Perkara	Pusat	MA
		r. Jumlah Perkara pengadilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	81	Perkara	Pusat	MA
		s. Jumlah Perkara dilingkungan Pengadilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	11.272	Perkara	Pusat	MA
		t. Jumlah Perkara dilingkungan Pengadilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar Gedung	26.207	Perkara	Pusat	MA
		u. Jumlah Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Pengadilan Agama	124.246	Jam layanan	Pusat	MA
		v. Jumlah Perkara dilingkungan pengadilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang Terpadu	4.191	Perkara	Pusat	MA
		w. Jumlah Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	42	Perkara	Pusat	MA

No	Registan Prioritas	Sasaran/Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
		x. Jumlah Pelayanan Pos Bantuan Hukum	8.640	Jam Layanan	Pusat	MA
		y. Jumlah Rekomendasi untuk Pelaksanaan Dukungan Pengakuan, Penghargaan, dan Perlindungan yang Mendukung Kerja-kerja Perempuan Pembela HAM	1	Rekomendasi	Pusat	Komnas Perempuan
		z. Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Hukum Litigasi	5699	Orang	Pusat	Kemenkumham
		aa. Jumlah Kegiatan Bantuan Hukum non Litigasi	758	Kegiatan	Pusat	Kemenkumham
		bb. Jumlah Pemberdayaan Masyarakat untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif	85	Kelompok Masyarakat (Pokmas)	Daerah	Kemenkumham
4.	Penguatan Upaya Anti Korupsi	Berkurangnya praktik koruptif				
		a. Jumlah Wilayah Zona Integritas (ZI) dan WHK dan WHBM	80	Satker	Pusat	Kemenkumham
		b. Jumlah Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	1	Laporan	Pusat	Kemenkumham
		c. Jumlah Pengembangan ZI Wilayah I-IV	846	LHP	Daerah	Mahkamah Agung
		d. Jumlah pembangunan Zona Integritas	2	Laporan	Pusat	Mahkamah Konstitusi
		e. Jumlah Satker yang Didampingi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBHM)	81	Satker	Pusat	Kejaksaan
		f. Jumlah Sosialisasi Revisi Pedoman Tuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi	81	Kegiatan	Pusat	Kejaksaan
		g. Jumlah Angkatan Peserta Didik Pemulihan Aset	4	Angkatan	Pusat	Kejaksaan
		h. Jumlah Laporan Penanganan Pemulihan Aset yang terkait Perkara	20	Laporan	Pusat	Kejaksaan
		i. Pelaksanaan Survei Pemulihan Integritas	1	Laporan	Pusat	KPK
		j. Jumlah Laporan Monitoring Implementasi Strategi	2	Laporan	Pusat	KPK

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
		Nasional Pencegahan Korupsi				
		k. Jumlah UKPBJ yang Mencapai Maturitas (level 3)	100	UKPBJ	Pusat dan Daerah	LKPP
		l. Jumlah Instansi Pemerintah yang Menerima Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset	15	Instansi Pemerintah	Pusat dan Daerah	ANRI
		m. Jumlah Unit Kerja yang Dievaluasi untuk Mendapatkan Predikat WBK/WBBM	495	Unit Kerja	Pusat dan Daerah	Kemen PANRB
		n. Jumlah Instansi Pemerintah yang Diberikan Asistensi dan Dievaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	616	Instansi Pemerintah	Pusat dan Daerah	Kemen PANRB
		o. Jumlah Instansi Pemerintah yang Mengimplementasikan Integritas ASN	100	Instansi Pemerintah	Pusat dan Daerah	Kemen PANRB
		p. Jumlah Instansi Pemerintah yang Diawasi Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku	150	Instansi Pemerintah	Pusat dan Daerah	KASN
		q. Jumlah Rekomendasi atas Pelaksanaan Seleksi JPT di Instansi Pemerintah	1500	Rekomendasi	Pusat dan Daerah	KASN
		r. Integrasi Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang Jasa, Akuntabilitas Kinerja, serta Pemantauan dan Evaluasi	1	Sistem Terintegrasi	Pusat dan Daerah	KemenPPN/Bappenas
		s. Jumlah Instansi Pemerintah yang Menerapkan e-Arsip Terintegrasi	72	Instansi Pemerintah	Pusat dan Daerah	ANRI
5	Penataan Biaya Politik	Terwujudnya prakondisi penataan biaya politik				
		a. Jumlah Pembentukan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif	15	Daerah	Daerah	Bawaslu
		b. Jumlah Penegakan Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu	5	Laporan/dokumen	Pusat	Bawaslu

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
		c. Jumlah Pengembangan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Hasil <i>Piloting</i>	19	Daerah	Daerah	Bawaslu
		d. Jumlah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	126.376.418	Suara Sah	Pusat	Kemendagri
		e. Jumlah Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana	34	Satker	Daerah	KPU
		f. Persentase Program Siaran Berindeks di atas 3	75	Persen	Pusat	Komisi Penyiaran Indonesia
		g. Jumlah Provinsi dengan Indeks Kemerdekaan Pers di atas 70 (kategori baik)	24	Provinsi	Pusat dan Daerah	Dewan Pers
		h. Persentase sengketa informasi terdaftar yang diselesaikan	90	Persen	Pusat	Komisi Informasi Pusat
		i. Persentase terbentuknya PPID di Provinsi dan Kabupaten/Kota	85	Persen	Pusat dan Daerah	- Ditjen IKP Kemkominfo - Komisi Informasi Pusat
		j. Persentase Pemahaman Masyarakat tentang Keterbukaan Informasi	75	Persen	Pusat dan Daerah	Komisi Informasi Pusat
		k. Jumlah Penguatan Pokja IDI	15	Provinsi	Daerah	Kemendagri

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

4) Program Prioritas Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut

Sasaran dan Kerangka Program Prioritas Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut terdapat pada tabel berikut.

Tabel 56. Sasaran dan Indikator PP Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut

No	Sasaran/Indikator	Satuan	2017 ^{a)}	2018 ^{a)}	2019 ^{a)}	2020 ^{a)}
1	Meningkatnya penanggulangan aksi terorisme dan keamanan serta ketertiban masyarakat					
	Skor <i>Global Terrorism Index</i>	Nilai	4,54	4,54 ^{a)}	4,54 ^{a)}	4,3
2	Meningkatnya ketahanan dan keamanan siber					
	Skor <i>Global Cybersecurity Index Indonesia</i> ^{b)}	Nilai	0,42	0,78	0,80	0,83
3	Meningkatnya keamanan laut					
	a. Jumlah penyelesaian kasus tindak pidana di wilayah perairan ^{c)}	Kasus	N/A	98	103	108
	b. <i>Relay time</i> informasi ^{d)}	Menit	N/A	N/A	N/A	60
	c. <i>Response time</i> instansi kamlu ^{d)}	Jam	N/A	N/A	N/A	24

Sumber: a) GTI, 2019; b) International Telecommunication Union (ITU), 2018 (diolah); c) Polri, 2019; d) Bakamla, 2019

PP Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut diwujudkan melalui 3 (tiga) KP yaitu: (1) Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme; (2) Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber; dan (3) Penguatan Keamanan Laut. Adapun rincian sasaran masing-masing KP dari PP Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut terdapat pada tabel berikut.

Tabel 57. Sasaran dan Indikator KP dari PP Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
1	Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme	Meningkatnya upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme				
		a. Jumlah operasi intelijen kontra terorisme cipta kondisi dan Pengamanan PON Papua	100	Laporan	Pusat	BIN
		b. Jumlah operasi intelijen kontra separatisme cipta kondisi dan Pengamanan PON Papua	90	Laporan	Pusat	BIN

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
		c. Jumlah kegiatan koordinasi peran serta masyarakat dan pemerintah dalam pencegahan terorisme	1	Wilayah	NTB	BNPT
		d. Draft Indeks Aktualisasi Pancasila	1	Dokumen	Pusat	BPIP
		e. Jumlah modul pendidikan pemahaman nilai-nilai Pancasila bagi ASN	1	Dokumen	Pusat	• Kamen PANRB • BPIP • BIN • LAN • Komendagr i
		f. Jumlah Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan Teroris yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	50	Orang	Pusat	Kemensos
		g. Jumlah warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan pencegahan terorisme	10.000	Orang	Pusat	Kemensos
2	Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber	Menguatnya ketahanan masyarakat terhadap serangan siber dan menguatnya tata kelola pemangku kepentingan terkait siber				
		a. Jumlah Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang dibentuk di sektor pemerintah	15	KLD	Pusat dan Daerah	BSSN
		b. Jumlah operasi intelijen siber bidang kontra Pengamanan Kegiatan PON Papua	250	Laporan	Pusat	BIN
		c. Jumlah operasi intelijen siber bidang analisa dan forensik Pengamanan Kegiatan PON Papua	300	Laporan	Pusat	BIN
		d. Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang keamanan siber	100	Lulusan	Pusat dan Daerah	BSSN
		e. Jumlah ASN pada KLD yang ditingkatkan kompetensinya dalam bidang SPBE	200	Lulusan	Pusat dan Daerah	BSSN
		f. Jumlah SDM pengelola keamanan siber pada sektor Infrastruktur Informasi Kritis Nasional (IIKN) (Born to Defense Program)	500	Lulusan	Pusat	BSSN

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
		g. Pelaksanaan National Cyber Exercise Drill Test	1280	Orang	Pusat	BSSN
		h. Jumlah peningkatan kapabilitas National CSIRT	1	Sistem	Pusat	BSSN
		i. Pembuatan Matriks Keamanan Siber	1	Standar	Pusat	BSSN
		j. Jumlah bantuan kerjasama teknis pada negara ASEAN dan Pasifik	8	Negara	Pusat	BSSN
		k. Jumlah area cakupan National Security Operation Center (NSOC)	4	Titik	Pusat	BSSN
		l. Jumlah ASN pada KLD yang mendapat dilat fungsional sandi	100	Lulusan	Daerah	BSSN
		m. Kegiatan ASEAN - Japan Critical Infrastructure Information Protection 2020	1	Kegiatan	Pusat	BSSN
		n. Jumlah kegiatan literasi dan budaya keamanan siber	4	Kegiatan	Pusat	BSSN
		o. Pembangunan Infrastruktur Politeknik Siber dan Sandi	4	Gedung pertukisian	Pusat	BSSN
		p. Jumlah Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang ditingkatkan kemampuannya untuk menangani insiden pada sektor ekonomi digital, PGP dan Sertifikat Digital	100	PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik)	Pusat dan Daerah	BSSN
		q. Jumlah regulasi terkait manajemen krisis keamanan siber nasional	1	Dokumen	Pusat	BSSN
		r. Jumlah regulasi terkait pembentukan CERT	1	Dokumen	Pusat	BSSN
		s. Jumlah regulasi terkait tata kelola keamanan siber pada sektor IKN (ISAC & VVDP)	2	Dokumen	Pusat	BSSN
		t. Jumlah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang Keamanan Siber	1	Dokumen	Pusat	BSSN
		u. Jumlah dokumen Rencana Strategis Keamanan Siber sektor IKN	1	Dokumen	Pusat	BSSN
		v. Jumlah Standar Audit Keamanan Siber Pemerintah	8	Dokumen	Pusat	BSSN
		w. Jumlah Kerangka Regulasi Literasi Keamanan Siber dan Pengendalian Informasi	1	Dokumen	Pusat	BSSN

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
		x. Jumlah penerapan standar kriptografi pada sektor ekonomi digital	100	PSE (Penyalenggara Sistem Elektronik)	Pusat dan Daerah	BSSN
3	Penguatan Keamanan Laut	Meningkatnya jumlah penyelesaian kejahatan di wilayah laut				
		a. Jumlah Hari Operasional Kapal Pengawas Dalam Rangka Pengawasan Kegiatan Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing Dan Merusak Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP – NRI)	150	Hari Operasi	Pusat	KKP
		b. Jumlah Hari Operasi Pesawat Patroli	150	Hari Operasi	Pusat	KKP
		c. Jumlah Kapal Pengawas yang terbangun	2	Unit	Pusat	KKP
		d. Jumlah Hari Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	50	Hari Operasi	Pusat dan 33 Provinsi	KKP
		e. Jumlah perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang dididik secara akuntabel	150	Kasus	Pusat	KKP

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

5) Program Prioritas Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas

Sasaran dan indikator PP Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 58. Sasaran dan Indikator PP Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas

No	Sasaran/Indikator	Satuan	2017 ^{a)}	2018 ^{b)}	2019 ^{b*)}	2020 ^{b*)}
1	Menurunnya penyalahgunaan narkotika					
	Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika	Persen	2,9 ^{a)}	2,65 ^{b)}	2,65 ^{b)}	2,55
2	Menurunnya tingkat kejahatan					
	Clearance rate	Persen	62,99 ^{c)}	65,66 ^{d)}	65,66 ^{d)}	68

Sumber: a) BNN 2018, b) BNN 2019 (diolah), c) Statistik Kriminal 2018, d) Bareskrim Polri 2019

PP Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas diwujudkan melalui 2 (dua) KP yaitu: (1) pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika; dan (2) peningkatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Adapun rincian sasaran masing-masing KP dari PP

Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas sebagaimana terdapat pada tabel berikut.

Tabel 59. Sasaran dan Indikator KP dari PP Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
1	Pencegahan, Pemberantasan, dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika	Meningkatnya upaya pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika				
		a. Jumlah laporan kajian hukum sistem peradilan pidana narkotika	1	Laporan	Pusat	BNN
		b. Jumlah kawasan rawan kultivasi, produksi, penyelundupan, peredaran gelap, dan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang diintervensi program <i>Alternative Development</i>	6	Kawasan	Aceh Besar, Bireuen, Gayo Lues, Sumut, Sulsel, Kalsel	BNN
		c. Jumlah fasilitas layanan rehabilitasi berbasis komponen masyarakat yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	10	Fasilitas	Pusat	BNN
		d. Jumlah petugas agen (pendamping) pemulihan bagi	200	Orang	Pusat	BNN
		penyalahguna narkotika dan prekursor narkotika yang ditingkatkan kapasitasnya				
		e. Jumlah desa yang memiliki alokasi anggaran program ketahanan keluarga dari dana desa (Desa Bersih Narkoba)	173	Desa	34 Provinsi	BNN
		f. Jumlah Laporan Kajian Desain Strategi "Active Defense" dalam pencegahan peredaran gelap narkotika	1	Laporan	Pusat	BNN
		g. Jumlah Korban Penyalahgunaan Napza yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial	20.000	Orang	Pusat	Kemensos
2	Peningkatan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat				
		a. Jumlah <i>Command Center</i> yang dibangun	5	Lokasi	Aceh, Sumbar, Lampung, Sulbar, dan Kaltara	POLRI
		b. Jumlah rumah susun yang dibangun	6	Paket	Densus 88 AT, Sumut, Jabar, Jateng, Kalbar, dan Sulsel	POLRI
		c. Jumlah Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang dibangun	3	Lokasi	Polda Bali, Sumut, Polrestaes Surabaya	POLRI
		d. Jumlah Perangkat <i>Data Center</i> yang dioptimalisasikan	42	Unit	Bareskrim Polri	Polri
		e. Jumlah Sistem Aplikasi E-Manajemen Penyidikan yang dibangun	727	Unit	Bareskrim Polri	Polri

	f. Jumlah SKCK <i>Online</i> yang dibangun	100	Unit	100 Polsek	Polri
	g. Jumlah dokumen Rencana Aksi Penanganan konflik sosial	34	Dokumen	Pusat	Kemendagri
	h. Jumlah warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan pencegahan konflik sosial	41.930	Orang	Pusat	Kemensos
	i. Jumlah korban bencana sosial yang mendapat pemenuhan kebutuhan dasar	120.000	Orang	Pusat	Kemensos
	j. Jumlah aparaturnya pemerintah daerah yang berkapasitas melakukan kewaspadaan dan deteksi dini	200	Orang	Daerah	Kemendagri

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

BAB II : PELAKSANAAN APBN PADA PEMERINTAH PROVINSI NTB DAN KABUPATEN/KOTA SE-NTB TAHUN 2020

Pada tahun 2020 dana APBN yang diberikan terdiri dari dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan. Jumlah total dana APBN yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota baik dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan untuk triwulan III sebesar 274.311.885.000 dan telah terealisasi hingga per 30 September sebesar Rp. 181.896.879.810. atau 66,31% dengan capaian fisiknya sebesar 45,37% dimana fokus kegiatan masih dalam tahap pelaksanaan. Terdapat per

bahan pagu sebesar Rp. 117.030.996.000- dari jumlah pagu murni sebesar Rp. 391.342.881.000 menjadi rasionalisasi sebesar Rp. 274.311.885.000. Pagu dekonsentrasi untuk triwulan III sebesar Rp. 97.060.291.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 64.156.991.836 atau 66,10% dengan capaian fisiknya sebesar 44,31% . Dan pagu untuk tugas pembantuan sebesar Rp. 177.251.594.000 dan telah terealisasi sebesar Rp 117.739.887.974 atau 66,43% dengan capaian fisiknya sebesar 45,90%. Dan ada 1 Satker yang belum ada pagu dan realisasinya di Aplikasi E-Monev Bappenas yaitu Satker dengan Kode 418273 pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk lebih jelasnya, berikut disampaikan capaian realisasi dana APBN Tahun 2020 untuk Triwulan III dalam bentuk tabel.

Tabel 60. Capaian Realisasi APBN Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB

NO	JENIS	PAGU RASIONALISASI	REALISASI	%
A	APBN TOTAL	274.311.885.000	181.896.879.810	66,31
1	Dekonsentrasi	97.060.291.000	64.156.991.836	66,10
2	Tugas Pembantuan	177.251.594.000	117.739.887.974	66,43
B	PROVINSI NTB	253.334.951.000	177.761.866.238	70,17
1	Dekonsentrasi	97.060.291.000	64.156.991.836	66,10
2	Tugas Pembantuan	156.274.660.000	113.604.874.402	72,70
C	KABUPATEN / KOTA	20.976.934.000	4.135.013.572	19,71
1	Dekonsentrasi	-	-	-
2	Tugas Pembantuan	20.976.934.000	4.135.013.572	19,71

Sumber: DJPB Provinsi NTB, 2020 (data diolah)

A. PELAKSANAAN APBN PADA PEMERINTAH PROVINSI NTB

Pelaksanaan APBN pada Pemerintah Provinsi NTB diselenggarakan melalui 2 kewenangan yaitu Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh 48 Satuan Kerja pada Triwulan III ini. Pagu untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp. 253.334.951.000, yang semula pagu murni sebesar Rp. 346.838.237.000, ada perubahan pagu sebesar Rp. 93.503.286.000. Pagu Dekonsentrasi yang diberikan untuk triwulan III sebesar Rp. 97.060.291.000 yang dilaksanakan oleh 40 Satuan Kerja dengan realisasinya sebesar Rp. 64.156.991.836, atau sebesar 66,10% dengan pencapaian kinerja sebesar 38,18% sedangkan pagu Tugas Pembantuan sebesar Rp. 156.274.660.000 yang dilaksanakan oleh 8 Satuan Kerja dengan realisasinya sebesar Rp. 113.604.874.402 atau sebesar 72,70 % dengan pencapaian kinerja sebesar 62,71%. Penurunan pagu pada pelaksanaan APBN pada Pemerintah Provinsi NTB akibat masih adanya revisi anggaran dan ada anggaran yang di Nollkan untuk penanganan penanggulangan pandemic Covid-19. Satuan Kerja itu rata rata masih dalam tahap pelaksanaan kegiatan dan ada beberapa Satuan Kerja yang tidak dapat melaksanakan kegiatannya. Pencapaian kinerja untuk Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan rata rata 44,31%. Untuk jelasnya capaian realisasi APBN tahun 2020 pada Triwulan III pada Pemerintah Provinsi NTB dapat dilihat dalam bentuk Tabel dibawah ini.

Besaran pagu dan realisasi capaian penyelenggaraan dana APBN pada Pemerintah Provinsi Triwulan III Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 61. Capaian Realisasi APBN Tahun 2020 Triwulan III pada Pemerintah Provinsi NTB

NO	KEW	KODE SATKER	NAMA SATKER	KEUANGAN			FISIK
				PAGU	REALISASI	%	%
A	DINAS KESEHATAN			7.468.317.000	4.841.310.881	64,82	26,79
1	DK	230003	DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	992.990.000	647.066.231	65,16	28,57
2	DK	239000	DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	2.281.900.000	2.002.991.550	87,78	80,36
3	DK	239005	DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	440.168.000	286.989.600	65,20	28,57
4	DK	239006	DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	3.188.348.000	1.583.812.500	49,68	31,90
5	DK	239007	DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	244.258.000	227.557.900	93,16	66,67
6	DK	239008	DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	320.653.000	92.893.100	28,97	25,00
B	BAPPEDA			425.577.000	308.861.666-	72,57	100,00
9	DK	230020	BAPPEDA PROV. NUSA TENGGARA BARAT	425.577.000	267.071.666	72,57	100,00
C	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			2.981.206.000	1.976.423.392	66,30	62,62
11	DK	235221	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	340.899.000	213.019.417	62,49	33,33
12	DK	239065	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	166.369.000	124.086.340	74,59	60,00
13	DK	239066	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	1.804.778.000	1.128.077.835	62,51	49,38
14	DK	239067	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	326.392.000	241.078.500	73,86	62,62
15	DK	239068	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	112.455.000	107.358.300	95,47	100,00
16	DK	239069	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	230.313.000	162.803.000	70,69	66,67
D	DINAS KETAHANAN PANGAN			12.329.969.000	10.528.588.240	85,39	42,31
17	DK	239220	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	12.179.969.000	6.928.261.240	56,38	42,31
E	DINAS KOPERASI UKM			2.169.017.000	1.516.810.000	69,93	67,31
18	DK	230046	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	2.169.017.000	1.516.810.000	69,93	67,31

NO	KEW	KODE SATKER	NAMA SATKER	KEUANGAN			FISIK
				PAGU	REALISASI	%	%
F	DINAS PARIWISATA			2.623.428.000	29.050.000	1,11	0.00
19	DK	400595	DINAS PARIWISATA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	2.623.428.000	29.050.000	1,11	0.00
G	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			20.787.319.000	14.825.081.361	71,32	36,81
20	DK	350333	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI NTB	20.787.319.000	14.825.081.361	71,32	36,81
H	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGEDALIAN PENDUDUK DAN KB			420.000.000	275.060.000	65,49	0.00
21	DK	230044	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGEDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	420.000.000	275.060.000	65,49	0.00
I	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA			3.761.205.000	1.283.380.000	34,12	0.00
22	DK	230071	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	3.761.205.000	1.283.380.000	34,12	0.00
J	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP			333.084.000	139.347.030	41,84	40,85
23	DK	230024	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NTB	333.084.000	139.347.030	41,84	40,85
K	DINAS PERDAGANGAN			840.831.000	403.352.700	47,97	25.00
25	DK	239029	DINAS PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	256.782.000	89.686.200	34,93	25.00
26	DK	239077	DINAS PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	584.049.000	313.666.500	53,71	26,19
L	DINAS PERINDUSTRIAN			2.054.563.000	1.142.693.915	55,62	0.00
27	DK	239033	DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	2.054.563.000	1.142.693.915	55,62	0.00
M	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			483.097.000	285.465.000	59,09	40.00
28	DK	230038	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	483.097.000	285.465.000	59,09	40.00

NO	KEW	KODE SATKER	NAMA SATKER	KEUANGAN			FISIK
				PAGU	REALISASI	%	%
N	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN			139.551.645.000	96.543.475.606	69,18	58,35
29	DK	239009	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	3.149.265.000	2.102.719.780	66,77	52,53
30	DK	239011	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	1.872.480.000	992.922.640	53,03	28,57
31	DK	239071	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	6.351.577.000	4.174.693.505	65,73	61,36
32	DK	239072	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	1.591.456.000	692.119.275	64,61	70,00
33	DK	239224	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	13.771.346.000	9.450.626.651	68,63	64,21
34	TP	239126	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	79.986.494.000	53.700.532.773	66,91	54,07
35	TP	239127	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	3.687.547.000	1.024.031.400	27,77	43,33
36	TP	239128	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	13.203.985.000	10.262.815.133	81,26	83,38
37	TP	239133	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	16.866.240.000	14.143.014.449	83,85	67,70
O	DINAS PETERNAKAN DAN KESWAN			11.884.416.000	7.500.455.350	63,18	64,25
38	TP	239129	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	10.415.416.000	6.382.132.350	61,28	66,00
39	TP	239135	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	1.469.000.000	1.126.313.000	76,67	62,50
P	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PR			31.054.462.000	26.966.025.297	86,83	62,35
40	TP	239234	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	21.250.418.000	17.490.405.000	82,31	74,69
41	TP	239237	DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI NTB	9.804.044.000	9.475.620.297	96,65	50,00

NO	KEW	KODE SATKER	NAMA SATKER	KEUANGAN			FISIK
				PAGU	REALISASI	%	%
Q	DINAS SOSIAL			8.159.076.000	4.539.898.600	55,36	50.00
42	DK	230017	DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	121.660.000	85.105.000	69,95	0,00
43	DK	239020	DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	1.323.074.000	940.840.600	71,11	67,05
44	DK	239021	DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	289.200.000	71.030.00	24,56	16,67
45	DK	239023	DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	4.398.062.000	2.177.815.300	49,52	47,04
46	DK	418854	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	200.000.000	142.120.000	71,06	70,00
47	DK	418974	DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	1.863.080.000	1.119.987.700	60,11	50.00
R	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			5.971.739.000	4.651.667.200	77,89	30.28
48	DK	239028	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROV. NUSA TENGGARA BARAT	472.012.000	308.090.200	65,27	29,14
50	DK	239225	DINAS TENAGA KERJA PROV. NUSA TENGGARA BARAT (13)	4.841.708.000	3.902.581.800	80,60	55,34
51	DK	239916	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	506.638.000	304.909.800	60,18	36,65
52	DK	418273	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	151.381.000	136.085.400	89,90	0.00
PEMERINTAH PROVINSI				253.334.951.00	177.761.866.238	70,17	44.31

Sumber: DJPB Provinsi NTB, 2020 (data diolah)

B. PELAKSANAAN APBN PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Dana APBN (Tugas Pembantuan) pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB pada Triwulan III sebesar Rp. 20.976.934.000 dengan realisasi sebesar Rp. 4.135.013.572 atau 19,71% dengan pencapaian kinerja sebesar 29,09% yang dilaksanakan oleh 8 Kabupaten untuk Triwulan III atau 16 Satuan Kerja. Ada 6 Satuan Kerja yang bertambah untuk Triwulan III ini yaitu Satker Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat, Satker Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah, Satker Dinas Perindustrian Dan

Perdagangan Kabupaten Lombok Timur, Satker Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Utara, Satker Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Bima dan Satker Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Mataram. Dan untuk Triwulan III ada perubahan Pagu sebesar Rp. 23.527.710.000 yang semula Pagu Murninya sebesar 44.504.644.000 menjadi sebesar Rp 20.976.934.000 dengan realisasi sebesar Rp. 4.135.013.572 atau 19,71% dengan pencapaian kinerjanya sebesar 29,09%.

Adapun capaian realisasi dari pelaksanaan APBN (Tugas Pembantuan) pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB Tahun 2020 sampai dengan Triwulan III (30 September) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 62. Capaian Realisasi APBN Tahun 2020 Triwulan III pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB

NO	KEW	KODE SATKER	NAMA SATKER	KEUANGAN			FISIK %
				PAGU	REALISASI	%	
KABUPATEN LOMBOK BARAT				3.413.390.000	180.272.500	5,28	19,48
1	TP	239242	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. LOMBOK BARAT	110.000.000	75.498.000	68,63	50,00
2	TP	239243	DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LOMBOK BARAT	653.390.000	94.444.500	14,45	8,44
3	TP	230159	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT	2.650.000.000	10.330.000	0,39	0,00
KABUPATEN LOMBOK TENGAH				1.542.890.000	133.261.500	24,55	0,00
4	TP	239248	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. LOMBOK TENGAH	542.890.000	133.261.500	24,55	0,00
5	TP	230243	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH	1.000.000.000	0,00	0,00	0,00
KABUPATEN LOMBOK TIMUR				2.852.300.000	259.251.400	9,09	50,00
6	TP	230340	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. LOMBOK TIMUR	140.000.000	126.055.400	90,04	100,00
7	TP	239253	DINAS PERTANIAN KAB. LOMBOK TIMUR	212.300.000	99.476.000	46,86	50,00
8	TP	239259	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR	2.500.000.000	15.870.000	0,63	0,00
KABUPATEN SUMBAWA				2.789.490.000	1.320.025.379	47,32	61,81
9	TP	230574	DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMBAWA	1.071.440.000	996.939.900	93,05	73,28
10	TP	230576	DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUMBAWA	1.718.050.000	322.085.479	18,81	50,33

NO	KEW	KODE SATKER	NAMA SATKER	KEUANGAN			FISIK
				PAGU	REALISASI	%	%
KABUPATEN BIMA				4.878.864.000	2.231.627.793	45,74	44,44
11	TP	230459	DINAS SOSIAL KABUPATEN BIMA	882.440.000	795.280.700	90,12	50,00
12	TP	239050	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB BIMA	3.609.970.000	1.203.827.493	33,35	33,33
13	TP	350329	DINAS NAKERTRANS KAB. BIMA	386.454.000	232.519.600	60,17	50,00
KABUPATEN LOMBOK UTARA				1.500.000.000	0,00	0,00	0,00
14	TP	280831	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA	1.500.000.000	0,00	0,00	0,00
KOTA BIMA				2.500.000.000	0,00	0,00	0,00
15	TP	235229	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BIMA	2.500.000.000	0,00	0,00	0,00
KOTA MATARAM				1.500.000.000	10.575.000	0,71	0,00
16	TP	235157	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MATARAM	1.500.000.000	10.575.000	0,71	0,00
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA				20.976.934.000	4.135.013.572	19,71	29,09

Sumber: DJPB Provinsi NTB, 2020 (data diolah)

BAB III : PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada triwulan III Tahun 2020, sebagian besar Satker mengalami rasionalisasi anggaran bahkan terdapat 9 satker yang di-nol-kan anggarannya dengan total rasionalisasi mencapai Rp. 117.030.996.000, sehingga sisa anggaran menjadi Rp.274.311.885.000 dengan rincian Rp.20.976.934.000 dilaksanakan oleh Satker lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB dan Rp.253.334.951.000 dilaksanakan oleh Satker lingkup Pemerintah Provinsi NTB yang terdiri dari Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.97.060.291.000 dan Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp.156.274.660.000. Meskipun ada rasionalisasi, ada beberapa Satker yang baru turun DIPAny di triwulan III terutama di Kabupaten/Kota sebanyak 6 Satker dengan alokasi tambahan sebesar Rp.7.650.000.000, sehingga total alokasi dana Dekon/TP di Provinsi NTB menjadi Rp.281.961.885.000.

Adapun realisasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatannya sampai triwulan III secara rata-rata baru mencapai 44,57% dengan realisasi keuangan sebesar Rp.181.896.879.810 atau 66,31%, dengan rincian kinerja dana dekon sebesar 41.50% dengan realisasi keuangan 66,10%, sedangkan dana tugas pembantuan terdiri dari tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh satker provinsi sebesar 72.71% dengan realisasi keuangan 72.70%, dan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh satker sebesar 44,57% dengan realisasi keuangan 66,43%. Capaian ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan triwulan II, ada peningkatan realisasi keuangan sebesar 34,74% dan realisasi fisik sebesar 27,63%.

Rendahnya capaian kinerja secara umum disebabkan beberapa hal antara lain:

1. terdapat banyak kegiatan/sub kegiatan dana dekon yang pelaporan pencapaian fisiknya pada triwulan IV;

2. Adanya penundaan pelaksanaan kegiatan pada triwulan IV akibat pandemi Covid-19;
3. Adanya keterlambatan turunnya petunjuk teknis terkait pelaksanaan kegiatan dari Kementerian / Lembaga yang memberikan dana APBN;
4. Terdapat adanya pemotongan anggaran program/kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja untuk penanganan Covid-19; dan
5. Ada beberapa DIPA yang baru turun dari Kementerian / Lembaga yang memberikan dana APBN pada triwulan III.

B. SARAN

Untuk mempercepat pelaksanaan dan penyerapan dana APBN baik pada Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB, maka disarankan

1. Memperkuat koordinasi antara Satuan Kerja pelaksana dengan Kementerian/Lembaga yang memberikan APBN baik dalam penataan administrasi dan petunjuk teknis yang diperlukan secara terjadwal dengan pemanfaatan teknologi informasi (*video conference*) maupun media lainnya;
2. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan DJPB Kementerian Keuangan Provinsi NTB terkait dengan administrasi keuangan;
3. BAPPEDA Provinsi NTB dan BAPPEDA Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB melakukan pemantauan dan monitoring terhadap seluruh Satuan Kerja di wilayah kerja masing-masing dan melaporkan secara berkala kepada pihak-pihak terkait;
4. Satuan Kerja dihimbau untuk terus melakukan pelaporan capaian pelaksanaan kegiatan kepada Kementerian/Lembaga pemberi APBN, Kementerian Keuangan maupun Kementerian PPN/Bappenas melalui aplikasi yang telah disediakan secara rinci baik dalam penentuan lokasi kegiatan (peta dan titik koordinat) dan dokumentasi kegiatan berupa foto dan video secara *up to date* sehingga memudahkan dalam proses monitoring sekaligus akuntabilitas kinerja bagi Satker pelaksana kegiatan.